

Krisis Biosfer Antroposen: Memikirkan Ulang Strategi Perjuangan Nilai dan Kelas

Edisi Khusus tentang
Krisis Ekologi Kapitalis



Jurnal IndoPROGRESS (JIP) berbasis di Indonesia dan diterbitkan dua kali setahun (Februari dan Agustus) sebagai wahana untuk memajukan kritik dan pemahaman atas kapitalisme kontemporer. JIP menerbitkan analisis ekonomi-politik, dan diskusi-diskusi tentang teori sosial kontemporer, kekuasaan negara dan gerakan sosial, evolusi moda produksi, media dan literatur, serta sejarah dan filsafat.

Seluruh artikel melalui penilaian sejawat dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dalam akses terbuka (*open access*). Selain menerima artikel orisinal dan konseptual, JIP juga mengkurasi, menerjemahkan, dan menerbitkan ulang analisis penting mengenai kapitalisme, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara. JIP menerima pengajuan tema untuk edisi khusus dan mengorganisasi panel daring untuk mempromosikan diskusi intelektual.

Pimpinan Redaksi

Inaya Rakhmani

Redaktur

Martin Suryajaya

Hizkia Yosie Polimpung

Muhammad Ridha

Dewan Penasihat

Vedi Hadiz, The University of Melbourne

John Roosa, The University of British Columbia

Marcello Musto, York University

Hilmar Farid, Ministry of Education and Culture of Indonesia

Silvia Tiwon, Berkeley University of California

Immanuel Ness, City University of New York

Asisten Redaksi

Francesco Hugo

Dewan Editor

Rianne Subijanto, Baruch College of City University of New York

Abdil Mughis Mudhoffir, University of Melbourne

Intan Suwandi, Illinois State University

Arianto Sangadji, York University

Airlangga Pribadi, Airlangga University

Iqra Anugrah, Kyoto University

Made Suprijatma, Cornell University

Dede Mulyanto, Padjadjaran University

Dave Lumenta, University of Indonesia

Coen Pontoh, Indoprogress (AS)

Ilustrator

Muhammad Awaludin Yusuf

DAFTAR ISI

- 4 EDITORIAL
- 8 MARX DI ZAMAN
ANTROPOSEN: NILAI, KERETAKAN
METABOLIK, DAN DUALISME NON-
KARTESIAN
- 35 MARXISME DAN
EKOFEMINISME PADA ERA
PERUBAHAN IKLIM: KONVERGENSI
DAN DIVERGENSI
- 54 AKUMULASI PRIMITIF:
PENGALAMAN INDUSTRI
PERTAMBANGAN DI INDONESIA*
- 79 KRISIS, KETIDAKADILAN, DAN
KEADILAN SOSIO-EKOLOGIS
- 111 KRITIK EKONOMI-POLITIK RAPS
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBARUAN
AGRARIA SEMESTA
- 136 ULASAN BUKU: MAX AJL, A
PEOPLE'S GREEN NEW DEAL
(LONDON: PLUTO PRESS, 2021)

EDITORIAL

“Kerja bukanlah satu-satunya sumber seluruh kekayaan. Alam juga merupakan sumber nilai layaknya kerja, yang sendirinya hanyalah merupakan manifestasi dari kekuatan alam.” Demikianlah Marx dalam *Kritik Program Gotha* (1875) telah jauh hari menandakan peran sentral alam sebagai sumber nilai, di samping kerja. Di tengah krisis ekologi tak berkesudahan hari ini di satu sisi, dan di sisi lain persistensi kapital dalam mengakumulasi profit dari biosfer, lantas bagaimana kiprah kekuatan alam dalam menciptakan nilai?

Jurnal IndoProgress edisi ini menghimpun intervensi para pemikir dari tradisi Marxisme yang mencoba membahas persoalan ekologi hari ini dari perspektif kritik kapitalisme. Secara metodologis, analisis Marx ini juga menunjukkan bagaimana materialisme historis wajib meletakkan persoalan seputar alam dalam kaitannya dengan problematik nilai dan kerja. Yang terakhir ini, ironisnya, relatif kurang populer di kalangan akademisi dan aktivis lingkungan, ekologi, hijau, dst., yang mendaku kritis dan progresif. Sekalipun banyak mengutip Marx, terma-terma penting Marxian seperti ‘nilai’ dan ‘kerja’ cenderung larut dalam eksploitasi habis-habisan secara *common-sensical* atas terma Marxian lainnya yang lebih *nge-pop* seperti ‘eksploitasi’ dan ‘pengkaplingan’ (*enclosure*). Secara praksis, analisis mereka cenderung jatuh pada demonisasi dan melankolia (Wendy Brown, 1999; Enzo Traverso, 2017); ‘Kapitalisme’ lebih merupakan julukan bagi “si jahat” ketimbang mendapat perlakuan analitis; begitu pula ujung analisisnya banyak berkubang pada seruan etis-moralis, ketimbang perencanaan strategis untuk perjuangan kelas merebut sarana produksi nilai.

Jurnal IndoProgress edisi ini mencoba menempatkan dirinya pada intervensi para pemikir dari tradisi Marxisme yang mencoba melampaui dualisme Cartesian, yaitu bahwa manusia (juga kapitalisme) dan alam adalah dua hal yang terpisah. Para pemikir ini, dalam kadarnya mas-

ing-masing, mencoba untuk mulai beranjak dari sekedar menganalisis “apa yang dilakukan kapitalisme pada alam”, yang sendirinya mengasumsikan kapitalisme sebagai terpisah dari alam. Sebaliknya mereka mulai mengeksplorasi “bagaimana kapitalisme bekerja dengan alam,” yang mana mengasumsikan kemenyatuan kapitalisme (dan kemanusiaan) dengan alam dalam relasi yang disebut para Marxian sebagai ‘metabolis’. Artikel Kohei Saito tersituasikan tepat pada perdebatan ini. Terhadap dakwaan Jason Moore bahwa pendekatan Marx adalah dualis, Saito menunjukkan bahwa pandangan dualis Marx tersebut adalah tidak terelakkan apabila kita akan memahami intrikasi dan kekhususan historis dari kapitalisme. Pasalnya, adalah kapitalisme yang memisahkan dan merenggut kemenyatuan monistik antara manusia dan alam. Analisis Marx yang tampak seolah dualis, sebenarnya tidak lain adalah manifestasi komitmen dialektis materialisnya untuk memahami keretakan metabolisme manusia dan alam yang tak lain karena intervensi variabel kapitalisme. Dalam keretakan ini, kapital “menanduskan tenaga kerja dan merampok sumber daya alam.”

Dalam *Kapital*, Marx menyebutkan bahwa kepentingan kapitalisme terhadap alam nampak dalam upayanya “merampok tanah dengan cara meningkatkan dan kemudian memerah fertilitasnya.” Petulangan kapitalisme dalam memperluas dan memperdalam akumulasi modal melalui perampokan tanah (*robbing of the soil*) ini, salah duanya terjadi di sektor agrikultur dan ekstraktif/pertambangan. Arianto Sangadji membahas bagaimana upaya perluasan dan pendalaman akumulasi modal pertambangan telah turut membawa perubahan pada alam, dan pada gilirannya memperdalam krisis ekologi. Demikianlah saat kapitalisme meretakkan metabolisme manusia dan alam, ia secara aktif mentransformasi relasi kehidupan itu sendiri. Sangadji menunjukkan, dalam hal ini, pembentukan kelas-kelas proletar sebagai akibat operasi kapital pertambangan di Sulawesi (oleh PT. Inco/PT. Vale) dan di Papua (oleh PT. Freeport).

Perampokan tanah oleh kapital juga turut menggunakan oleh tangan negara. Di sini, perampokan tanah secara ironis muncul dalam wajahnya yang legalistik. Dalam tulisannya di volume ini, Roy Murtagh melacak genealogi akan reduksi konsep dan gagasan ‘reforma ag-

raria' menjadi tidak lebih dari sekedar sertifikasi dan legalisasi tanah untuk kepentingan modal besar. Menarik dalam bahasan Murtadho adalah bagaimana akar populis dari reforma agraria ternyata mampu untuk dikooptasi oleh agenda neoliberal sebagaimana arahan dari Konsensus Pasca Washington (*Post-Washington Consensus*). Walau begitu, keduanya tidak ditakdirkan untuk berseiringan selamanya. Setidaknya, inilah yang dilihat Murtadho, yang pada gilirannya membuatnya menyarankan pada kita semua untuk tetap optimis dalam melihat seluruh agenda publik seputar reforma agraria. Dengan mengeksploitasi kontradiksi inheren (populisme vs neoliberal) dalam agenda reforma agraria Indonesia, Murtadho menganjurkan beberapa poin strategis bagi kaum progresif untuk merebut agenda reforma agraria dari anasir neoliberal.

Salah satu isu krusial yang juga tak kalah penting diperhatikan adalah bagaimana kosakata yang digunakan kaum progresif seringkali tergelincir masuk ke dalam jurang kritisisme liberal humanis. Dalam isu ekologi, kaum progresif seringkali juga berbagi terma, dan juga karenanya irisan agenda politik, dengan kelompok liberal kritis. Satu yang mengemuka adalah gagasan soal 'keadilan sosial-ekologis'. Bosman Batubara mencoba mendudukkan istilah ini secara lebih komprehensif, dan jauh dari penggunaan artifisial yang marak di kalangan aktivis. Ia menunjukkan bagaimana persoalan keadilan dalam konteks sosial-ekologis tidak cukup untuk hanya menghiraukan persoalan pekerja/buruh, melainkan juga mereka yang bukan pekerja/buruh, dalam artian tidak terlibat dalam proses produksi terkait. Dengan membahas kekeringan sumur dangkal warga Yogyakarta akibat industri perhotelan, Batubara menunjukkan bagaimana analisis mengenai siklus hidrolis air sumur dapat memberi pemahaman yang lebih baik soal bagaimana kapital perhotelan mencuri nilai tidak hanya dari pekerjaannya, melainkan juga dari masyarakat sekitar yang menderita kekeringan sumur. Batubara berkeras bahwa persoalan keadilan/ketidakadilan ekologis penting untuk dilekatkan pada aspek produksi, ketimbang sekedar aspek pemenuhan sebagaimana kerap mewarnai narasi liberal.

Selain membahas analisis, Jurnal IndoProgress edisi ini juga menampilkan intervensi dari pemikiran-pemikiran mengenai gerakan sosial politik. Artikel Rosalinda Pineda Ofreneo memperkaya dan juga

memperdalam gagasan Marx mengenai alam dengan menambahkan perspektif ekofeminisme. Dengan ini, Ofreneo memaparkan senarai gagasan di seputar akar patriarkis dari kapitalisme yang predatoris terhadap alam. Tidak hanya intervensi di tataran analisis, ekofeminisme materialis yang diusung Ofreneo juga turut mengontribusikan beberapa gagasan praksis dalam memperbaiki hubungan manusia dengan alam dan juga dalam rangka mempersatukan gerakan sosial progresif. Pada gilirannya, artikel ulasan buku dari Muhammad Ridha membahas proposal People's Green New Deal dari Max Ajl, khususnya dalam hal perbedaannya dengan agenda politik Green New Deal arus utama yang marak di kalangan aktivis lingkungan liberal.

Akhir kata, edisi ini tidak akan dapat terbit tanpa bantuan rekan-rekan tim redaksi, editor, dan juga dari para penulis. Kami berterima kasih kepada Rosalinda Pineda Ofreneo dan Kohei Saito yang sudah mengizinkan untuk menerbitkan terjemahan artikelnya pada edisi kali ini; juga kepada redaksi Prisma yang mengizinkan kami menerjemahkan artikel Roy Murtadho, Bosman Batuabara, dan Anto Sangadji. Kami berharap senarai gagasan yang dihadirkan edisi ini dapat memberikan amunisi bagi pikiran dan gerakan dalam mentransformasikan retakan metabolis yang dihasilkan oleh Kapitalisme hari ini.

KARYA DIKUTIP

Brown, Wendy, "Resisting Left Melancholy," *boundary 2*, 26, 3, 1999.

Marx, Karl, *Critique of the Gotha Programme* (1875)

Traverso, Enzo, *Left-Wing Melancholia: Marxism, History, and Memory* (Columbia Uni Press, 2017).

MARX DI ZAMAN ANTROPOSEN: NILAI, KERETAKAN METABOLIK, DAN DUALISME NON-KARTESIAN

Kohei Saito¹

ABSTRAK

Zaman Antroposen dicirikan oleh krisis ekologi global yang diciptakan manusia tanpa mengetahui solusi yang efektif. Di luar pengotakan kajian humaniora, ilmu sosial dan ilmu alam, muncul serangkaian upaya serius untuk mencari kerangka teoretis yang memadai untuk memahami pembentukan, perkembangan, dan masa depan Antroposen. Para Marxis ekologis juga secara aktif berpartisipasi dalam diskusi ini untuk menyoal hubungan antara Antroposen dan kapitalisme, yang menghasilkan perdebatan baru. Sementara ekososialis tahap kedua seperti John Bellamy Foster dan Paul Burkett mencoba menghubungkan isu-isu umum Antroposen dengan konsep 'keretakan metabolik', Jason W. Moore tidak hanya menggantikan konsep Antroposen dengan 'Kapitalosen' dan menolak pendekatan keretakan metabolik sebagai sesuatu yang jatuh ke jurang 'pembagian Cartesian', yang tidak dapat meneorikan sifat krisis hari ini dengan memadai. Menganalisis secara kritis pemahaman 'monis' Moore tentang sejarah perkembangan kapitalisme, makalah ini mengkaji mengapa Marx menggunakan istilah-istilah yang terkesan 'dualis' dalam analisisnya. Moore mengklaim bahwa pendekatan pasca-Cartesian adalah interpretasi yang benar dari ekonomi politik Marx. Namun, pemerhatian lebih saksama atas metode Marx mengungkapkan adanya dualisme non-Cartesian, yang menjadi dasar bagi kritik radikal atas krisis ekologi hari ini. Selanjutnya, makalah ini berpendapat bahwa teori metabolisme Marx harus dipahami dalam kaitannya dengan penelitian intensifnya tentang ilmu alam dan masyarakat non-Barat untuk membayangkan berbagai kemungkinan subjektivitas revolusioner.

Kata-kata Kunci: ekologi, antroposen, krisis, kapital, Ekososialisme, metabolisme

BATAS-BATAS BUMI

Pada tahun 2002, adalah Paul Crutzen, pemenang hadiah Nobel bidang kimia untuk penelitiannya tentang lubang ozon, yang mengu-

¹ Kohei Saito, Ph.D., Economics Department, Osaka City University, E-Mail: saito@econ.osaka-cu.ac.jp

sulkan konsep baru ‘Antroposen’ sebagai sebutan untuk zaman geologi terkini dalam artikelnya ‘The Geology of Mankind’ yang diterbitkan di *Nature* (Crutzen, 2002). Dengan konsep ini ia hendak menunjuk pada masa terkini dalam sejarah bumi yang faktor penentunya terdiri dari berbagai aktivitas manusia. Aktivitas-aktivitas tersebut disertai emisi gas rumah kaca, monokultur besar-besaran, deforestasi berlebihan, dan berbagai eksperimen bom nuklir yang telah secara signifikan mengubah lingkungan alam, dan meninggalkan jejak ekologis di mana-mana di permukaan planet ini.

Ironisnya, meskipun dampak manusia di bumi sudah begitu luas dan kuat saat ini, impian modernnya untuk mewujudkan ‘penguasaan mutlak atas alam’ tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa Antroposen malah bercirikan kegagalan nyata dari proyek modern ini. Pemanasan global, desertifikasi, kepunahan spesies, bencana nuklir di Chernobyl dan Fukushima, semuanya merupakan karakteristik dari krisis ekologis saat ini, dan mereka mengancam planet ini sebagai bencana ekologis yang lepas kendali. Serangkaian penelitian oleh Johan Rockström dari Stockholm Resilience Centre dan Will Steffen dari Australian National University memperingatkan kita, bahwa empat ‘batas planet’ di sembilan sistem bumi (perubahan iklim, hilangnya integritas keanekaragaman hayati, aliran nitrogen dan fosfor, perubahan sistem tanah, pengasaman laut, konsumsi air tawar, penipisan ozon stratosfer, pemuatan aerosol atmosfer, polusi kimia) sudah terlanggar, mencapai tingkat di mana perubahan lingkungan yang permanen dan ekstrem lebih mungkin terjadi jika kecenderungan ini berlanjut (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015). Ada probabilitas bahwa batas-batas lain akan dilanggar—atau mungkin sudah dilanggar karena beberapa batas tidak dapat diukur dengan teknologi saat ini—namun kita tidak dapat memprediksi dengan pasti apa yang sebenarnya akan terjadi. Yang sedang berlaku di sini adalah sebuah ‘dialektika Pencerahan’, khususnya berkenaan dengan dominasi atas alam: Perkembangan kekuatan-kekuatan produktif yang sangat besar, yang mengampu manusia untuk mengubah seluruh bumi tanpa menyisakan satu pun bagian tak terjamah, pada saat yang sama membuat nyaris mustahil untuk dapat menyelenggarakan produksi sosial yang berkelanjutan. Produksi massal dan konsumsi

massal di bawah persaingan anarkis di antara individu-individu atomistik modern melemahkan kondisi materialnya. Dialektika Pencerahan ini, yang dimulai dengan ‘kematian alam’ (Merchant, 1990), kini menayang bayangan gelap bagi masa depan Antroposen.

Bencana ekologis Antroposen mengingatkan kita pada peringatan terkenal Friedrich Engels: “Namun, janganlah kita terlalu menyanjung diri karena kemenangan manusia atas alam. Untuk setiap kemenangan seperti itu, alam membalas kita. Memang benar bahwa setiap kemenangan pada awalnya membawa hasil yang kita harapkan, tetapi kemudian dan seterusnya akan memberi efek yang sangat berbeda dan tak terduga yang nyaris selalu membatalkan yang pertama” (Marx & Engels, 1987). Menurut Engels, peradaban kuno di Mesopotamia, Yunani, dan Asia Minor, terlepas kecanggihannya, pada akhirnya runtuh karena produksi sosial mereka yang mubazir mengabaikan hukum alam dan merusak fondasi material produksi mereka sendiri. Engels meyakini bahwa produksi kapitalis modern pun, yang hanya berusaha memaksimalkan keuntungan dengan cara yang picik, akan mengikuti jejak yang sama menuju kehancurannya. Pernyataan ini sering disorot sebagai bukti minat ekologis Engels yang tersembunyi dalam Dialektika Alamnya yang sangat abstrak (Salleh, Goodman & Hosseini, 2015). Apakah gagasan Engels tentang ‘pembalasan alam’ memadai untuk memahami krisis ekologis di Antroposen?

ANTHROPOSEN ATAU KAPITALOSEN?

Bahkan kaum yang mengaku Marxis pun, ketika dihadapkan dengan masalah lingkungan yang memburuk dalam kapitalisme serta dalam eksperimen ‘sosialisme riil’ berulang kali menunjuk pada keterbatasan teoretis Marx dan Engels sebagai karakteristik teori sosial abad kesembilan belas. Dengan itu, visi sosialisme mereka didasarkan pada gagasan hiperindustrialisme (atau Prometheanisme) yang hendak sepenuhnya menguasai alam melalui pengembangan kekuatan-kekuatan produktif tanpa batas. Oleh karena itu, keyakinan optimistis mereka pada kemajuan teknologi terbukti tidak berguna bagi teori kritis zaman baru yang menyikapi ‘batas-batas alam’ lebih serius berkenaan dengan koeksistensi manusia dan alam (Benton, 1989). Kalangan yang mengaku Marxis itu, seperti Ted Benton, André Gorz dan Alain Lipietz, yang

oleh John Bellamy Foster (2014) dikategorikan sebagai ‘ekososialis tahap pertama’, menunjuk pada betapa mendesaknya menyatukan pemikiran Merah dan Hijau untuk rehabilitasi gerakan kiri pada 1980-an dan 90-an, tetapi mereka sebenarnya bermaksud untuk melengkapi aspek ekologis, yang absen dalam kritik ekonomi politik Marx sendiri. Dengan melakukan itu, para ekososialis tahap pertama ini menganjurkan untuk menyingkankan teori nilai, kelas, dan sosialisme Marx dan mencoba memasukkan gerakan buruh tradisional sepenuhnya di bawah kampanye lingkungan yang baru tumbuh setelah runtuhnya ‘sosialisme riil.’²

Namun, konstelasi diskursif seputar ‘ekologi Marx’ telah berubah secara radikal sejak saat itu. Sebenarnya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka yang menyebut teori Marx itu ‘anti-ekologis’ sekarang menjadi minoritas di antara para sarjana dan aktivis Marxis yang serius. Perubahan signifikan ini terutama terjadi berkat dua Marxis Amerika. Setelah tahun 2000, para ‘ekososialis tahap kedua’ yang diwakili Paul Burkett (1999) dan Foster (2000) dengan meyakinkan menunjukkan melalui analisis cermat mereka terhadap teks-teks karya Marx dan Engels bahwa pemikiran ekologis para pendiri sosialisme ini telah secara serius memperhatikan isu-isu lingkungan, sehingga masih sangat relevan hari ini untuk memahami dan mengkritisi krisis ekologi masa kini sebagai manifestasi dari kontradiksi cara produksi kapitalis. Secara khusus, Foster dengan cermat menganalisis penelitian Marx di bidang ilmu alam dan mengungkapkan pentingnya konsep ‘metabolisme’ (*Stoffwechsel*) secara teori melalui penelaahan cermat atas edisi ketujuh *Agricultural Chemistry* karya Justus von Liebig. Penelaahan Foster menjelaskan bahwa Marx menganggap ‘retakan metabolik’ di bawah kapitalisme sebagai distorsi fatal dari hubungan antara manusia dan alam, bahkan menyoroti pentingnya strategi sosialis untuk memperbaiki retakan ini untuk mewujudkan produksi yang berkelanjutan di masyarakat masa depan. Ekologi diintegrasikan sebagai objek analisis penting bagi Marxisme.

2 Karakterisasi anti-ekologis dari Marxisme tradisional ini, bagaimanapun, tetap mengabaikan tradisi panjang kaum Marxis klasik yang sangat peduli dengan isu-isu lingkungan bahkan sebelum munculnya ekologi politik. Daftar tersebut harus mencakup Herbert Marcuse, Shigeto Tsuru, Barry Commoner, Paul Sweezy, István Mészáros (Lihat Foster dan Burkett, 2016).

Bahkan, konsep ‘metabolisme’ segera dianggap sebagai ‘bintang konseptual’, karena ia berjanji untuk mengatasi hubungan antagonis lama antara Merah dan Hijau dan memberikan studi lingkungan dengan landasan metodologis untuk analisis kritis dari isu-isu ekologi kontemporer (Fischer-Kowalski, 1997). Khususnya di AS, arus baru ‘ekososialis tahap ketiga’ muncul di luar lingkaran kecil kiri-jauh Marxisme klasik, dan terus menganalisis keterbatasan dari ‘keberlanjutan’ di bawah kapitalisme di berbagai bidang seperti pemanasan global, pertanian dan perikanan (Klein, 2014; Longo et al., 2015).

Kaum Marxis sekarang bersemangat untuk mengintegrasikan konsep baru Antroposen yang kini sudah menjadi bintang konseptual lain dalam studi lingkungan, dan mereka mempelajari dampak aktivitas produksi dan konsumsi manusia terhadap planet ini dari berbagai perspektif (Angus, 2016; Foster, 2016). Namun demikian, validitas akademis dari konsep Antroposen ini masih kontroversial, dan belum ada konsensus mengenai kapan sesungguhnya zaman geologi ini sebenarnya dimulai. Sebagai contoh, sementara Crutzen mendapati asal usul Antroposen dalam Revolusi Industri pada abad kedelapan belas sebagai awal dari melejitnya kadar karbon dioksida di atmosfer, ada pula yang melihat zaman ini dimulai sejak ‘penggunaan api’ sebagai pemicu penggunaan bahan bakar fosil, sehingga menjadi penyebab utama munculnya hubungan antagonis antara manusia dan alam (Raupach & Canadell, 2010). Ian Angus (2016) berpendapat bahwa Antroposen dimulai dengan ‘Percepatan Besar’ sekitar tahun 1950.

Ada pula kritik terhadap konsep Antroposen di pihak Marxis: Andreas Malm, penulis *Fossil Capital*, menunjuk pada kemungkinan adanya kekeliruan ‘fetisisme’ dalam konsep itu. Menurut Malm, mengidentifikasi penyebab puncak bencana lingkungan saat ini dalam ‘penggunaan api’ mereduksi masalah pada aktivitas ‘esensial’ manusia tertentu sehingga mengabstraksikannya dari hubungan sosial dan material. Akibatnya, hal itu menghalangi kita untuk menyelidiki krisis ekologi dalam kaitannya dengan sistem sosial modern dan hubungan spesifiknya dengan kekuasaan, kapital, hegemoni, dan teknologi. Lebih jauh, diskusi tentang kemanusiaan yang melekat dalam istilah ‘Antroposen’ menabiri ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan tek-

nologi sebagaimana terlihat dalam penggunaan batu bara dan minyak modern. Ketimpangan geografis dan politik dalam emisi gas rumah kaca dengan jelas menunjukkan bahwa manusia sama sekali tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim global saat ini. Narasi Antroposen ‘mendenaturalisasi’ krisis ekologi saat ini hanya untuk ‘menaturalisasi kembali’ hal tersebut sebagai esensi manusia, sehingga tidak mampu secara kritis menelisik hubungan sosial yang dibentuk secara kapitalistik sebagai penyebab spesifik historis krisis lingkungan saat ini (Malm & Hornborg, 2014).

Tanpa mempertanyakan cara produksi yang ada dan teknologi spesifiknya, para pendukung Antroposen mencita-citakan pengembangan teknologi lebih lanjut dan ‘dominasi atas alam’ sebagai solusi untuk bencana ekologis yang menjelang. Misalnya, Crutzen mengusulkan solusi *geoengineering* menebar aerosol sulfat di atmosfer untuk meredupkan cahaya matahari dan mendinginkan planet (Crutzen, 2006). Diskusi ilmiah semacam itu sering kali hampa pertimbangan etis dan normatif soal apakah segelintir elit di negara maju boleh mengambil keputusan politik yang akan berdampak signifikan terhadap seluruh planet, sementara orang-orang yang lebih mungkin mengalami konsekuensi negatif malah dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan itu. Menentang garis argumen Antroposen, Malm dengan tepat menekankan pentingnya menelisik bagaimana kapitalisme mengembangkan bentuk teknologi tertentu, dan bagaimana ia menata ulang dan bahkan menghancurkan hubungan metabolik antara manusia dan alam melalui apropriasi ketimpangan ekonomi, politik, dan geografis. Dalam nada ini, Malm mengusulkan suatu zaman geologi alternatif ‘Kapitalosen’, alih-alih Antroposen, untuk menyoroti ‘geologi bukan akibat umat manusia, tetapi akibat akumulasi modal.... [W]aktu kapitalis, waktu biokimia, waktu meteorologi, waktu geologi sedang diartikulasikan dalam keseluruhan yang baru, ditentukan secara mutakhir oleh usia modal’ (Malm, 2014). Maksudnya adalah bahwa permukaan seluruh planet telah tertutupi oleh jejak kapital, dan logika kapitallah yang perlu dianalisis sebagai prinsip pengorganisasian seluruh planet selama 200 tahun terakhir.

Terinspirasi oleh argumen Malm, Jason W. Moore, pendukung analisis ekologi dunia, juga mengadopsi konsep Kapitalosen, menolak pemahaman ahistoris tentang hubungan manusia-alam sebagaimana diajukan oleh narasi Antroposen. Namun patut dicatat bahwa Moore mengkritik 'pembalasan alam' Engels pada manusia dari perspektif Kapitalosen. Menurutnya, keterbatasan teoretis Engels terlihat dalam perlakuannya terhadap alam yang 'statis' dan 'ahistoris'. Akibatnya, konseptualisasi dia terjangkit 'fetisisasi batas-batas alam' (Moore, 2015). Menurut Moore, ini adalah konsekuensi yang tak terhindarkan karena kritik ekologis Engels terjebak dalam 'dualisme' antara 'Masyarakat' dan 'Alam', dua entitas independen, sehingga analisisnya hanya dapat menegaskan fakta nyata bahwa kapitalisme memang menghancurkan alam. Moore berpendapat bahwa kesimpulan Engels benar, tetapi pada saat yang sama agak dangkal. Yang lebih penting untuk analisis kritis Kapitalosen adalah menganalisis proses historis dunia tentang bagaimana manusia dan alam terus-menerus 'diproduksi bersama' dalam jejaring kehidupan.

Kritik Moore, bagaimanapun, tidak selesai hanya dengan menolak ide Engels. Engels sudah pernah dikritik oleh para ekososialis tahap pertama. Lawan utama Moore dewasa ini sebenarnya adalah Foster dan konsep keretakan metaboliknya. Penolakan ini mengejutkan, mengingat popularitas konsep ini di kalangan Marxis serta fakta bahwa Moore menggunakan pendekatan Foster untuk memahami hubungan historis yang unik antara manusia dan alam di bawah kapitalisme (Moore, 2000). Meskipun demikian, dalam karya-karya terbarunya seperti *Capitalism in the Web of Life*, ia mengubah sikapnya terhadap teori keretakan metabolik dengan berargumen bahwa 'Dualisme Cartesian' dari pendekatan keretakan ini hanya berkaitan dengan 'konsekuensi': Konsep keretakan metabolik mewakili tahap tertinggi 'Aritmetika Hijau': Masyarakat plus Alam sama dengan Krisis (Moore, 2015). Menurut skema ini, agensi aktif manusia menghasilkan krisis ekologis dengan bekerja di atas alam statis dan pasif, namun tidak dapat secara memadai menganalisis perkembangan kapitalisme historis 'melalui' alam, yaitu 'produksi bersama' dialektis masyarakat dan alam. Meskipun masalah alam telah ditambahkan ke daftar panjang agenda Marxis, Moore percaya bahwa

itu saja tidak cukup. Dia malah mengusulkan paradigma baru *'world ecology'* (ekologi-dunia) untuk secara radikal memikirkan kembali krisis *'modern-in-nature'* (peradaban modern-dalam-alam) tanpa dualisme.

Hal yang membedakan kritik Moore terhadap pendekatan keretakan metabolik dari kritik ekososialis tahap pertama cukup penting dicatat: ia mengkritik Foster dan Engels, bukan Marx. Sebaliknya, ia tampaknya membela interpretasinya sendiri sebagai penerus sejati 'teori nilai' dan 'filsafat relasi internal' Marx, dengan mengklaim bahwa hanya dengan menggabungkan kritiknya terhadap ekonomi politik dengan analisis ekologisnya, potensi teori Marx dalam Kapitalosien dapat berkembang sepenuhnya (Moore, 2015). Sebaliknya, interpretasi Foster masuk ke dalam 'retakan epistemik' antara 'ekonomi politik' yang didasarkan pada 'teori modal monopoli' (Paul Sweezy dan Paul A. Baran) dan 'ekologi' yang didasarkan pada 'teori metabolisme' (György Lukács dan István Mészáros). Seperti yang terlihat jelas dari kritik Moore terhadap Foster, perdebatan tentang apakah 'ekologi Marx' itu ada atau tidak sudah selesai. Kontroversi Marxis kontemporer lebih berpusat pada pertanyaan tentang metode yang memadai untuk mengonseptualisasikan hubungan antara manusia dan alam dan kontradiksinya di Antroposen.

TEORI NILAI EKOLOGIS

Inti dari teori nilai ekologis Moore adalah 'hukum kecenderungan penurunan tingkat keuntungan' Marx. Tingkat keuntungan didefinisikan sebagai pembagian nilai lebih (s) dengan jumlah kapital konstan (c) dan variabel (v): Marx pernah berargumen bahwa tingkat keuntungan cenderung akan turun dengan perkembangan kapitalisme karena komposisi organik dari kapital (c/v) meningkat lebih cepat daripada tingkat nilai lebih (s/v), yang menyebabkan kesulitan besar bagi akumulasi kapital.

Walau jelas sudah tercukupi, kapitalis tetap berusaha untuk mempertahankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan terus mendapatkan keuntungan itu dalam jumlah yang lebih besar. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan jumlah nilai lebih dengan memperpanjang hari kerja (yaitu, produksi nilai lebih absolut) dan dengan mengintensifkan kerja. Satu lagi adalah dengan memini-

malkan peningkatan modal konstan dan variabel sejauh mungkin. Untuk menanggulangi penurunan tingkat keuntungan karena komposisi organik kapital yang meningkat, literatur sebelumnya memperhatikan ekonomi dan semakin murah nya 'kapital tetap', terutama mesin-mesin yang diperkenalkan berkat perkembangan tenaga-tenaga produktif. Sebaliknya, Moore fokus pada diskusi Marx tentang ekonomi 'modal yang beredar'. Dia berpendapat bahwa penyelamat kapitalisme adalah pasokan berlimpah dan murah dari apa yang disebutnya sebagai 'Empat Murah', yaitu, 'tenaga kerja', 'pangan', 'energi', dan 'bahan mentah'. Moore menekankan betapa pentingnya mereka bagi kapitalisme: "Hukum nilai dalam kapitalisme adalah hukum Alam Murah (*cheap nature*)" (Moore, 2015).

Bukan suatu kebetulan bahwa Moore memasukkan 'tenaga kerja' dalam 'Alam Murah'. Kapital, yang mengapropriasi berbagai kekuatan alam tanpa membayarnya, meningkatkan daya-daya produktif dan meraih nilai lebih tambahan. Tetapi maksud utama Moore di sini adalah bahwa 'Alam Murah' ini mencakup sejumlah besar manusia seperti orang miskin, perempuan, orang kulit berwarna, dan budak. Kapital tidak hanya mengaproproasi sumber daya alam, tetapi juga membentuk dan benar-benar memanfaatkan hierarki gender, kekuasaan kolonial yang ganas, dan dominasi teknologi atas alam untuk mengamankan keuntungan dan untuk memperluas cara produksi kapitalis. Moore berpendapat bahwa kapitalisme berkembang tidak hanya melalui eksploitasi pekerja (laki-laki dan kulit putih). Justru, menurutnya, ia amat tergantung pada apropriasi 'kerja tak berbayar' dari Empat Murah, termasuk tenaga kerja (Moore, 2015). Dengan demikian, pemisahan rapi antara 'Masyarakat' dan 'Alam' menjadi gagal. Moore menolak pemahaman dualis yang tidak memadai bahwa kapitalisme bekerja di atas alam sebagai medium pasif lalu menghancurkannya. Justru, dia mengusulkan untuk menganalisis bagaimana kapitalisme berkembang dan bekerja 'melalui' alam, dan bagaimana ia tidak hanya memproduksi bersama alam, tetapi juga diproduksi bersama dengan alam (Moore, 2015).

Kapitalisme mengubah dan menata ulang seluruh dunia secara radikal tanpa menyisakan ruang di planet ini yang belum terjamah dan menciptakan lingkungan yang paling mendukung valorisasi dirinya

yang tanpa batas, yang kemudian menghasilkan Antroposen. Namun, proyek kapitalisme sebagai sistem sejarah terbentur berbagai kesulitan dalam kenyataan: sumber daya alam bisa habis, dan pasokan bahan mentah bisa tiba-tiba berkurang di musim yang buruk, atau stabilitas politik di koloni bisa hilang. Menghadapi momen-momen krisis akumulasi yang akut ini, kapital, dalam upaya untuk mengatasinya, mengembangkan nilai guna baru, menemukan bahan-bahan pengganti dan menciptakan teknologi baru untuk mengeksploitasi sumber daya alam di tempat-tempat yang masih belum dapat diakses. Marx menulis di *Grundrisse* bahwa kecenderungan kapital ini menghasilkan 'sistem utilitas umum' dalam skala global, menciptakan 'apropriasi universal alam serta ikatan sosial itu sendiri oleh anggota masyarakat':

Oleh karena itu, eksplorasi semua alam untuk menemukan sifat-sifat baru yang berguna dalam berbagai hal; pertukaran universal produk dari semua iklim dan tanah yang asing; penyajian baru (yang artifisial) dari objek-objek alami, yang dengannya objek-objek tersebut diberi nilai guna baru. Eksplorasi bumi ke segala arah, untuk menemukan hal-hal baru yang berguna serta sifat-sifat baru yang berguna dari hal-hal yang lama; seperti sifat-sifat baru dari hal lama itu sebagai bahan baku dll.; dan karenanya, pengembangan ilmu-ilmu alam ke titik puncak mereka. (Marx, 1993)

Namun, bahkan 'pengaruh besar peradaban kapital' ini pun tidak bertahan selamanya. Kapital, dengan dorongan tak terbelenggunya untuk meraih nilai-lebih yang lebih besar, meningkatkan daya-daya produktif dan memperluas skala produksi, tetapi alam tidak dapat terus menerus menyediakan pasokannya secepat tuntutan kapital.³ Waktu yang diperlukan untuk produksi dan reproduksi sangat berbeda antara kapital dan alam, dan komposisi organik kapital yang lebih tinggi cenderung menyebabkan 'kekurangan produksi' bahan mentah dalam jangka panjang. Entropi meningkat, energi yang tersedia berkurang, dan sumber daya alam habis. Tidak peduli seberapa keras modal berusaha untuk menemukan batas baru alam, tidak ada ruang tanpa batas di bumi. Maka terjadilah 'kecenderungan penurunan surplus ekologis'

³ Marx berpendapat bahwa 'kemungkinan besar produktivitas dalam produksi bahan mentah akan cenderung tidak meningkat secepat produktivitas pada umumnya (dan, dengan demikian, kebutuhan bahan baku yang meningkat).' (Lebowitz, 2005)

(Moore, 2015). Akibatnya, apropriasi pekerjaan tak berbayar Alam Murah menjadi semakin sulit, dan 'akhir Alam Murah' membuat tingkat keuntungan turun. Kapital bukanlah suatu gerakan nilai yang abstrak (M-C-M'); ketergantungannya pada Sifat Murah terbukti amat menentukan bagi perkembangan kapitalisme.

Moore menunjukkan bahwa akumulasi kapital bergantung tidak hanya pada eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga pada serangkaian faktor material lainnya, paling tidak pada fakta bahwa kapital dan alam memiliki hubungan produksi bersama yang tak terpisahkan. Pemahaman ini tentu membantu untuk membantah kritik stereotipikal teori Marx sebagai determinisme ekonomi. Belakangan ini, Nancy Fraser, yang secara kritis merefleksikan afinitas feminisme dan neoliberalisme baru-baru ini, menganjurkan perlunya kritik 'multi-untai' yang memperhitungkan keterkaitan kompleks antara modal, gender, ekologi, dan negara (Fraser, 2014). Dalam nada ini, dia berpendapat bahwa Marx tidak memberikan perhatian yang cukup pada isu-isu seperti reproduksi sosial dan perlindungan lingkungan karena lebih peduli pada eksploitasi pekerja dan peluang perjuangan kelas. Fraser menganggap perlu untuk melengkapi kritik Marx terhadap kapitalisme dengan mengungkapkan 'kondisi latar kemungkinan' bagi keberadaan kapital (Fraser, 2014). Menurut Fraser, karena kapital tidak dapat memvalorisasi dirinya dalam realitas tanpa reproduksi sosial, sifat eksternal, dan stabilitas politik—yang agaknya diterima begitu saja oleh Marx—refleksi kritis hari ini tentang kapitalisme, yang sesuai dengan 'pandangan kapitalisme lebih luas', harus mencakup lingkup-lingkup itu. Namun, dia hanya menyandingkan lingkup-lingkup itu tanpa menjelaskan bagaimana mereka sebenarnya berhubungan satu sama lain dan bagaimana mereka membentuk totalitas di bawah kapitalisme dengan cara yang multi-untai. Fraser hanya menambahkan objek-objek analisis baru ke teori kritis tanpa berkontribusi pada pemahaman tentang produksi bersama mereka dalam kapitalisme. Kritik 'aditif' Fraser—sebut saja 'Aritmatika Kiri'—tidak dapat menjelaskan logika spesifik pengorganisasian lingkup-lingkup multi-untai dalam moda produksi kapitalis.

Terlepas dari kritik Fraser, para Marxis perlu mengembangkan 'kritik multi-untai' kapitalisme berdasarkan teori nilai. Teori nilai Marx

bukanlah alat teoretis untuk mengungkap eksploitasi pekerja oleh kapitalis. Sebaliknya, ia menyediakan metode untuk menganalisis bagaimana kapital, sesuai dengan logika swa-valorisasinya, mereorganisasi dan mentransformasikan berbagai lingkup seperti keluarga, alam, negara, dan elemen-elemen alam yang sesuai sebagai 'kekuatan alami kapital yang bebas' (Marx, 2015).

Lebih jauh lagi, meskipun 'apropriasi' kekayaan material di era neoliberalisme sekarang sering dianalisis sebagai 'akumulasi dengan perampasan' yang dipaksakan oleh kekerasan negara (dan kekerasan institusional lainnya), yang mungkin dapat dianggap sebagai reinterpretasi teori 'akumulasi primitif' Marx (Harvey, 2009)⁴, kita perlu memeriksa appropriasi ini dengan saksama sebagai manifestasi dari kekuatan kapital yang tereifikasi karena ini adalah 'proses eksploitasi kapitalis yang normal' (Brenner, 2006). Sebagai contoh, eksploitasi pekerjaan rumah dan pemborosan sumber daya alam memberikan landasan material yang sangat diperlukan untuk produksi kapitalis, namun ia tidak memerlukan biaya tambahan. 'Kekuatan alam bebas' ini memiliki makna tunggal bagi kapital, seperti yang dibahas Moore sebagai 'pekerjaan tak dibayar' dari alam. Kekuatan alam masuk ke dalam proses kerja dengan sejumlah efek positif terhadap kapital, tetapi tidak memasuki proses valorisasi. Jadi, meskipun tidak menghasilkan nilai, ia memiliki utilitas khusus yang unik untuk produksi nilai karena peningkatan kekuatan produktifnya dan pengurangan biaya produksinya menghasilkan laba ekstra. Kapital, yang mencari peluang untuk merampas kekuatan alam ini, secara tuntas menata ulang bidang-bidang reproduksi sosial dan alam—bahkan kadang disertai kekerasan negara.

Fraser salah ketika dia mengatakan bahwa Marx mengabaikan kondisi latar kapitalisme dan bahwa dia terutama peduli dengan eksploitasi pekerja di pabrik. Marx sangat tertarik pada lingkup-lingkup itu karena kapital dalam banyak hal berkelindan dengan reproduksi sosial dan sumber daya alam serta dengan perkembangan teknologi untuk memanfaatkannya. Inilah sebabnya mengapa klaim utama ekososialis, yaitu bahwa sistem kapitalis akan menghancurkan lingkungan

⁴ Fraser (2014, 60) juga secara tegas mengacu pada konsep Harvey tentang 'akumulasi dengan perampasan'

karena ketidakpeduliannya terhadap alam, juga menyingkap sebuah pemahaman yang kurang memadai tentang ekologi Marx. Sebaliknya, modal memiliki kepentingan yang besar di alam sampai batas tertentu, tetapi justru kepentingan ini yang ternyata cukup problematis. Karena pengembangan dan reorganisasi alam oleh kapital tidak didasarkan pada prinsip produksi yang berkelanjutan, tetapi pada logika nilai yang diabstraksi dari aspek material produksi, revolusi teknologi yang gencar dalam proses produksi hanya memperburuk ketidakharmonisan dalam interaksi metabolik antara manusia dan alam: 'Karenanya, produksi kapitalis hanya mengembangkan teknik dan taraf kombinasi dari proses-proses sosial produksi dengan, secara simultan, merusak sumber-sumber asli dari semua kekayaan—tanah dan pekerja' (Marx, 1976).

Teori nilai Marx tidak boleh dipahami terlalu sempit, seolah-olah hanya sebatas perjuangan kelas. Teori nilai bukan hanya alat untuk mengungkapkan eksploitasi pekerja, tetapi juga untuk memahami 'metabolisme' yang dibentuk secara kapitalistik antara manusia dan alam. Dengan kata lain, ia memberi kita landasan metodologis untuk menganalisis bagaimana penetrasi kekuatan kapital yang tereifikasi ke dalam berbagai bidang mengubah dan mengacaukan masyarakat dan alam. Kritik Fraser mengabaikan fakta sederhana bahwa sudah jelas bagi Marx bahwa modal bergantung pada 'kondisi latar kemungkinan' gender, alam, dan negara. Ketika dia mengembangkan teorinya tentang nilai, Marx sebenarnya bermaksud menganalisis proses akumulasi kapital di mana kapital secara radikal mengubah dimensi material dari lingkup-lingkup ini dan akhirnya merusak kondisi material dari produksi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, Marx tidak semata-mata menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja, tetapi lebih pada kontradiksi antara nilai dan kondisi-kondisi yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, ia memberikan kerangka teoretis untuk memahami bagaimana elemen yang dikecualikan dari produksi nilai digunakan untuk memaksimalkan keuntungan.

Seperti yang terlihat di atas, Moore juga menekankan pentingnya teori nilai Marx untuk memperluas cakupan kritiknya terhadap ekonomi politik. Ini tentu saja langkah maju yang penting. Namun dia bahkan melangkah lebih jauh melampaui analisis ekologis Foster yang tidak

cukup memperhitungkan teori nilai. Untuk menyoroiti keunikan kontribusinya sendiri, Moore menggarisbawahi perbedaan antara ‘dualisme Cartesian’ dan ‘monisme pasca-Cartesian’, dengan alasan bahwa hanya yang terakhir ini yang merupakan penafsiran yang benar dari ekologi Marx. Namun demikian, aneh bahwa Moore tidak menyebutkan konsep ‘keretakan’ Marx sendiri ketika dia, misalnya, menulis: “Daripada mengarang jurang Cartesian, pendekatan *metabolisme* [Foster] telah memperkuatnya. ‘Proses *metabolisme sosial* yang *interdependen*’ Marx menjadi ‘*metabolisme alam dan masyarakat*’. *Metabolisme* sebagai ‘keretakan’ menjadi metafora pemisahan, didasarkan pada aliran material antara Alam dan Masyarakat” (Moore, 2015). ‘*Metabolisme alam dan masyarakat*’ adalah rumusan Foster, sehingga terkesan seolah-olah Foster menghasilkan pemahaman dualis tentang *metabolisme* yang mendukung konsep ‘keretakan’ metabolik, yang mendistorsi ekspresi asli Marx dan pasca-Cartesian tentang ‘*proses metabolisme sosial yang interdependen*’. Namun, bagian yang dirujuk Moore menunjukkan bahwa Marx sendiri sudah memikirkan konsep keretakan:

Kepemilikan tanah skala besar, di sisi lain, mengurangi populasi pertanian ke tingkat minimum yang terus menurun dan membenturkannya dengan populasi industri yang terus tumbuh yang berdesakan di kota-kota besar; dengan cara ini, ia menghasilkan kondisi yang memicu keretakan yang tidak dapat diperbaiki dalam proses yang interdependen antara *metabolisme sosial* dan *metabolisme alami* yang ditentukan oleh hukum alam tanah.⁵

Selain itu, bagian ini menunjukkan bahwa Moore telah secara sewenang-wenang memotong kalimat asli Marx demi pemahaman monisnya tentang kapitalisme dalam jaring kehidupan, meskipun Marx secara eksplisit menyoroiti ‘keretakan yang tidak dapat diperbaiki dalam proses yang interdependen antara *metabolisme sosial* dan *metabolisme alami*’. Apakah Moore tidak sengaja juga telah terjerumus ke dalam ‘jurang Cartesian’?

⁵ Engels memodifikasi bagian ini. Terjemahan baru manuskrip ekonomi Marx tahun 1864/65 sayangnya melewatkan modifikasi ini dan hanya mereproduksi terjemahan lama: “Dengan cara ini ia menghasilkan kondisi yang memicu keretakan yang tidak dapat diperbaiki dalam proses *metabolisme sosial* yang saling bergantung, *metabolisme* yang ditentukan oleh hukum alam hidup itu sendiri” (Marx, 2015).

DUALISME 'BENTUK' DAN 'MATERIAL'

Moore mengkritik pemisahan antara 'Masyarakat' dan 'Alam' sebagai 'jurang Cartesian' dan pada saat yang sama mengajukan pemahaman monis baru tentang hubungan manusia-alam, 'oikeios'. Tetapi kritik epistemologis semacam ini mengingatkan kita pada tesis terkenal Marx: 'Para filsuf hanya menafsir dunia, dalam berbagai cara; intinya adalah untuk mengubahnya' (Marx & Engels, 1987). Dengan demikian Marx menolak filosofi esensi Feuerbach (Wesensphilosophie) yang hendak mencerahkan massa dengan menunjukkan bahwa Tuhan, si mahakuasa yang terasing, tidak lain adalah proyeksi esensi manusia yang tak terbatas sebagai 'makhluk-spesies'. Marx berargumentasi bahwa tidak cukup untuk mengungkapkan esensi Kekristenan, dan kemudian mengajukan pertanyaan secara 'materialis', yaitu, mengapa dan bagaimana orang menerima ilusi seperti itu dan itu benar-benar mendominasi kehidupan orang (Marx, 1976).

Demikian pula, tidak cukup mengganti dualisme masyarakat dan alam dengan monisme. Marx menyadari perlunya menjelaskan di bawah hubungan sosial mana dualisme ini memiliki kekuatan nyata. Dengan kata lain, ketika Marx menggambarannya dengan cara dualis, itu bukan karena dia tidak sengaja terjerumus ke dalam dualisme Cartesian, melainkan karena hubungan sosial mengerahkan kekuatan sosial yang unik dalam kenyataan, yang telah menjadi objek penyelidikan ilmiah yang independen. Jika seseorang ingin mengklaim interpretasi yang 'benar' dari teori nilai Marx, maka ia harus memperlakukan pemisahan Marx yang disengaja antara masyarakat dan alam di bawah kapitalisme dengan lebih serius. Dalam konteks ini, patut dicatat bahwa setelah berpisah dari filsafat Feuerbach, Marx memperjelas dalam *The German Ideology* bahwa analisis materialis ini perlu dimulai dari masalah 'kerja' sebagai tindakan produksi manusia yang unik: 'Semua tulisan sejarah harus berangkat dari dasar-dasar alami ini dan modifikasinya dalam perjalanan sejarah melalui tindakan manusia.... [Manusia] sendiri mulai membedakan diri dari hewan segera setelah mereka mulai menghasilkan alat penghidupan mereka, sebuah langkah yang dikondisikan oleh organisasi fisik mereka' (Marx & Engels, 1987).

Marx kemudian mendefinisikan kerja dalam Capital sebagai mediasi metabolisme antara manusia dan alam: “Kerja adalah, pertama-tama, sebuah proses antara manusia dan alam, sebuah proses di mana manusia, melalui tindakannya sendiri, menengahi, mengatur dan mengontrol metabolisme. antara dirinya dan alam” (Marx, 1976). Manusia berulang kali bekerja di alam, memproduksi dan mengonsumsi untuk hidup di planet ini. Tentu saja, hewan lain seperti lebah dan berang-berang juga bekerja di alam dan melakukan metabolisme mereka di alam. Ini adalah fakta fisiologis sederhana. Namun, kerja manusia berbeda karena manusia berelasi dengan alam secara sadar dan teleologis berhubungan, mengubahnya, dan terus-menerus menemukan alat produksi baru untuk memuaskan keinginan yang berkembang. Kegiatan mereka, tentu saja, tidak sepenuhnya sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh berbagai kondisi material dari alam eksternal. Marx pernah mengklaim bahwa kerja tidak dapat direalisasikan tanpa bantuan alam: “Oleh karena itu, kerja bukan satu-satunya sumber kekayaan materi, yaitu nilai guna yang dihasilkannya. Seperti yang dikatakan William Petty, tenaga kerja adalah bapak dari kekayaan materi, bumi adalah ibunya” (Marx, 1976). Karena kendala ini, pengetahuan dan aktivitas manusia selalu sudah dimediasi oleh masyarakat dan alam, dan dalam pengertian ini ‘diproduksi bersama’ seperti yang dikatakan Moore. Ini adalah kondisi kelangsungan hidup transhistoris yang terus berlaku selama manusia hidup dan bekerja di bumi. Konsep ‘metabolisme antara manusia dan alam’ tidak memisahkan manusia dan alam sebagai entitas yang tidak relevan, tetapi penting untuk mengekspresikan hubungan integral dan monistik mereka.

Akan tetapi, Marx menunjukkan bahwa cara ‘memperlakukan prasyarat umum dari segala produksi’ ini telah dihantam rata menjadi ‘tautologi datar’, yang hanya ‘menunjukkan tidak lebih dari momen-momen esensial dari segala produksi’ (Marx, 1993). Jelas, manusia memproduksi sebagai bagian dari alam dan aktivitasnya bertaut dengan alam luar-manusia. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana metabolisme antara manusia dan alam ini bekerja di bawah moda produksi kapitalis. Itu tergantung pada organisasi sosial tenaga kerja, dan Marx berpendapat bahwa perlu untuk memahami metabolisme antara

manusia dan alam dalam kekhususan historisnya di bawah kondisi masyarakat kapitalis. Inilah sebabnya mengapa terlepas dari pandangan monistik tentang metabolisme itu, Marx juga menekankan pentingnya memisahkan 'determinasi bentuk ekonomi' (*ökonomische Formbestimmung*) sebagai langkah yang diperlukan untuk memahami kekhususan historis kapitalisme (Heinrich, 2012).

Yang menjadi ciri dari masyarakat yang berbasis pada produksi komoditas adalah bahwa pembagian kerja sosial dilakukan oleh individu-individu yang terisolasi yang melakukan kerja mereka sebagai 'kerja swasta', yang berarti bahwa produk-produk yang diperlukan untuk reproduksi sosial bukanlah hasil dari pengaturan kolektif tertentu yang terjadi sebelum tindakan produksi (Marx, 1976). Buruh dari produsen swasta tidak secara langsung memiliki karakter sosial apa pun, sehingga mereka secara tidak sadar memberikan properti 'murni sosial' dari 'nilai' pada produk mereka sendiri dan menukarnya sebagai komoditas. Beginilah mereka bisa mengatur alokasi sejumlah kerja sosial dan distribusi produk di antara anggota masyarakat. Meskipun manusia seperti makhluk lain melakukan interaksi metabolik fisiologis dengan alam, perilaku sosial yang niscaya muncul di bawah produksi komoditas membentuk hubungan sosial yang unik dan memberikan nilai yang bersifat sosial murni pada produk yang tidak ada di alam. Sifat sosial dari nilai ini mengembangkan 'bahasa komoditas' dan menjadi semakin independen sebagai 'uang' dan 'kapital', sehingga ia mulai secara radikal mengubah metabolisme universal alam dengan cara yang unik secara historis.⁶

Pendekatan 'dualis' Marx secara ketat memisahkan 'determinasi bentuk' sosial murni dari pengembangan material mereka untuk menyingkap metabolisme kapitalis antara manusia dan alam. Pemisahan ini adalah kunci untuk metode kritiknya terhadap ekonomi politik. Ia bertujuan untuk menyingkap logika bentuk-bentuk ekonomi yang muncul dari perilaku manusia secara independen dari keinginan dan kehendak, tetapi meraih suatu kekuatan independen atas manusia. Ia juga menje-

⁶ Marx 1976, 144. Meskipun 'hubungan sosial' berulang kali disorot sebagai istilah kunci untuk analisis Marx, penjelasannya tentang bagaimana 'hubungan sosial' ini terbentuk (yaitu, melalui 'kerja swasta') terlalu sering diabaikan dan direduksi menjadi 'filsafat hubungan internal' yang abstrak.

laskan bagaimana bentuk-bentuk ekonomi itu mengubah dunia material (kesadaran dan keinginan manusia, norma dan institusi sosial, dan alam) sebagai pengemban konkretnya. Pertama-tama, perlu untuk mendeduksi bentuk-bentuk ekonomi dalam kemurniannya sebagai prinsip penataan dunia material. Jika tidak, tidak mungkin untuk memahami bagaimana sesungguhnya proses akumulasi kapitalis itu berkembang ‘melalui alam’. Dalam pengertian ini, meskipun metabolisme antara manusia dan alam bersifat monistik dari perspektif ‘materi’, kritik Marx, sebagai ‘metode’, adalah dualis karena bentuk-bentuk ekonomi bersifat independen dari dunia material. Dualisme metodologis ini mencerminkan dominasi sosial nyata yang dilakukan oleh kategori-kategori ekonomi abstrak.

Oleh karena itu, analisis Marx cukup konsisten. Setelah mengembangkan serangkaian kategori ekonomi sosial murni, ia menyelidiki bagaimana proses produksi material diserap dan ditundukkan demi keunggulan nilai. Karena cara produksi kapitalis meliputi segenap masyarakat dan logika formal nilai sangat mengubah metabolisme antara manusia dan alam melalui penyerapan yang nyata, hal itu pasti menghasilkan berbagai ketidakharmonisan dalam metabolisme itu:

[Produksi kapitalis] mengganggu interaksi metabolik antara manusia dan bumi, yaitu mencegah kembalinya ke tanah unsur-unsur penyusunnya yang dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk pangan dan pakaian; oleh karena itu ia menghalangi berjalannya kondisi alam yang kekal untuk kesuburan tanah yang langgeng. Dengan demikian, pada saat yang sama, ia menghancurkan kesehatan fisik pekerja perkotaan, dan kehidupan intelektual pekerja perdesaan. (Marx, 1976).

Akibatnya, ‘keretakan yang tidak dapat diperbaiki’ muncul dalam metabolisme antara manusia dan alam. Seperti terlihat di atas, keretakan metabolik ini tercipta karena nilai sebagai objektivikasi kerja abstrak mengubah dan menata ulang seluruh proses produksi yang diabstraksikan dari elemen material kompleks dalam hubungan antara manusia dan alam: bentuk-bentuk ekonomi memodifikasi dunia material demi valorisasi kapital tanpa mempertimbangkan batas-batas alam. Dengan begini, ‘keretakan’ bukanlah ‘metafora’ seperti yang dikatakan Moore. Ia juga tidak ada hubungannya dengan ‘jurang Cartesian’ tanpa adanya

‘teori nilai’. Sebaliknya, kritik ekologis Marx terhadap keretakan metabolik dapat disimpulkan dari metode dan teori nilainya.

Karena Moore, terlepas dari kritiknya terhadap konsep keretakan Foster, gagal menangkap signifikansi dari ‘determinasi bentuk ekonomi’ dalam metode Marx, dia tidak sepenuhnya berhasil menghubungkan ekologi Marx dengan teori nilainya, tetapi malah mengabaikan konsep ‘keretakan’ Marx sendiri karena itu menyiratkan dualisme. Namun, tidak ada alasan untuk takut pada dualisme dalam pengertian Marx. Dia lebih menganalisis bagaimana hubungan monistik metabolisme manusia-alam dimodifikasi oleh bentuk-bentuk sosial murni yang mengandung ‘tak satu pun atom materi’ di bawah hubungan sosial tertentu, dan bagaimana formasi sosial dimediasi oleh manusia sebagai personifikasi komoditas, uang, dan kapital menghasilkan serangkaian ketidakharmonisan dan kontradiksi dalam kenyataan. Dualisme Marx bukanlah dualisme Cartesian yang didasarkan pada pemilahan biner modern ‘Masyarakat’ dan ‘Alam’, melainkan suatu kritik terhadap reifikasi dalam masyarakat modern.

Masalah Moore paling jelas terlihat dalam perlakuannya terhadap kategori kerja, yang tidak memainkan peran nyata dalam rekonseptualisasi ‘retakan metabolik’ menjadi ‘pergeseran metabolik’ dalam ‘metabolisme tunggal manusia-dalam-alam’ (Moore, 2015). Sementara tenaga kerja cukup penting bagi teori metabolisme Marx, faktor penentu bagi perkembangan kapitalisme, menurut skema Moore, bukanlah eksploitasi tenaga kerja yang menghasilkan nilai tetapi apropriasi ‘kerja’ alam yang tidak dibayar. Komoditas tenaga kerja hanya disebut sebagai salah satu dari ‘Empat Murah’, yang dihitung sebagai biaya produksi. Akibatnya, penentuan bentuk kapitalis kerja sebagai ‘kerja swasta’ dan ‘kerja upahan’ tidak dapat dipahami. Apa konsekuensi teoretis yang timbul dari pengabaian kerja ini bagi projek Moore?

KRISIS EKONOMI DAN KRISIS EKOLOGI

Analisis Marx tentang sistem sosial, berbeda dengan analisis Moore, dimulai dengan individu yang bekerja dan, yang paling penting, keterasingan mereka dari alam karena hancurnya ‘kesatuan asli’ antara manusia dan bumi:

Bukan kesatuan umat manusia yang hidup dan aktif dengan kondisi alami, anorganik dari pertukaran metabolisme mereka dengan alam, dan karenanya apropriasi alam mereka, yang memerlukan penjelasan atau merupakan hasil dari proses sejarah, melainkan pemisahan antara kondisi anorganik ini. tentang keberadaan manusia dan keberadaan aktif ini, suatu pemisahan yang sepenuhnya diajukan hanya dalam hubungan kerja upahan dan kapital. (Marx, 1993)

‘Pemisahan’ kerja dari alam adalah objek ekonomi politik bukan hanya karena ia mengungkapkan kekhususan cara produksi kapitalis, tetapi juga karena ia memiliki konsekuensi praktis yang serius pada metabolisme antara manusia dan alam: Pengurusan tenaga kerja dan perampokan sumber daya alam.

Pertanyaannya adalah apakah cukup untuk menganalisis proses ini sebagai krisis ekonomi. Moore percaya bahwa karakter destruktif kapital menghabiskan Empat Murah dan mengakibatkan krisis akumulasi kapital. Jika kita menganggap serius ‘elastisitas modal’ yang mencengangkan ini (Akashi, 2016), kenaikan harga makanan dan minyak saja mungkin tidak akan menghasilkan krisis ekonomi serius yang akan mengancam kapitalisme runtuh.

Jika kita mengingat masalah pengurusan tenaga-kerja dalam diskusi Marx tentang produksi nilai-lebih absolut, pembatasan waktu kerja oleh peraturan negara telah memicu perubahan teknologi untuk memproduksi nilai-lebih relatif. Karena kemajuan teknologi ini dimediasi oleh logika valorisasi, ‘mesin dan industri skala besar’ hanya berakhir dengan kehancuran dan keterasingan yang lebih serius dari kehidupan dan alam pekerja. Dengan cara yang sama, upaya kapital untuk merampas berkah alam yang cuma-cuma—*fracking*⁷ dan *geoengineering* (perekayasaan kebumian, red) bisa menjadi contoh teknologi semacam itu—akan memungkinkan kapital untuk melanjutkan valorisasi dirinya, meski disertai bencana ekologis yang lebih serius. Modal mungkin menemukan peluang baru untuk investasi dalam bencana seperti itu juga (Burkett, 2005). Sejauh logika akumulasi kapital diasingkan dari kehi-

7 Fracking adalah suatu teknologi hidrolika patahan yang dilakukan melalui proses penambangan gas bumi dengan injeksi fluida tekanan tinggi secara horizontal ke lapisan batuan cebakan gas atau minyak. Media injeksi yang biasa digunakan adalah air, pasir atau butiran keramik khusus dan cairan kimia.

dupan manusia dan keberlanjutan ekosistem, sistem kapitalis mungkin akan terus ada meskipun semua batas-batas planet telah sepenuhnya ditaklukkan dan sebagian besar bumi sudah tidak cocok lagi untuk makhluk hidup. Dalam hal ini, tekanan pada tingkat keuntungan akibat meningkatnya biaya modal yang beredar tidak akan menghasilkan 'krisis zaman' dalam waktu dekat, seperti yang diasumsikan Moore (Moore, 2015). Pandangan tersebut terlalu optimis.

Sebaliknya, teori metabolisme Marx dalam *Capital* menunjuk pada kemungkinan krisis ekologis yang dapat mengancam umat manusia:

Industri skala besar dan pertanian yang dijalankan secara industrial berjalan beriringan. Jika mereka pada awalnya dibedakan oleh fakta bahwa yang pertama menghabiskan dan menghancurkan tenaga kerja dan dengan demikian kekuatan alami manusia, sedangkan yang terakhir melakukan hal yang sama pada kekuatan alami tanah, mereka terhubung dalam perjalanan perkembangan selanjutnya, karena sistem industri yang diterapkan pada pertanian juga melemahkan para pekerja di sana, sementara industri dan perdagangan berperan menyediakan sarana bagi pertanian untuk menguras tanah. (Marx, 2015)

Krisis yang digambarkan di sini bukanlah krisis ekonomi, melainkan krisis ekologi yang menunjukkan ketidakmungkinan interaksi metabolik yang berkelanjutan antara manusia dan alam (Foster & Burkett, 2016). Sebagai kontradiksi yang muncul dari ketidaksesuaian antara logika kapital dan logika dunia material, Marx hendak menganalisis tidak hanya akumulasi kapital yang semakin sulit tetapi juga gangguan serius dari metabolisme antara manusia dan alam. Ini jelas terlihat dari penelitian intensif Marx di bidang ilmu-ilmu alam. Dia membaca *Agricultural Chemistry* Liebig sudah pada tahun 1850-an dan 60-an, dan setelah publikasi *Capital* jilid 1 terus mempelajari isu-isu ekologi baru seperti deforestasi, pengurusan tambang, dan kepunahan spesies. Buku catatannya mendokumentasikan pendalaman minat ekologisnya bahkan melampaui kritik Liebig terhadap perampokan nutrisi mineral tanah (Saito, 2017).

Jika kita terus menunggu degradasi serius dari kondisi material untuk akumulasi kapital akibat berakhirnya Alam Murah, maka kita

akan terlambat untuk menyelamatkan planet ini dari bencana lingkungan. Misalnya, kita perlu mengurangi 40% hingga 70% gas rumah kaca pada tahun 2050 untuk menjaga pemanasan global di bawah 2°C pada 2100. Ketika batas ini dilanggar, berbagai efek mungkin bergabung, sehingga memperkuat dampaknya terhadap iklim global, sehingga suhu rata-rata dapat meningkat sebesar 4°C. Bahkan 2°C pun pasti akan menyebabkan perubahan negatif yang signifikan pada skala global, meskipun mungkin tidak pada kapitalisme itu sendiri: Ini “mewakili suatu ambang, bukan antara perubahan iklim yang dapat diterima dan yang berbahaya, melainkan antara perubahan iklim yang berbahaya dan ‘sangat’ berbahaya” (Anderson & Busur, 2011). Contoh ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara kondisi material untuk akumulasi kapital dan pemeliharaan ekosfer. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa keterlibatan sosial secara umum dengan isu-isu lingkungan tidak bisa berhasil tanpa secara fundamental mengubah relasi produksi kapitalis. Di sinilah letak kemungkinan kesatuan kritik Hijau terhadap perubahan lingkungan dan kritik Merah terhadap ekonomi politik sebagai landasan teoretis bagi perjuangan melawan kapitalisme.

Namun, ketika Moore menganalisis krisis umum hari ini, terutama dari perspektif modal, visi emansipasi masa depan ternyata berbeda dari visi Marx. Krisis ekonomi kapital, menurut teori sistem dunia Immanuel Wallerstein, berakar pada habisnya batas-batas alam yang tersedia untuk apropriasi gratis atau murah, sedangkan teorisi resistensi subjektif terhadap dominasi reifikasi tetap terpinggirkan. Sebaliknya, analisis Marx didasarkan pada perspektif ‘individu pekerja’. Ini tidak hanya menyingkap eksploitasi pekerja di pusat-pusat kapitalis, tetapi juga mencakup kemungkinan perlawanan di pinggiran kapitalisme. Orang-orang di sana tidak hanya tunduk pada eksploitasi sebagai ‘semi-proletariat’, tetapi juga berjuang melawannya. Karena kapital secara menyeluruh memodifikasi dan menghancurkan cara-cara interaksi metabolik tradisional antara manusia dan alam, ia akan selalu memprovokasi bentuk-bentuk keterasingan dan perlawanan baru. Buku-buku catatan Marx yang berkaitan dengan topik-topik seperti Pemberontakan Taiping, dominasi kolonial Inggris di Irlandia, Perang Sipil di AS, dan komune agraria Rusia, mendokumentasikan minatnya yang besar pada

kekerasan kapital dan penentangan orang-orang terhadapnya di pinggiran kapitalisme. Berkenaan dengan hal ini, David Norman Smith menulis:

Sekarang [Marx] perlu mengetahui secara konkret, dalam detail budaya yang tepat, konfrontasi apa yang diperkirakan akan dihadapi kapital dalam perluasan globalnya. Maka tidak mengherankan jika Marx memilih untuk menyelidiki masyarakat non-Barat pada titik ini. Modal Euro-Amerika melaju kencang ke dunia yang sarat dengan perbedaan budaya. Untuk memahami perbedaan ini, dan perbedaan yang ditimbulkannya bagi kapital, Marx perlu mengetahui sebanyak mungkin tentang struktur sosial non-kapitalis. (Smith, 2002)

Konfrontasi kapital dengan masyarakat non-kapitalis merusak bentuk-bentuk tradisional dari metabolisme antara manusia dan alam, dan di sini Marx mencoba menemukan 'sumber subjek revolusioner' melawan kapitalisme. (Anderson, 2015).⁸

Hal yang sama dapat terjadi pada perlawanan terhadap perampokan modal alam: perampokan kepemilikan bersama penduduk asli di bawah pembangunan jejaring pipa minyak, penghancuran pertanian tradisional dengan pengenalan produk rekayasa genetika, pestisida dan pupuk sintetis. Tuvalu dan negara-negara lain di Selatan Global juga akan mengalami konsekuensi perubahan lingkungan yang jauh lebih cepat daripada negara-negara maju, dan lebih jauh lagi, sarana finansial dan teknologi untuk penanggulangannya sebagian besar tidak ada, sehingga krisis ekologis akan menghantam mereka lebih keras lagi. Akibatnya, orang-orang mengenali adanya keterasingan dari alam karena dominasi modal atas dunia. Keberatan global terhadap ketimpangan ekonomi dan ekologi adalah ekspresi dari 'kecenderungan sosialis yang tidak disadari' di Antroposen (Marx & Engels, 1987).

⁸ Kevin B. Anderson merumuskan poin ini sebagai kritik terhadap Rosa Luxemburg yang teori *underconsumption*-nya tidak cukup memperhatikan munculnya subjektivitas revolusioner di pinggiran, tetapi mempermasalahkan kepunahan ruang di luar kapitalisme sebagai batas akhir akumulasi kapital. Pandangannya memiliki pengaruh kuat pada teori sistem-dunia. Masalah mendasar adalah bahwa Luksemburg dan Wallerstein secara serius meremehkan potensi kapitalisme dengan mengidentifikasi kondisi paling vital keberadaannya dengan apropriasi dari masyarakat non-kapitalis.

Setelah 1868, Marx berusaha melengkapinya terhadap ekonomi politik dengan temuan-temuan baru baik dalam ilmu alam maupun budaya masyarakat non-Barat berdasarkan teori metabolismenya. Namun, kemajuan pesat ilmu pengetahuan alam dan antropologi pada paruh kedua abad ke-19 membuat sulit baginya untuk menyelesaikan tugas ini. Akibatnya, proyek Capital tetap belum selesai. Namun demikian, Marx setidaknya dengan jelas menunjukkan bahwa penghapusan 'kerja swasta' dan 'kerja upahan' adalah kondisi mendasar untuk realisasi sadar metabolisme berkelanjutan antara manusia dan alam. Akan tetapi, poin ini benar-benar absen dalam analisis Moore karena dia memperlakukan 'tenaga kerja' hanya sebagai salah satu dari Empat Murah. Dalam masyarakat masa depan, kata Marx, "produsen terkait mengatur interaksi metabolik mereka dengan alam secara rasional, membawanya di bawah kendali kolektif mereka alih-alih didominasi olehnya sebagai kekuatan buta" (Marx, 2015). Untuk mengatasi keretakan metabolik dan membangun "sintesis baru dan lebih tinggi, penyatuan pertanian dan industri" (Marx, 1976), akan diperlukan suatu transformasi sosial tenaga kerja menjadi moda produksi yang diatur oleh produsen terkait, sehingga mediasi sepihak dari metabolisme sosial dan alami dengan nilai dapat digantikan oleh organisasi produksi sosial yang lebih berkelanjutan. Dengan emansipasi dari kekuatan reifikasi yang terasing, hari kerja akan dipersingkat, dan pemborosan tenaga kerja dan sumber daya alam di berbagai cabang akan tidak ada lagi. Ini adalah langkah pertama yang diperlukan menuju rehabilitasi rasional metabolisme antara manusia dan alam.

REFERENSI

- Akashi, Hideto. (2016). 'The Elasticity of Capital and Ecological Crisis'. In: Marx-Engels-Jahrbuch 2015/16. Berlin: De Gruyter: 45–58
- Anderson, Kevin, and Alice Bows. (2011). 'Beyond 'Dangerous' Climate Change: Emission Scenarios for a New World'. In: Philosophical Transactions of the Royal Society 369: 20–44.
- Anderson, Kevin B. (2015). 'Entretien avec Kevin B. Anderson'. In: Contretemps: Revue de critique communiste 27: 143–55.

- Angus, Ian. (2016). *Facing the Anthropocene*. New York: Monthly Review Press, 2016
- Benton, Ted. (1989). 'Marxism and Natural Limits'. In: *New Left Review* 178: 51–86.
- Brenner, Robert. (2006). 'What is, and What is Not, Imperialism'. In: *Historical Materialism* 14 (2006): 79–106.
- Burkett, Paul. (1999). *Marx and Nature: A Red and Green Perspective*. New York: Palgrave.
- Burkett, Paul. (2005). *Marx and Ecological Economics: Toward a Red and Green Political Economy*. Leiden: Brill.
- Crutzen, Paul J. (2002). 'Geology of Mankind'. In: *Nature* 415: 23.
- Crutzen, Paul J. (2006). 'Albedo Enhancement by Stratospheric Sulfur Injections'. In: *Climate Change* 77: 211–19.
- Fischer-Kowalski, Marina. (1997). 'Society's Metabolism'. Dalam: Michael Redclift and Graham Woodgate (Ed.): *International Handbook of Environmental Sociology*. Northampton: Edward Elgar: 119–37.
- Foster, John Bellamy. (2000). *Marx's Ecology: Materialism and Nature*. New York: Monthly Review Press.
- Foster, John Bellamy. (2014). 'Paul Burkett's Marx and Nature Fifteen Years After'. Dalam: *Monthly Review* 66 no 7: 56–62.
- Foster, John Bellamy. (2016). 'Marxism in the Anthropocene: Dialectical Rifts on the Left'. Dalam: *International Critical Thought* 6 no. 3:393–421.
- Foster, John Bellamy, and Burkett, Paul. (2016). *Marx and the Earth: An Anti-Critique*. Leiden: Brill.
- Fraser, Nancy. (2014). 'Behind Marx's Hidden Abode'. Dalam: *New Left Review* 86 (March-April): 55–72.
- Harvey, David. (2009). 'The "New" Imperialism: Accumulation by Dispossession'. *Socialist Register* 40: 63–87.

- Heinrich, Michael. (2012). *An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx's Capital*. New York: Monthly Review Press.
- Klein, Naomi. (2014). *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. New York: Simon & Schuster.
- Lebowitz, Michael A. (2005). *Following Marx: Method, Critique and Crisis*. Leiden: Brill.
- Longo, Stefano B. et al. (2015). *The Tragedy of the Commodity*. New Brunswick, Rutgers University Press.
- Malm, Andreas, dan Hornborg, Alf. (2014). 'The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative'. In: *The Anthropocene Review* 1 no 1: 62–69.
- Malm, Andreas. (2014). *Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming*. New York: Verso.
- Marx, Karl, dan Engels, Friedrich. (1987). *Collected Works*. New York: International Publishers.
- Marx, Karl. (1976). *Capital vol. 1*. London: Penguin Books.
- Marx, Karl. (1993). *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*. London: Penguin Books.
- Marx, Karl. (2015). *Manuscript of 1864–1865*. Leiden: Brill.
- Merchant, Carolyn. (1990). *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*. San Francisco: HaperOne.
- Moore, Jason W. (2000). 'Environmental Crises and the Metabolic Rift in World-Historical Perspective'. In: *Organization & Environment* 13, no 2: 123–157.
- Moore, Jason W. (2015). *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. New York: Verso.
- Raupach, Michael R., dan Josep G. Canadell. (2010). 'Carbon and the Anthropocene'. Dalam: *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2: 210–18.
- Rockström, Johan et al. (2009). 'A Safe Operating Space for Humanity'. Dalam: *Nature* 461: 472–75.

- Saito, Kohei. (2017). *Karl Marx's Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*. New York: Monthly Review Press.
- Salleh, Ariel, Goodman, James, and Hosseini, S. A. Hamed. (2015). 'From Sociological Imagination to "Ecological Imagination"'. Dalam Marshall, J., and Linda Connor (Eds.): *Environmental Change and the World's Futures: Ecologies, Ontologies, Mythologies*. London: Routledge 96–109.
- Smith, David Norman. (2002). 'Accumulation and the Clash of Cultures: Marx's Ethnology in Context'. In: *Rethinking Marxism* 14, no. 4: 73–83.
- Steffen, Will et al. (2015). 'Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet'. In: *Science* 347, no. 6223: 736–46.

MARXISME DAN EKOFEMINISME PADA ERA PERUBAHAN IKLIM: KONVERGENSI DAN DIVERGENSI¹

Rosalinda Pineda Ofreneo²

ABSTRAK

Kaum Marxis mempersalahkan kapitalisme global atas bencana iklim. Namun, kalangan ekofeminis menambah pada sekaligus mengkritik wacana Marxis melalui penjelasan gender tentang sifat predatorial kapitalisme yang bertaut erat dengan tambatan patriarkalnya. Hubungan perempuan dengan alam, berkat fungsi reproduktifnya yang dikonstruksi secara sosial, berbeda dengan hubungan laki-laki dengan alam dari banyak segi. Gerakan ekofeminis yang dipimpin perempuan juga memiliki beragam tujuan dan strategi yang partisipatif dan inklusif demi perlawanan global dan pembangunan alternatif, yang dapat tumpang-tindih dengan sekaligus terpisah dari gerakan berbasis kelas yang dipimpin laki-laki. Agar dapat bertahan hidup sebagai aktivis di masa sekarang, kita harus mengenakan tiga warna: hijau untuk gerakan lingkungan, merah untuk gerakan berbasis kelas, dan ungu untuk gerakan perempuan. Kita perlu dijiwai dan terinspirasi oleh gerakan-gerakan sosial hari ini agar dapat mendiagnosis dan mengubah realitas politik kita saat ini. Makalah ini pertama-tama memberi konteks, yakni perubahan iklim dan dampaknya yang membawa malapetaka bagi kehidupan di bumi. Kedua, makalah ini meninjau apa yang dikatakan Karl Marx tentang lingkungan dan apa yang dikatakan kaum Marxis hari ini tentang persoalan keberlanjutan planet. Marx kerap disyakwasangkakan sebagai sosok anti lingkungan, produktivis, dan tak acuh terhadap advokasi gerakan lingkungan. Saya mengartikulasikan temuan-temuan mutakhir dalam tulisan-tulisan Marx yang simpatik terhadap isu-isu lingkungan dan dikutip oleh kalangan ekososialis hari ini, yang mencakup kalangan yang disebut sebagai “Kiri Hijau”. Bagian

1 Diambil dari terbitan sebelumnya, Rosalinda Pineda Ofreneo. “Marxism and Ecofeminism in the Era of Climate Change: Convergence and Divergence”. 2020. *Critical Thought in Troubled Times: Encounters with Marx, Thinking With and Beyond Marx: Critical Essays on Politics, History and Art. Volume II*. Terbit dalam Commemoration of the 200th Birth Anniversary of Karl Marx. Tadem, Eduardo C. dan Honey B. Tbiola. Eds. University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS) Program Alternative Development. UP CIDS *Public Policy Monograph Series*, Quezon City: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, hlm. 69-84.

2 Rosalinda Pineda Ofreneo adalah profesor dan dekan di College of Social Work and Community Development, University of the Philippines.

ketiga menampilkan perspektif ekofeminis yang menegaskan sekaligus mengkritik Marxisme. Sebagai kesimpulan, bagian yang terakhir memaparkan beberapa implikasi terhadap praxis.

Kata-kata Kunci: Marxisme, ekofeminisme, ekososialisme, perubahan iklim, Kiri Hijau.

PENDAHULUAN

Pemanasan global menghasilkan banyak bencana. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) (2016), perubahan iklim memiliki potensi dampak buruk terhadap *kesehatan*, khususnya berkenaan dengan kematian terkait cuaca (contohnya, taifun super), penyakit menular, dan penyakit pernapasan terkait kualitas udara; terhadap *pertanian* dengan turunnya hasil panen dan naiknya permintaan akan irigasi; terhadap *produktivitas dan kesehatan hutan*; terhadap *sumber daya air* dengan pasokan yang berkurang, kualitas yang memburuk, dan meningkatnya persaingan atas air; terhadap pesisir dengan erosi pantai, banjir di lahan pesisir, dan biaya tambahan untuk melindungi masyarakat pesisir; dan terhadap *wilayah alami dan spesiesnya* dengan hilangnya habitat dan spesies serta menyusutnya gletser.

Dilihat dari dampak pemanasan global terhadap naiknya permukaan air laut, kota-kota besar di Asia dikatakan akan tenggelam pada 2050 (Climate Central 2019; Cooper 2020) seperti Metro Manila, Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh City, dan Yangon. Metro Manila, khususnya, mengalami penurunan muka tanah sepuluh sentimeter per tahun. Salinasi air tawar dan pengeringan akuifer akan mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air minum. Pertanian akan terkena pukulan berat karena hilangnya lahan sekitar pesisir akibat kenaikan muka air laut, banjir dan kekeringan yang frekuensi dan intensitasnya meningkat, dan keanekaragaman hayati hilang. Keadaan ini akan mengakibatkan kelangkaan pangan, meningkatnya kelaparan, dan, pada akhirnya, pergolakan sosial.

Strategi Kerangka Nasional tentang Perubahan Iklim (*National Framework Strategy on Climate Change*) 2010–2022 yang dihasilkan oleh Komisi Perubahan Iklim Filipina (*Climate Change Commission*; 2010) menyatakan bahwa Filipina menduduki peringkat teratas di dunia dalam

hal kerentanan terhadap peristiwa badai tropis dan ketiga dalam hal penduduk yang terpapar pada peristiwa musiman semacam itu. Selain itu, Filipina mengalami rata-rata dua puluh taifun setiap tahunnya dan risiko bencana yang lebih tinggi dengan adanya bahaya geologis/seismik yang berinteraksi erat dengan ancaman meteorologis tersebut. Lebih lanjut, dokumen di atas mengklaim bahwa perubahan iklim juga mengancam kemampuan ekosistem negeri ini untuk menyediakan jasa penunjang kehidupan.

Sudah jamak diketahui bahwa warga miskin, yang paling rentan dan lemah posisinya di antara populasi perkotaan dan perdesaan, adalah yang paling terpuak akibat dampak perubahan iklim. Mereka yang tinggal di perkotaan menempati rumah-rumah tidak layak huni yang mudah rusak, yang biasanya dibangun di kawasan hunian informal dekat atau di tengah-tengah zona bahaya banjir dan bahaya lain. Sementara itu, warga miskin perdesaan diterpa kekeringan, taifun, dan banjir yang merusak tanaman dan penghidupan lebih sering, lebih intens, dan lebih tak terduga. Hama dan penyakit yang dibawa oleh vektor juga memiliki efek merusak, bersama dengan hilangnya lahan subur seiring terjangkit badai dan kenaikan muka air laut yang mengikis kawasan pesisir. Nelayan juga termasuk yang paling terancam karena stok ikan menurun seiring meningkatnya kerusakan terumbu karang dan bahaya-bahaya lainnya.

Menurut Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*; UNFCCC 2019), “Pada 2018 terjadi gelombang panas, badai, dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, sedangkan emisi gas rumah kaca terus meningkat tahun lalu, dengan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer saat ini paling tinggi selama tiga juta tahun terakhir”. Namun demikian, aksi iklim tertinggal jauh dari apa yang perlu dilakukan untuk memperlambat laju pemanasan global yang sudah begitu berbahaya, mencerminkan “kegagalan kebijakan lingkungan” oleh banyak pemerintahan (ibid.). Jika tidak ada perubahan dalam laju kenaikan temperatur global hingga Desember 2040, kita akan mencapai titik genting, yakni titik di mana kita tak bisa lagi membalikkan keadaan dan laju perubahan iklim akan semakin memburuk dan menghasilkan cuaca ek-

strem panas atau dingin. Itulah masa depan anak-cucu kita. Mengingat kegentingan dan kompleksitas permasalahan ini, satu tantangan besar bagi kita adalah untuk menentukan sikap dan bagaimana menghadapi persoalan ini secara efektif.

MARX DAN MARXIS TENTANG LINGKUNGAN

Marx ada banyak pengamatan valid tentang hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Namun, Marxisme juga dikritik karena dianggap kurang memadai dalam hal itu. Bagi feminis, Marxisme klasik tidak memberi perhatian yang cukup terhadap peran krusial kerja reproduksi perempuan. Bagi environmentalis, “masyarakat sosialis yang nyata ada” di bawah pengaruh Marxisme cenderung produktifis; dengan kata lain, mereka terlalu mementingkan produksi terlepas biaya lingkungannya, dan terlalu percaya pada solusi teknologi untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan produktivisme mereka.

Terlepas dari yang dikatakan di atas, satu ciri utama pemikiran Marxis adalah dinamisnya. Seperti yang pernah Marx katakan, “Yang jelas saya sendiri bukan seorang Marxis” (dikutip dalam Engels, 1882). Selain itu, karya Marx juga dicirikan oleh komitmen politiknya atas perubahan sosial, sebagaimana terkandung dalam kutipan terkenal berikut ini, “Para filsuf hanya menafsir dunia dalam berbagai cara; yang penting adalah mengubahnya” (Marx, 1845, hlm. 101). Ana Maria Nemenzo dengan tepat menyatakan dalam komentar pembukanya (2019) bahwa Marx mewariskan kepada kita metode analisis dan aksi yang mengutamakan praksis—kesatuan antara teori dan praktik. Aksi dan praktik harus bersumber dari pemahaman mendalam akan teori, dan sebaliknya. Kita harus secara kritis mendiagnosis perubahan yang membentuk dunia kita. Untuk itu, kita biasanya meminjam dan mengambil inspirasi dari karya-karya Marx dan karya-karya mereka yang masih menganggap wawasan inti Marx berguna.

Satu karya menarik yang keluar belakangan ini berjudul *Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy* (2017) oleh Kohei Saito, yang memperoleh gelar PhD dalam Filsafat dari Humboldt University. Saito melacak dan meninjau kembali catatan-catatan, surat-surat, dan naskah-naskah Marx yang belum diter-

bitkan tentang ilmu alam. Dan Saito mencapai kesimpulan bahwa Marx dapat diappropriasi oleh kaum ekososialis hari ini berkat tulisan-tulisannya yang merupakan “kritik ekonomi politik yang belum tuntas” yang belum pernah diterbitkan dan mestinya menjadi bagian dari *Capital Volume 1*. Di dalamnya terkandung kritik Marx tentang kerusakan yang ditimbulkan kapitalisme terhadap lingkungan. Dalam ulasan buku karya Saito, Hannah Holleman menggambarkan cemerlangnya metodologi Marx (2018):

“Keterlibatan luas Marx dengan berbagai perkembangan intelektual dan ilmiah di seluruh benua... menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk menempatkan hal-hal itu dalam saling-silang percakapan hingga tiba pada pemahaman kritisnya sendiri mengenai apa yang ada, sekaligus apa yang mungkin. Di dalamnya, kita melihat metodologi Marx untuk mempelajari dunia demi mengubahnya”.

Kehidupan, Alam, dan Kerja

Ada mata rantai yang karib antara manusia dan alam. Manusia adalah bagian dari alam dan ditunjang oleh alam. Kerjalah yang membuat kita menjadi manusia. Layaklah mengutip Marx secara panjang untuk membentangkan pokok pemikiran ini:

“Kerja, pertama-tama, adalah proses antara manusia dan alam, sebuah proses dengan apa manusia, melalui tindakannya sendiri, memediasi, meregulasi, dan mengendalikan metabolisme antara dirinya dan alam. Ia membenturkan materi alam sebagai kekuatan alam. Ia menggerakkan kekuatan alam yang menjadi bagian dari tubuhnya sendiri, lengan, kaki, kepala, dan tangannya, untuk mengappropriasi materi alam dalam wujud yang disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri. Melalui gerakan ini, ia mengambil tindakan terhadap alam luar dan mengubahnya, dan dengan demikian secara bersamaan mengubah alam/sifatnya sendiri. ... Hal itu [proses kerja] adalah kondisi universal bagi interaksi metabolis antara manusia dan alam, kondisi ajek eksistensi manusia yang ditentukan alam” (Marx, 1976, hlm. 283, 290; dengan penekanan yang ditambahkan).

Pada titik ini, penting untuk menyoroti konsep metabolisme yang merupakan kunci pemikiran dan pembentukan teori ekofeminis, sebuah istilah yang akan kita rujuk lagi nanti. Kritik feminis terhadap konsepsi

Marx tentang hubungan manusia dan alam berusaha memberikan perhatian dan kepentingan yang setara pada kerja reproduksi perempuan yang tak terlihat. Menurut pandangan ini, konsepsi Marx berfokus semata-mata pada kerja produktif manusia, yaitu jenis kerja yang dihargai di lokapasar. Evolusi manusia dari kera dicirikan dengan penemuan dan penguasaan alat yang membuatnya produktif. Laki-laki menggunakan alat untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan dari alam. Akibatnya, alat menjadi senjata. Laki-laki memiliki monopoli atas persenjataan sehingga laki-lakilah yang berperang. Sementara itu, perempuan tetap terjebak dalam kerja domestik. Hampir setengah dari perempuan di dunia adalah ibu rumah tangga yang tidak dapat bergabung dengan angkatan kerja.

Kritik Marx yang dominan terhadap kapitalisme tertangkap oleh apa yang disebut *retakan metabolik atau ekologis*, yakni lepasnya manusia dari alam karena perkembangan kapitalisme. Contohnya adalah penemuan pupuk sintetis oleh manusia untuk memaksimalkan nilai yang dapat diekstraksi tidak hanya dari pekerja tetapi juga dari tanah. Proses ini juga difasilitasi oleh pemisahan yang semakin besar antara kota dan desa. Marx menggambarkan situasinya seperti ini:

“Produksi kapitalis mengumpulkan populasi di pusat-pusat besar, dan menyebabkan populasi perkotaan meraih kekuatan yang terus membesar. Ini menghasilkan dua hal. Di satu sisi, ia memusatkan kekuatan motif historis masyarakat; di sisi lain, ia mengganggu interaksi metabolik antara manusia dan bumi, yaitu mencegah kembalinya ke tanah unsur-unsur penyusunnya yang dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk makanan dan pakaian; karena itu, ia menghalangi berjalannya kondisi alami yang kekal untuk kesuburan tanah yang langgeng ... Namun, dengan menghancurkan keadaan-keadaan seputar metabolisme tersebut ... ia mengharuskan pemulihan alam yang sistematis sebagai hukum regulatif produksi sosial, dan dalam wujud yang memadai bagi perkembangan paripurna umat manusia... [semua] kemajuan dalam pertanian kapitalis adalah kemajuan dalam keterampilan, tidak hanya untuk merampok pekerja, tetapi juga keterampilan merampok tanah; semua kemajuan dalam meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka waktu tertentu adalah kemajuan menuju penghancuran sumber kesuburan yang langgeng... Produksi kapitalis, oleh karena itu, hanya mengembangkan teknik dan derajat kombinasi proses sosial produksi dengan secara bersamaan

merusak sumber asli segala kekayaan—tanah dan pekerja” (ibid., 637–38; dengan penekanan yang ditambahkan).

Marx mengambil sumber dari karya Carl Schorlemmer, seorang naturalis dan ahli kimia Jerman yang mengklaim bahwa tanah akan tercemar jika bahan kimia, seperti pupuk dan pestisida, dibubuhkan di atasnya. Tidak hanya lingkungan tetapi juga para pekerja yang mengolahnya akan turut keracunan. Beberapa contoh retakan metabolik atau ekologis adalah monokultur tanaman komersial untuk produksi bahan bakar nabati yang merupakan makanan bukan untuk manusia, melainkan untuk mesin, pertanian industri, dan penggurungan. Kelaparan dan polusi adalah konsekuensi utama dari fenomena ini. Bentuk lain perusakan ekologis adalah penggunaan bahan bakar fosil, yang mayoritasnya dapat ditelusuri ke tujuh perusahaan saja. Kapitalisme memang menghancurkan bumi demi laba.

Tentu saja, retakan ekologis adalah bagian dari cerita yang lebih besar dan lebih familiar tentang penghancuran dan eksploitasi besar-besaran di bawah sistem kapitalis. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi barang dan jasa dimiliki dan dioperasikan secara privat demi laba. Ujungnya adalah konsentrasi kekayaan yang berlebihan di beberapa tangan saja, di mana delapan laki-laki memiliki kekayaan yang sama banyaknya dengan kekayaan separuh populasi terbawah di seluruh dunia (Oxfam International, 2017a). Artinya juga bahwa orang-orang superkaya, mereka yang memiliki sebagian besar kekayaan dalam masyarakat, juga mempengaruhi atau bahkan mengendalikan negara. Mereka menegakkan kuasa melalui tentara, penjara, dan sistem peradilan serta mengamankan persetujuan publik dengan mempengaruhi budaya dan ideologi. Mereka jugalah yang menikmati dan mengumpulkan kekayaan dan nilai yang diciptakan oleh para pekerja dan petani di bagian paling bawah piramida ekonomi.

Visi (Hijau) Marx: Kembali ke Alam

Marx membayangkan “sebuah masyarakat di mana ‘produsen terkait’—mayoritas masyarakat—secara sukarela dan demokratis memutuskan arah ekonomi untuk kepentingan kebutuhan manusia alih-alih laba,” secara sungguh-sungguh “menghapus kesenjangan antara

kota dan desa” (Terzakis, 2018). Masyarakat ini akan memiliki hubungan langsung dan apresiatif dengan alam dan jauh lebih banyak waktu luang untuk mengembangkannya. Masyarakat ini juga akan dicirikan oleh gerakan kembali ke alam yang “pascarevolusioner” — “keterlibatan pekerja secara kolektif, demokratis, dan berwawasan dalam perencanaan kerja yang rasional dan hubungan kita dengan alam.” Ini berarti “mengatur ulang produksi secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan manusia dan merebut kembali tempat kita di alam, dengan alam menjadi ‘kepemilikan’ kolektif rakyat alih-alih kepemilikan pribadi minoritas kecil” (Terzakis, 2018).

Tony Phillips (2018) menjabarkan prinsip utama Ekososialisme Karl Marx sebagai berikut. Pertama, “retakan metabolik antara manusia dan alam” adalah “kontradiksi sentral kapitalisme”. Ini berarti bahwa kekuatan sosial yang mendukung sistem ekonomi saat ini secara fundamental bersekutu melawan kekuatan-kekuatan sosial yang menentang status quo dan menginginkan cara lain untuk mengelola ekonomi dan masyarakat agar selaras dengan alam. Kedua, “proses kerja adalah ‘interaksi metabolik dengan alam’ yang berubah seiring waktu sesuai modus produksi” (Saito, 2017, dikutip dalam Phillips, 2018). “Kapitalisme secara kualitatif dan kuantitatif berbeda dari modus-modus sebelumnya dalam dampaknya terhadap lingkungan ketika akumulasi gencar mulai menemui batas-batas sumber daya Bumi” (ibid). Kapitalisme memiliki sifat yang melekat dan unik padanya sebagai sistem ekonomi yang mengakumulasi tanpa henti, terlepas dari habisnya dan kanibalisasi sumber daya Bumi, yang menjadi syarat yang memungkinkannya. Ketiga, seperti yang dikemukakan Saito, “jika lingkungan dihancurkan oleh kapitalisme, maka ia hanya dapat diselamatkan dengan menggantikan kapitalisme dengan modus produksi yang lebih tinggi, sosialisme” (ibid). Karena kehancuran lingkungan adalah hasil alami dan niscaya dari eksploitasi kapitalis, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah melalui perubahan sistem, bukan dengan “pertumbuhan pembangunan berkelanjutan”, “reformasi kapitalisme”, misalnya.

PERSPEKTIF EKO-FEMINIS: MENGAFIRMASI DAN MENKRITIK MARXISME

Ekofeminisme adalah “istilah baru untuk sebuah kearifan bahari’ yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial—gerakan feminis, perdamaian, dan ekologi—pada akhir 1970-an dan awal 1980-an” (Mies dan Shiva, 1993, hlm. 13). Ekofeminisme adalah keyakinan bahwa baik perempuan maupun alam dipersatukan melalui sejarah penindasan bersama oleh masyarakat patriarkal yang abai. Ikon ekofeminisme dan fisikawan India, Vandana Shiva, telah lama bekerja dengan petani India. Menuutnya, “Masa depan kita adalah di mana perempuan memimpin untuk berdamai dengan Bumi atau tidak ada masa depan manusia sama sekali” (Shiva, dikutip dalam Friends of the Earth Limited, 2017).

Kalangan ekofeminis berusaha mengatasi dan mengubah ideologi patriarki. Ideologi patriarki dicirikan oleh keyakinan berikut: pertama, laki-laki harus menaklukkan alam dengan kekuatan sehingga memisahkan diri darinya; kedua, laki-laki harus berada di puncak hierarki dominasi, menjadi tuan atas perempuan, masyarakat adat, dan alam; dan ketiga, laki-laki harus lebih unggul daripada perempuan, dan budaya harus lebih tinggi daripada alam karena dunia dibangun dalam dualisme di mana satu bagian bertentangan dengan dan mendominasi yang lain.

Ekofeminisme menekankan pentingnya alam dan perempuan sebagai produsen kehidupan. Tubuh perempuan bersifat produktif dalam dirinya sendiri. Perempuan melahirkan, memberi makan bayi dengan susu alami, dan merawat bayi setelahnya. Perempuan secara intrinsik terkait dengan alam karena perempuan melahirkan; perempuan memberikan kehidupan. Maka, pelanggaran atas alam dikaitkan dengan pelanggaran atas dan marginalisasi perempuan, terutama di Selatan. Perempuan memproduksi dan mereproduksi kehidupan tidak hanya secara biologis, tetapi juga melalui peran sosial dalam menyediakan penghidupan. Lebih jauh, semua masyarakat ekologis, yaitu penghuni hutan dan petani, yang hidupnya diatur berdasarkan prinsip keberlanjutan dan reproduksi kehidupan dalam segala kekayaannya, juga mewujudkan prinsip feminin: memberikan kehidupan dan memberi keutamaan pada kehidupan. Umumnya tidak ada hubungan domina-

si yang dikonstruksi secara sosial antara perempuan dan alam. Dalam banyak masyarakat, terutama di antara masyarakat adat dan dalam perekonomian subsisten, perempuan tidak melihat alam sebagai kemilikan tetapi sebagai mitra dalam menghasilkan kehidupan dan kebahagiaan. Dalam masyarakat seperti itu, perempuan berbeda dari laki-laki dalam hubungannya dengan alam karena perempuan mengalami proses melahirkan dan menyusui; melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan sebagai “jembatan” antara laki-laki dan alam; melakukan pekerjaan manual sebagai juru masak, petani, peramu obat; dan merupakan representasi simbolis hubungan feminin dengan “alam”.

Prinsip dasar ekofeminisme adalah keutamaan hidup. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam prinsip-prinsip berikut. Pertama, manusia adalah bagian dari alam dan tidak mungkin ada di luar alam. Kedua, segala sesuatu ada biayanya. Ketiga, tidak boleh ada hierarki dominasi. Dan keempat, harus ada penyusunan ulang konsep kuasa dalam menjalin hubungan baru, dari kuasa yang memusuhi kehidupan menjadi kuasa yang serba memelihara. Ekofeminisme membayangkan kembali kuasa bukan sebagai dominasi (“kuasa atas”) di mana seseorang membunuh, melukai, atau memenjarakan orang-orang yang menentangnya. Sebaliknya, kuasa yang memelihara (“kuasa dengan”) memungkinkan orang, tumbuhan, dan hewan untuk tumbuh.

The Iceberg Model of Capitalist Patriarchal Economies secara ringkas menggambarkan hierarki dan dominasi pekerja, perempuan, dan alam (Mies, 2007). Menurut model ini, dua lapis paling atas dari struktur piramida adalah apa yang disebut ekonomi kasatmata (*visible economy*), yang biasanya diukur dalam Produk Nasional Bruto (PNB) serta dioperasionalkan melalui kontrak kerja dan tenaga kerja upahan. Kapital bertakhta dan berkuasa di puncak gunung es. Tepat di bawah kapital adalah kerja upahan. Lapis-lapis berikutnya sampai ke bawah terdiri atas ekonomi tak tampak yang tidak masuk dalam PNB. Lapis-lapis tersebut mencakup sektor informal seperti pekerja rumahan dan pekerja anak, kerja subsisten petani, pekerjaan domestik yang biasanya dilakukan oleh perempuan dalam keluarga, koloni internal dan eksternal, dan alam. Penting juga untuk dicatat bahwa alam dan pekerjaan perempuan diperlakukan sebagai barang gratis yang siap dibuang dan dieksploitasi.

Judul buku yang provokatif ini menangkap penundukan perempuan—*Women: The Last Colony* (Mies dkk., 1988). Kerja perempuan yang tidak tampak dan tidak dibayar menyerupai tenaga kerja yang dieksploitasi di lingkungan kerja. Lebih jauh, pekerjaan pengasuhan perempuan juga memungkinkan laki-laki pencari nafkah pergi ke pabrik, pekerjaan perakitan, atau pekerjaan kantor setiap hari. Seperti dikatakan dalam *Red Women's Workshop* (1974): “pekerjaan seorang perempuan tidak pernah selesai”.

Kalangan ekofeminis mengklaim bahwa sistem internasional, yang didefinisikan dan dijalankan dari Utara oleh lembaga-lembaga yang didominasi laki-laki, tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga lingkungan, masyarakat adat, dan negara-negara kurang berkembang. Sistem ini dikonseptualisasikan dan terstruktur untuk menguntungkan yang kuat dan mengeksploitasi yang lemah dan rentan. Inilah model malapembangunan yang secara mendalam patriarkal, hampa akan prinsip-prinsip feminin, konservasi, dan ekologi.

IMPLIKASI TERHADAP PRAXIS: DARI DIVERGENSI MENUJU KONVERGENSI

Visi ekofeminis dijiwai oleh swapenyediaan, swasembada, dan penghidupan berkelanjutan; desentralisasi; berproduksi bukan untuk laba melainkan untuk menopang kehidupan dan memuaskan kebutuhan manusia; demokrasi partisipatif dan akar rumput; produksi demi kebahagiaan dan pemenuhan diri; perdamaian dan perlucutan senjata; dan pengakuan terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional (Mies sebagaimana dikutip dalam Pineda-Ofreneo, 1997). Kedua, perjuangan antiimperialis.

Visi tersebut mencakup serangkaian luas strategi yang meliputi kebersahajaan sukarela, pembebasan konsumen, pelestarian dan konservasi lingkungan, daur ulang sampah, peralihan ke pola makan nabati, dan aksi langsung untuk ekonomi solidaritas. Visi itu juga mencakup kampanye pendidikan untuk energi bersih dan terbarukan, kebebasan dari utang, perdamaian dan perlucutan senjata, ketahanan pangan, hak-hak reproduksi, serta mengakui, mengurangi, dan mendistribusikan ulang pekerjaan perawatan yang tidak dibayar.

Ada banyak contoh konkret dari strategi ini. Pertama adalah gerakan Chipko yang merupakan “gerakan peluk pohon” di India di mana perempuan mengelilingi sebuah pohon besar dan memeluk batangnya agar tidak bisa ditebang oleh para penebang. Contoh kedua adalah pengorganisasian dan pengerahan perempuan adat untuk mempertahankan wilayah leluhur; misalnya, masyarakat adat Dumagat dan penggunaan atas pengetahuan tradisional mereka serta pentingnya “kembali ke pokok”. Ketiga, berbagai organisasi perempuan juga melakukan mobilisasi untuk menentang pertambangan dan kemitraan pemerintah-swasta (KPS). Keempat, ekonomi solidaritas yang dirayakan sebagai sosialisme abad ke-21 oleh kaum progresif di Amerika Latin. Perekonomian ini adalah di mana keterlibatan dalam bisnis, baik oleh koperasi, kelompok swadaya, asosiasi perdagangan adil, atau kewirausahaan sosial harus untuk rakyat, untuk planet, dan untuk kemakmuran. Dalam beberapa hal, bisnis-bisnis ini menciptakan ruang alternatif bahkan dari dalam “perut monster” yang disebut kapitalisme. Kelima, kampanye RUU Kesehatan Reproduksi di Filipina yang masih terus diperjuangkan karena implementasi yang tidak efektif di tingkat lokal dan tidak adanya perwakilan organisasi masyarakat sipil di tim pelaksana. Contoh terakhir adalah kampanye untuk mengedepankan kerja perawatan tak berbayar sebagai prasyarat mencapai pemberdayaan politik, sosial, dan ekonomi perempuan, serta mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Ini harus dilakukan dengan mengakui kerja perawatan; mengurangi tugas-tugas yang sulit dan tidak efisien di rumah; mendistribusi tanggung jawab atas perawatan secara lebih layak (dari perempuan ke laki-laki dan dari keluarga ke Negara/pemberi kerja); dan representasi pekerja perawatan dalam pengambilan keputusan (Oxfam International, 2017b).

Menurut Burkett (2017), eksploitasi proletariat selalu terkait erat dengan eksploitasi lingkungan, yang bermula dari “pemisahan paksa produsen langsung dari tanah mereka” hingga “konversi mereka menjadi buruh upahan”. Dalam kondisi eksploitatif, kaum pekerja harus memastikan bahwa mereka tidak akan sakit, dan ini menuntut lingkungan kerja yang bebas dari bahaya pekerjaan, yang tidak tercemar, dan kondusif untuk produktivitas. Burkett (2017) melanjutkan:

“Perjuangan proletariat demi kehidupan yang layak selalu merupakan perjuangan dalam dan melawan kondisi yang tidak sehat, baik di dalam maupun di luar tempat kerja, di rumah dan di tempat kerja—perjuangan demi hubungan yang lebih sehat dengan alam sebagai syarat pembangunan manusia. Krisis iklim memberikan sorotan baru pada fase-fase yang berbeda dalam perjuangan ini, dan pelajarannya untuk hari ini”.

Dari pemikiran John Bellamy Foster, Burkett (2017) juga menyatakan bahwa, karena adanya penghapusan dan pengaburan perbedaan sebelumnya antara eksploitasi tempat kerja dan degradasi lingkungan, telah terjadi peningkatan “konvergensi perjuangan ekonomi dan lingkungan di seluruh dunia” yang terdiri atas berbagai aliansi berdasarkan gender, ras, kelas, adat, dan gerakan lingkungan. Hal ini menandai “kebangkitan proletariat lingkungan yang terglobalisasi sebagai kelas yang sadar bagi dirinya sendiri, yaitu sebagai formasi komunitas-pekerja” dengan “hubungan persahabatan ekologis yang baru, merangkul visi produksi manusia dalam arti yang paling mendasar sebagai metabolisme alam dan masyarakat” (Foster, 2013 dikutip dalam Burkett, 2017).

Menggaungkan Rosa Luxemburg, dan membubuhkan corak lingkungan pada pemikirannya, para ekososialis memulai deklarasi bergelora mereka dengan frasa ini: “Umat manusia saat ini menghadapi pilihan yang sulit: ekososialisme atau barbarisme” (Deklarasi Ekososialis Belem, 2008). “Gerakan ekososialis bertujuan untuk menghentikan dan membalikkan proses bencana pemanasan global khususnya dan ekosida kapitalis pada umumnya” dengan mengklaim bahwa hanya perubahan besar dalam watak peradaban itu sendirilah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari konsekuensi bencana perubahan iklim (ibid). Komitmen jangka panjang terhadap transformasi struktural kapitalisme dan berseminya ekosistem-ekosistem diekspresikan dengan cara seperti ini dalam versi lain dari manifesto tersebut:

“Kami akan berjuang untuk sekuat mungkin membatasi ekosida kapitalis, dan membangun sebuah gerakan yang dapat menggantikan kapitalisme dengan masyarakat di mana kepemilikan bersama atas alat-alat produksi menggantikan kepemilikan kapitalis, dan di mana pelestarian dan pemuli-

han ekosistem akan menjadi bagian fundamental dari semua aktivitas manusia” (Ecosocialist Manifesto, tanpa tanggal).

Hal yang krusial bagi proyek untuk membangun “alternatif peradaban radikal” bagi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kriteria nonmoneter seperti “kebutuhan sosial dan keseimbangan ekologis” serta “rasionalitas ekologis, kontrol demokratis, kesetaraan sosial, dan dominasi nilai guna atas nilai tukar” (Ecosocialist Manifesto, tanpa tanggal). Batu penjurus lain peradaban ekososialis ini adalah keadilan gender yang mengedepankan kerja perawatan dan tautan intim antara perempuan dan alam. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut:

“Emansipasi gender merupakan bagian integral dari ekososialisme. Pelecehan terhadap perempuan dan alam telah sangat terkait sepanjang sejarah, dan terutama sejarah kapitalisme, di mana uang telah mendominasi kehidupan. Maka, mempertahankan dan meningkatkan kehidupan bukan hanya soal mengembalikan martabat perempuan; ini juga membutuhkan pembelaan dan pemajuan bentuk-bentuk dan hubungan kerja yang memelihara kehidupan dan yang telah disepelekan hanya sebagai ‘pekerjaan perempuan’ atau ‘subsisten’” (ibid).

Ian Angus (2016, 207) dan Deklarasi Ekososialis Belem (*Belem Ecosocialist Declaration*; 2008) merangkum transformasi radikal yang harus terjadi di bawah panji-panji ekososialisme, khususnya di bidang-bidang berikut. Pertama adalah sistem energi, yang akan menggantikan bahan bakar berbasis karbon dan bahan bakar hayati dengan sumber daya bersih di bawah kendali komunitas: angin, panas bumi, gelombang, dan terutama, tenaga surya. Kedua, sistem transportasi yang perlu mengurangi penggunaan truk dan mobil pribadi secara drastis, menggantikannya dengan transportasi umum yang gratis dan efisien. Ketiga, mengurangi pola produksi, konsumsi, dan pembangunan saat ini, yang berbasis pada limbah, keusangan bawaan, persaingan, dan polusi, dengan hanya memproduksi barang-barang yang berkelanjutan dan dapat didaur ulang serta mengembangkan arsitektur hijau. Keempat, transformasi produksi dan distribusi pangan, dengan sejauh mungkin mempertahankan kedaulatan pangan lokal, menghilangkan agribisnis industri yang

mencemari, menciptakan agroekosistem yang berkelanjutan, dan bekerja secara aktif untuk memperbarui kesuburan tanah.

Di seluruh dunia dan dalam berbagai isu, formasi dan kampanye politik telah bekerja menuju konvergensi lebih jauh. “Solidaritas di antara manusia, dan antara manusia dengan bumi (dengan *seluruh* penghuninya), dan pencarian modus hidup yang baik yang berkelanjutan (menempatkan nilai guna di atas nilai tukar), tampaknya menjadi perekat ideologis yang menyatukan koalisi eko-proletar yang sedang muncul” (Burkett, 2017). Sebagai ilustrasi, nilai-nilai ekologis dan komunitarian dari beberapa komunitas adat mulai bersentuhan dengan varian feminisme yang lebih baru dan “proletar tradisional” yang lebih banyak (ibid). Sementara itu, “sirkuit baru penyediaan pasokan berkelanjutan” telah muncul di dalam dan sekitar kota-kota besar, antara lain, untuk listrik kota dan angkutan umum, koperasi, kelompok komunitas pekerja, sekolah publik, dan alternatif perawatan kesehatan berbasis masyarakat.

Ecosocialist Declaration (deklarasi eko-sosialis, red) sangat jelas dalam pengandalannya atas mobilisasi massa global:

“Pemanasan Global tidak akan berhenti di ruang-ruang konferensi dan negosiasi perjanjian: hanya aksi massa oleh yang tertindas, oleh para korban ekosidalah yang dapat menciptakan perbedaan. Dunia Ketiga dan masyarakat adat berada di garis depan perjuangan ini, memerangi perusahaan multinasional yang menciptakan polusi, agrobisnis kimia beracun, benih rekayasa genetika yang invasif, dan “bahan bakar hayati” yang memasukkan jagung ke dalam tangki mobil, mengambalnya dari mulut orang-orang lapar. Solidaritas antara mobilisasi ekologis antikapitalis di Utara dan Selatan adalah prioritas strategis” (2008).

Ecosocialist Declaration bukanlah pernyataan akademis, melainkan “seruan untuk bertindak” (Belem *Ecosocialist Declaration*, 2008). Lebih lanjut, deklarasi ini menyatakan bahwa “elit penguasa bercokol sangat kuat”, dan kekuatan oposisi radikal masih kecil. Namun, kekuatan-kekuatan ini adalah satu-satunya harapan bahwa arah “pertumbuhan” kapitalis yang katastrofis akan dihentikan.

KOMENTAR PENUTUP

Artikel ini membahas bagaimana ekofeminisme menambah dan mengkritik wacana Marxis, dengan menjelaskan sifat predator dari kapitalisme yang berakar dari patriarki. Dengan memberikan konteks perubahan iklim dan efek destruktif pada Bumi, artikel ini memperdalam tautan antara pernyataan alam Marx. Hal ini dicapai dengan mencermati karya baru tentang Marx yang bersimpati dengan agenda lingkungan dan melanjutkan agenda ekososialis hari ini, yang terdiri atas apa yang disebut “Kiri Hijau”.

Makalah ini menekankan bahwa ada banyak untaian ekofeminisme, dan untaian yang diusulkan dalam makalah ini adalah materialis. Makalah ini tidak mengesensialisasikan dan mengidealisasikan perempuan sebagai subjek istimewa dan utama yang akan mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Sebaliknya, pendekatan materialis mengutamakan analisis struktural masyarakat dan konstruksi sosial atas realitas. Dalam kerangka analitis ini, nilai yang digali tidak hanya dari para pekerja tetapi juga dari tanah, mencakup berbagai jenis kekerasan seperti konflik bersenjata dan agresi pembangunan dalam bentuk pertambangan dan penebangan. Ini semua contoh dari apa yang dipaparkan Tony Phillips (2018) sebagai ajaran utama Ekososialisme Karl Marx: “retakan metabolik antara manusia dan alam” adalah “kontradiksi sentral kapitalisme”.

Makalah ini menambahkan bahwa gerakan-gerakan sosial juga sering dihadapkan pada konflik di antara mereka sendiri, seringkali karena alasan ideologis di mana beberapa kepentingan tertentu membenturkan satu kelompok sosial melawan kelompok sosial lainnya. Agar dapat menjawab ketegangan-ketegangan tersebut, artikel ini menyerukan bahwa penting untuk menimbang berbagai kemungkinan untuk membangun titik tumpu solidaritas dengan meninjau kekuatan-kekuatan yang sejalan atau saling bertentangan. Lebih penting lagi, membangun solidaritas berarti berfokus pada pokok utama gerakan lingkungan secara umum, yaitu menyelamatkan planet ini, sebuah tujuan yang membuat segala pertimbangan menjadi agak remeh.

REFERENSI

- Angus, Ian. 2016. *Facing Anthropocene. Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System*. New York: Monthly Review Press.
- Cooper, Timothy. 2020. "Asia's Sinking Cities Need 'Great Sea Walls' to Defend against Rising Waters, and Fast." *South China Morning Post*, 23 Januari 2020. <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3047061/asias-sinking-cities-need-great-sea-walls-defend-against-rising>.
- Burkett, Paul. 2017. "An Eco-Revolutionary Tipping Point?" *Monthly Review* 69, no. 1. <https://monthlyreview.org/2017/05/01/an-eco-revolutionary-tipping-point/>.
- Climate Central. 2019. "Flooded Future: Global Vulnerability to Sea level Rise Worse than Previously Understood." 29 Oktober 2019. <https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood>.
- Climate Change Commission. 2010. *National Framework Strategy on Climate Change 2010–2022*. Manila: Office of the President. http://climatechange.denr.gov.ph/images/DL_Files/National%20Framework%20Strategy%20on%20Climate%20Change.pdf.
- Cooper, Timothy. 2020. "Asia's Sinking Cities Need 'Great Sea Walls' to Defend against Rising Waters, and Fast." *South China Morning Post*, 23 Januari 2020. <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3047061/asias-sinking-cities-need-great-sea-walls-defend-against-rising>.
- International Green Socialist. TT. "Ecosocialist Manifesto: 2nd Draft." <https://internationalgreensocialist.wordpress.com/ecosocialist-manifesto-2nd-draft/>.
- Engels, Frederick. 1882. *Engels to Eduard Bernstein in Zurich*. Marxists Internet Archive. https://marxists.catbull.com/archive/marx-works/1882/letters/82_11_02.htm.

- Friends of the Earth Limited. 2017. "International Women's Day: Inspirational Environmentalists." 6 November 2017. <https://friendsoftheearth.uk/who-we-are/international-womens-day-inspirational-environmentalists>.
- Holleman, Hannah. 2018. "Marx's Essential Contribution to Ecosocialism." *International Socialist Review* no. 108, 1 Maret 2018. <https://isreview.org/issue/108/marxs-essential-contribution-ecosocialism>.
- Marx, Karl. 1845. "Theses on Feuerbach." Dalam *Selected Writings*, disunting oleh L. H. Simon, 98–101. Indianapolis, IN: Hackett Publishing.
- — —. 1976. *Capital Volume 1*. New York: Vintage.
- Mies, Maria. 2007. "Patriarchy and Accumulation on a World Scale—Revisited." *International Journal of Green Economics* 1, no. 3/4 (2007): 268–75. <http://doi.org/10.1504/IJGE.2007.013059>.
- Mies, Maria, and Vandana Shiva. 1993. *Ecofeminism*. London: Zed Books.
- Mies, Maria, Veronika Bennholdt-Thomsen, and Claudia von Werlhof. 1988. *Women: The Last Colony*. London dan New Jersey: Zed Books.
- Nemenzo, Ana Maria. 2019. "Opening Remarks of Ana Maria Nemenzo: Marx Bicentennial Lecture Series No. 14." 28 Maret 2019, University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, Quezon City.
- Oxfam International. 2017a. "Just 8 Men Own Same Wealth as Half the World." 16 Januari 2017. <https://www.oxfam.org/en/press-releases/just-8-men-own-same-wealth-half-world>.
- — —. 2017b. *Women's Economic Empowerment and Care (WE-CARE): An Overview*. Oxford, UK: Oxfam GB. <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620331/ar-we-care-overview-2017-300817-en.pdf;sequence=1>.
- Phillips, Tony. 2018. "Karl Marx's Ecosocialism." *Socialist Review*, April 2018. <http://socialistreview.org.uk/434/karl-marx%E2%80%99s-ecosocialism>.

- Pineda-Ofreneo, Rosalinda. 1997. *Feminist Theories and Movements*. UP Open University and UP College of Social Work and Community Development.
- Red Women's Workshop. 1974. "A Woman's Work is Never Done." *Monthly Review* 71, no. 8. <https://monthlyreview.org/2020/01/01/liberating-women-from-political-economy/>.
- Saito, Kohei. 2017. *Karl Marx's Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*. New York: Monthly Press.
- Terzakis, Elizabeth. 2018. "Marx and Nature: Why We Need Marx Now More than Ever." *International Socialist Review* no. 109 (Summer). <https://isreview.org/issue/109/marx-and-nature>.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. 2019. *Climate Impacts Top WEF's 2019 List of Risks*. Bonn, Germany. <https://unfccc.int/news/climate-impacts-top-wef-s-2019-list-of-risks>.
- United States Environmental Protection Agency. 2016. *Climate Change Impacts*. https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts_.html.

AKUMULASI PRIMITIF: PENGALAMAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA^{1*}

Arianto Sangadji²

ABSTRAK

Perampasan tanah oleh modal raksasa berbasis sumber daya alam dengan sengketa tanah yang menyertainya di Indonesia telah banyak dihimpun melalui berbagai studi, pemberitaan media massa arus utama, dan laporan-laporan organisasi nonpemerintah. Tulisan ini bertujuan mengerangakan praktik tersebut yang secara konseptual disebut akumulasi primitif (*primitive accumulation*). Mengingat adanya kontestasi perdebatan tentang konsep itu, termasuk pengenalan konsep akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) oleh David Harvey, tulisan ini menekankan pengertian akumulasi primitif di era kapitalisme kontemporer. Dengan melihat keberlanjutan historis akumulasi primitif dalam konteks perluasan reproduksi modal, artikel ini mengambil momen ekspansi modal pertambangan di Indonesia sejak masa Orde Baru.

Kata-kata Kunci: akumulasi primitif, industri pertambangan, kapitalisme, perampasan, reproduksi modal.

PENDAHULUAN

Berbagai sengketa pertanahan yang menahun dan kronis kerap terjadi menyusul ekspansi modal raksasa berbasis sumber daya alam seperti pertambangan di wilayah perdesaan. Investasi asing di sektor pertambangan yang memicu sengketa pertanahan selalu disertai dengan kekerasan berdarah, terutama sejak Orde Baru (lihat Leith, 2003;

1 * Artikel ini diambil dari publikasi sebelumnya, Arianto Sangadji. "Akumulasi Primitif: Pengalaman Industri Pertambangan di Indonesia". 2019. *Jurnal Prisma*, Vol. 38, No. 3, hal. 52-65.

2 Arianto Sangadji adalah adalah Direktur Indoprogress Institute for Social Research and Education (IISRE) dan kandidat PhD dari York University, Kanada.

Marr, 1993). Melalui berbagai regulasi pemerintah di berbagai aras, lahan-lahan pertanian yang secara tradisional dikuasai para petani dialihkan menjadi areal pertambangan. Bahkan, pada lahan-lahan tersisa yang masih dikuasai para petani, dampak lingkungan kegiatan penambangan, seperti banjir dan pencemaran, kerap melumpuhkan mata pencarian kaum tani. Tulisan ini menggunakan kerangka teori Karl Marx tentang “akumulasi primitif” untuk menerangkan operasi penambangan raksasa, yang mengambil alih tanah leluhur “suku” dan menghancurkan habitat alami, sambil menyingkirkan para pemilik tanah tradisional. Setelah mendefinisikan konsep akumulasi primitif dan menggunakannya untuk memotret kasus pertambangan Indonesia, kesimpulannya adalah konsep akumulasi primitif Marx tetap bermanfaat pada masa sekarang untuk memahami bagaimana kapitalisme memporandakan suku-suku asli dengan menggusur mereka dan, dengan demikian, perlahan-lahan menciptakan kelas pekerja tanpa tanah.

Karl Marx menggunakan “akumulasi primitif” sebagai sebuah analisis yang secara bersamaan bersifat konseptual dan deskriptif. Dia membedakan akumulasi primitif dari “akumulasi modal” (*capital accumulation*), untuk menggambarkan sebuah konsep abstrak tentang momen kelahiran kapitalisme. Di sana ada momen prakondisi untuk akumulasi modal, yakni proses pemisahan para produsen independen dari alat produksi mereka, penciptaan hak milik pribadi yang kapitalistik, dan pembentukan kelas buruh upahan bebas (lihat Marx, 1976). Akumulasi primitif merupakan proses pembentukan kelas pekerja modern, karena para petani yang kehilangan alat-alat produksi terpaksa harus menjual tenaga kerja untuk mempertahankan hidup. Tahapan tersebut mendahului akumulasi modal, yakni proses reproduksi kapital yang terus-menerus meluas (*extended capitalist reproduction*) berbasis eksploitasi kerja atau perampasan nilai lebih melalui pengisapan tenaga kerja bebas (Marx, 1976, hal. 732). Penafsiran semacam itu bertolak dari penekanan Marx di dalam *Capital*, yang menyatakan bahwa akumulasi primitif terjadi sebelum akumulasi proper. Disebut “primitif karena [mekanisme] itu membentuk prasejarah dari kapitalisme dan corak produksi yang berhubungan dengan modal” (Marx, 1976, hal. 875).

Secara historis, akumulasi primitif terutama terkait dengan proses kelahiran kapitalisme. Marx menggambarkan sejumlah pengalaman tentang penyingkiran paksa para petani dari lahan-lahan pertanian dan beralihnya mereka menjadi kelas pekerja seperti terjadi di Inggris melalui *enclosure* (Marx, 1976, hal. 885-889). Namun demikian, Marx juga mengatakan bahwa proses itu berlangsung di berbagai negeri Eropa. Menurutnya, “momen-momen berbeda akumulasi primitif terjadi secara khusus di Spanyol, Portugal, Belanda, Perancis, dan Inggris, kurang lebih secara kronologis. Momen-momen berbeda itu secara sistematis disatukan bersama pada akhir abad ke-17 di Inggris” (Marx, 1976, hal. 915). Proses tersebut dianggap (kurang lebih) telah tercapai di Eropa Barat.

Setelah Marx, muncul penafsiran berbeda tentang akumulasi primitif. Yang paling memicu debat adalah David Harvey yang memperkenalkan konsep “akumulasi melalui perampasan”. Menurutnya, banyak gambaran deskriptif Marx tentang akumulasi primitif tetap muncul hingga saat ini (Harvey, 2003, hal. 145). Bagi Harvey, akumulasi primitif bukan semata “*the original sin of capitalism*” sebagaimana digambarkan Marx, tetapi merupakan sebuah proses yang sedang berlangsung dan tetap relevan, bahkan jauh lebih kencang dalam konteks kapitalisme sekarang. Dia lantas menyebut akumulasi melalui perampasan untuk menggantikan akumulasi primitif zaman sekarang (Harvey, 2003, hal. 144). Menurutnya, “praktik-praktik kanibalistik dan predator yang sedang berlangsung, yang terjadi bahkan di negeri-negeri kapitalis maju dengan kedok privatisasi, reformasi pasar, penarikan program-program kesejahteraan, dan neoliberalisasi, lebih baik digambarkan sebagai akumulasi melalui perampasan” (Harvey, 2006a, hal. 158). Praktik tersebut terutama terjadi pada momen-momen krisis kapitalisme atau kelebihan akumulasi (*over-accumulation*; Harvey, 2003, 140-142, 149-150). Bahkan, praktik-praktik seperti itu menjadi karakter paling utama dari akumulasi (Harvey, 2003, hal. 153). Tidak mengherankan, akumulasi melalui perampasan mencakup hal yang sangat luas. Bukan hanya soal pemisahan dengan kekerasan terhadap para produsen independen dari alat produksi mereka, tetapi juga mencakup penswastan industri nasional akumulasi (Harvey, 2003, hal. 146).

Kritik terhadap konsep Harvey tentang “akumulasi melalui perampasan” banyak disuarakan para sarjana Marxis (Dunn, 2007; Fine, 2006; Wood, 2006). Kritik terutama bertalian dengan usaha Harvey memasukkan banyak hal yang secara konseptual beragam ke dalam satu kategori konsep yang disebut akumulasi melalui perampasan. Ben Fine, misalnya, menyoal hal itu dan menganggap Harvey bukan saja telah mengubah terminologi akumulasi primitif dengan akumulasi melalui perampasan (lihat Fine, 2006). Menggunakan akumulasi melalui perampasan dengan kerangka sangat luas, Harvey melihat rangkaian peristiwa yang terjadi di Cina masa sekarang sebagai contoh. Bill Dunn mengkritiknya dan menganggap pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa di Cina dewasa ini adalah manifestasi dari akumulasi modal, bukan akumulasi melalui perampasan (lihat Dunn, 2007). Terakhir, Ellen Meiksins Wood menganggap konsepsi Harvey tentang akumulasi melalui perampasan lebih mengedepankan redistribusi aset yang memungkinkan investasi ketimbang penciptaan dan pelanggaran hubungan-hubungan sosial kepemilikan (Wood, 2006, Hal. 23).

Terlepas dari konseptualisasi Harvey yang eksektif tentang akumulasi melalui perampasan sebagai substitusi terhadap akumulasi primitif dan kritik terhadapnya, konsep akumulasi primitif sendiri mengundang beragam tafsir. Sentral penafsiran apakah akumulasi primitif hanya terkait prasejarah modal atau tetap berlanjut mengikuti pertumbuhan kapitalisme? Pandangan pertama bertolak dari pernyataan Marx bahwa akumulasi primitif bukan merupakan hasil dari corak produksi kapitalis, tetapi merupakan titik berangkatnya (Marx, 1976, hal. 775). Argumen lain menganggap akumulasi primitif sebagai proses yang terus berlanjut hingga kini. Michael Perelman, misalnya, membela pandangan akumulasi primitif sebagai sesuatu yang penting dalam perkembangan kapitalisme (Perelman, 2000, hal. 369). Argumen itu setidaknya merujuk pada pernyataan Marx bahwa modal akan “menggambil alih residu akhir dari para produsen langsung yang masih memiliki sesuatu yang tersisa untuk diambil alih” (Marx, 1993, hal. 348). Jason Read, yang mencoba mendamaikan kedua pandangan tersebut, mengatakan bahwa akumulasi primitif “mencakup baik kondisi-kondisi untuk kesejarahan pem-

bentukan modal maupun perluasannya ke ruang dan corak produksi lainnya” (Reid, 2003, hal. 23).

Kesimpulan Read tentang akumulasi primitif dalam konteks perluasan modal bisa ditelusuri kerangka logikanya dalam pandangan Marx sendiri. Marx menyebut akumulasi primitif (Marx, 1976, hal. 875-75), “tiada lain dari proses sejarah pemisahan kaum produsen dari alat-alat produksi” untuk pra-kondisi akumulasi modal. Momen-momen dari proses itu harus dipahami dalam kerangka waktu dan ruang yang lebih luas dan berbeda. Pandangan tersebut selaras dengan kenyataan historis perluasan reproduksi modal—yang pada dasarnya bersandar pada eksploitasi kerja di negeri-negeri industri maju—ke negeri-negeri tempat masyarakat prakapitalis masih eksis di tengah dominasi corak produksi kapitalis. Dalam masyarakat semacam itu, produsen-produksen independen masih bertahan dalam hubungan pengupahan modern yang belum berkembang. Di sinilah akumulasi primitif terus memainkan peran penting demi akumulasi modal, terutama dengan mengorbankan para produsen kecil masyarakat non-kapitalis.

Bersandar pada argumen tersebut, konsep akumulasi primitif digunakan untuk menerangkan kenyataan historis spesifik tentang ekspansi modal atau perluasan reproduksi modal masa kini. Konsep itu berguna untuk secara khusus menerangkan momen historis dalam industri ekstraksi sumber daya alam. Tulisan ini menyoroti secara terbatas pengalaman khusus pertambangan raksasa PT Freeport Indonesia di Papua dan PT Inco (sekarang: PT Vale) di Sulawesi pada masa-masa awal operasi kedua perusahaan.

MOMEN HISTORIS PERLUASAN REPRODUKSI MODAL

Investasi pertambangan skala besar di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari perluasan reproduksi modal dalam skala global. Itu terjadi karena modal pertambangan yang diinvestasikan di dalam teritorial Indonesia merupakan ekspor modal atau investasi asing langsung (*foreign direct investment*), yakni modal yang secara umum dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional asal negeri kapitalis maju. Ekspor modal tidak lain dari usaha korporasi untuk mengurangi ongkos pro-

duksi komoditas dengan memanfaatkan buruh murah dan kemudahan akses ke deposit mineral yang terletak di teritorial negara lain.

Ekspor modal dari negeri-negeri kapitalis maju yang kemudian mengendalikan kekayaan sumber daya alam di Indonesia telah berlangsung sejak zaman prakemerdekaan. Pertambangan batu bara, timah, dan minyak bumi sudah berkembang sejak abad ke-19 dan kian menonjol sejak paruh pertama abad ke-20 (lihat Braake, 1977; Reed, 1958; Lindblad, 1989; Heidhues, 1992; Gerretson, 1955). Meningkatnya nasionalisme sumber daya alam (*resource nationalism*)—pandangan tentang kedaulatan negara serta kontrol eksklusifnya atas sumber daya alam dan perlawanan terhadap modal luar negeri—khususnya di sektor pertambangan, di tengah peningkatan sentimen anti-imperialisme Barat pada dekade-dekade awal pasca kemerdekaan membuat investasi di sektor ini tidak berkembang. Jatuhnya Soekarno dan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya (lihat Simpson, 2008), memberi karpet merah bagi reintegrasi wilayah Indonesia ke dalam sirkuit akumulasi global, terutama melalui ekspor modal pertambangan.

Dengan negara berfungsi memastikan dan mempertahankan reproduksi modal, dan karena itu penyebutan “kedaulatan negara” menjadi problematik, maka kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang menarik investasi asing di sektor pertambangan tidak bisa dihindari. Setidaknya, dua kondisi penting yang saling terkait mendasarinya. Pertama, sifat dasar kapitalisme yang terkait dengan industri pertambangan. Sebagaimana diketahui, investasi pertambangan memerlukan proporsi yang lebih besar dari elemen-elemen tetap modal konstan (*constant capital*), seperti bangunan pabrik, mesin, bahan baku, infrastruktur, dan lain-lain. Hal itu karena karakteristik teknis yang berbeda dan kompleks dari ekstraksi mineral. Karena teknologi dan metode produksinya, kekhasan industri pertambangan selalu bersifat padat modal. Dengan aspek-aspek teknis dan finansial dari investasi menjadi sentral, maka negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia, tidak memiliki atau punya kapasitas yang terbatas. Pada gilirannya, padat modal mencerminkan kekuatan objektif modal internasional yang monopolistik. Kekuatan objektif itu berbarengan dengan kekuatan politiknya memungkinkan mo-

dal pertambangan dapat mengeruk lebih banyak keuntungan dengan menurunkan tingkat sewa (*rent*) di negara tuan rumah.

Kedua, perubahan hubungan kelas yang terjadi pada skala global. Itu terutama merujuk pada kebangkitan kembali imperialisme setelah penghancuran PKI sebagai hasil historis perjuangan kelas. Segera setelah kekalahan total PKI dan reintegrasi Indonesia ke orbit Barat, pembangunan yang kapitalistik kian meninggi di bawah kondisi opresi politik. Itu adalah era dengan kedaulatan negara secara substansial terkikis dalam kaitannya dengan tekanan eksternal modal asing. Kelahiran rezim Soeharto menandai peran negara nasional dalam memfasilitasi dan melindungi sebagian kecil modal transnasional tertentu di sektor pertambangan. Demi perluasan reproduksi modal transnasional, negara meliberalisasi kebijakan ekstraksi mineral. Di bawah kemerosotan ekonomi pada paruh kedua tahun 1960-an, rezim militer yang berorientasi Barat itu berusaha “menyehatkan” kembali tatanan kapitalis dengan memperkenalkan kebijakan moneter, fiskal, investasi, yang mendukung aliran masuk modal pertambangan global.

Aspek paling utama dari kebijakan tersebut adalah pemberlakuan Kontrak Karya (KK) dengan perusahaan-perusahaan asing di sektor pertambangan (lihat Sembiring, 2009; Poeradisastra dan Haryanto, 2016). Secara prinsip, tujuan KK adalah menarik sebanyak-banyaknya investasi pertambangan asing. Pemerintah memberlakukan status hukum *lex specialis* KK, di mana ketentuan-ketentuan tentang kontrak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dengan demikian, apa pun perubahan kebijakan atau peraturan di masa depan, pemerintah harus mematuhi kontrak yang sudah berlaku. *Lex specialis* merupakan insentif yang memungkinkan para penambang dapat melindungi diri dari kepastian hukum untuk investasi jangka panjang dan karenanya bisa mengeruk laba yang besar. Singkat kata, KK menciptakan dan membentuk lanskap sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, yang menunjang akumulasi modal global di sektor pertambangan.

Untuk mengimbangi risiko investasi asing langsung di sektor pertambangan, KK memberikan konsesi yang aman, panjang, dan menguntungkan. KK memungkinkan perusahaan-perusahaan pertambangan transnasional memiliki kendali atas tanah skala besar dengan deposit

mineral yang kaya di Nusantara. Itu juga menawarkan perusahaan untuk memiliki konsesi jangka panjang. Dengan demikian, KK tidak lebih dari upaya rezim Orde Baru dalam mengalokasikan deposit mineral untuk mengamankan proses akumulasi yang dikendalikan oleh perusahaan pertambangan transnasional. Akan tetapi, memberikan hak atas kekayaan mineral tidak selalu berarti perusahaan transnasional mengambil langkah cepat untuk mengekstraksi mineral. Sebaliknya, itu hanya mengamankan perusahaan monopolistik dengan memiliki hak eksklusif atas properti mineral (lihat Bina, 1985, hal. 231). Dengan demikian, mencegah pesaing lain untuk mengontrol deposit mineral serta mencegah potensi penurunan harga karena produksi komoditas melimpah di pasar. Itu mencerminkan fitur utama hubungan antara negara dengan modal dalam industri pertambangan. Dalam hal itu, negara menawarkan hak eksklusif modal untuk memiliki potensi cadangan mineral skala besar.

Sebagai imbalannya, pemerintah membebaskan perusahaan dengan berbagai bentuk sewa (*rent*) yang memungkinkan akumulasi. Perusahaan membayar royalti (berdasarkan mineral yang ditambang atau dijual atau pendapatan penjualan) dan berbagai bentuk pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pemotongan pajak atas dividen, bunga, sewa, pajak atas tanah dan bangunan, bea materai, bea impor, dan sewa tanah berdasarkan jumlah hektar di area konsesi. Apa yang kita lihat adalah bahwa KK menawarkan persyaratan pajak yang “stabil.” KK memberikan insentif pajak dan fiskal yang dalam beberapa kasus berupa pembebasan pajak, pengurangan tarif, bahkan pembebasan dari berbagai bentuk pajak. Selama Orde Baru, untuk memberikan iklim yang menguntungkan bagi daya saing investasi pertambangan global, sering terjadi penyesuaian syarat dan ketentuan dalam KK. Pada saat yang sama, penyesuaian juga dilakukan untuk melayani kepentingan negara untuk sewa yang lebih baik. Penyesuaian itu disebut “Generasi KK” yang untuk generasi selanjutnya cenderung memberi sedikit lebih banyak manfaat bagi penerimaan negara melalui kenaikan berbagai bentuk pajak. Namun demikian, secara umum, dapat digarisbawahi bahwa karena “sistem pajak hanyalah bentuk khusus dari kekuasaan kelas” (lihat O’Connor, 2002), KK hanya mencerminkan se-

buah kekuasaan imperatif dari perusahaan-perusahaan pertambangan transnasional dalam kaitannya dengan negara pasca-1965.

Kebijakan integrasi kapitalis global telah membantu menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama investasi pertambangan berskala dunia. Sejumlah perusahaan pertambangan transnasional yang beroperasi melalui anak perusahaan, seperti Freeport-McMoRan Copper and Gold, Rio Tinto, Newmont, dan Inco, mendapat banyak manfaat dari kebijakan tersebut. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto, dua proyek KK sudah berjalan yang dimulai dengan penerbitan Generasi Pertama KK (7 April 1967) dengan perusahaan AS Freeport Sulphur (sekarang: Freeport-McMoRan) di Papua Barat. Perusahaan itu menjadi kontraktor eksklusif tambang Erstberg di wilayah seluas 10 kilometer persegi. Sementara memasukkan wilayah itu ke dalam akumulasi global Freeport-McMoRan Copper and Gold yang berbasis di Arizona, Provinsi Papua kemudian menjadi wilayah paling termiliterisasi, karena kontra-insurgensi militer Indonesia melawan perjuangan panjang kemerdekaan Papua Barat.³

Menariknya, pemerintahan Soeharto menerima rancangan KK yang sejak awal disiapkan pihak Freeport. Dengan kontrak itu, pemerintah ingin menarik investasi asing dan merengkuh dukungan internasional (Leith, 2003, hal. 60).² Karena diterbitkan sebelum berlakunya UU No. 11/1967 tentang Pertambangan, syarat dan ketentuan KK itu sendiri berasal dari UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (Simpson, 2008, hal. 234). Ciri terpenting undang-undang ini adalah bahwa kontrak tersebut mencegah Freeport dari ancaman nasionalisasi seperti pengalaman perusahaan-perusahaan milik asing di bawah rezim Soekarno. KK tersebut juga menegaskan bahwa setiap perselisihan yang tidak bisa dirundingkan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Freeport akan

3 Konteks kehadiran pertambangan Freeport di Papua dan kekerasan bersenjata yang muncul di sana perlu dipahami dari sisi geopolitik lebih luas. Militerisasi wilayah pertambangan terkait dengan gerakan kemerdekaan Papua. Gerakan itu sebenarnya merupakan reaksi terhadap integrasi Papua ke dalam wilayah teritori Indonesia melalui sebuah proses plebisit yang dilakukan secara tidak transparan dan demokratis. Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat dan Australia mendukung integrasi wilayah bekas jajahan Belanda itu, yang dianggap oleh orang-orang Papua sebagai pengkhianatan terhadap mereka; lihat, Patricia O'Brien, "The Politics of Mines and Indigenous Rights: A Case Study of the Grasberg Mine in Indonesia's Papua Prov-ince", dalam *Georgetown Journal of International Affairs*, Winter/Spring, 2010, hal. 47-56; lihat juga *New Internationalist*, Mei 2017, hal. 124.

diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional. Memiliki kontrak untuk area seluas lebih dari 250,000 are untuk jangka waktu tiga puluh tahun, korporasi memperoleh manfaat yang sangat luar biasa. “Hak istimewa” tersebut termasuk pembebasan dari sewa tanah dan royalti, pembebasan pajak perusahaan selama tiga tahun, tidak ada keharusan divestasi, tidak ada kewajiban kompensasi untuk penduduk lokal yang terdampak, dan tak ada standar restriksi pengelolaan lingkungan. Pada 1991, pemerintah dan korporasi memperbarui kontrak untuk 30 tahun berikutnya, yang akan berakhir pada Desember 2021. Syarat dan ketentuan kontrak baru bergeser dari generasi pertama ke generasi kelima. Kontrak tersebut mensyaratkan divestasi sebagian saham kepada entitas domestik dan pembangunan *smelter* dalam negeri (Leith, 2003, hal. 60-61, 68). Luas KK saat ini mencakup 212,950 hektar, berkurang dari 2.6 juta hektar berdasarkan KK Kedua tahun 1991. Pada Desember 2015, salah satu perusahaan terbesar di negara ini mengendalikan cadangan tembaga dan emas masing-masing sebesar 28 miliar pon dan 26 juta ons.

Investasi Freeport memang sangat menguntungkan. Freeport Indonesia, anak perusahaan dari perusahaan tambang terbesar kesembilan yang terdaftar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2014 (PWC, 2015, hal. 42-43), mendaku telah menghabiskan investasi sebanyak 8.6 miliar dolar AS sejak hari-hari awal operasinya di salah satu wilayah pertambangan emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Buah keuntungan yang diraup perusahaan amat sangat banyak. Pada 2013, rata-rata keuntungan perusahaan sebelum pajak setiap pekerja adalah 115,138 dolar AS (Sangadji, 2017). Karena industri “pengerukan” tambang tersebut menggambarkan karakter spesifik hubungan antara modal dan negara dalam produksi nilai lebih maka kita juga perlu memperhatikan arus nilai lebih yang mengalir ke negara. Freeport sendiri mendaku kontribusinya kepada Pemerintah Indonesia—melalui dividen pemerintah, royalti, dan berbagai jenis pajak—sejak 1992 hingga 2015 mencapai 16.1 miliar dolar AS (Freeport, 2016).

Perusahaan pertambangan transnasional kedua yang memperoleh manfaat dari iklim investasi baru di Indonesia adalah Inco Limited Kanada, salah satu produsen nikel terbesar di dunia saat itu. Penting digarisbawahi bahwa iklim yang menguntungkan dari kebijakan peme-

rintah bukan satu-satunya faktor yang menarik investasi. Persaingan antar-perusahaan monopolistik adalah faktor lain. Sebagai produsen nikel terkemuka dunia selama puluhan tahun, Inco mulai menghadapi persaingan ketat sejak akhir tahun 1960-an. Sejak tahun 1970-an, dengan rasio produksi tambang dunia laterit terhadap sulfida meningkat, kontribusi Inco terhadap produksi nikel olahan dunia justru menurun (Cairns, 1984). Sejalan dengan itu, keputusan perusahaan untuk masuk ke negara-negara dengan cadangan laterit berlimpah, yakni Indonesia dan Guatemala pada tahun 1960-an, adalah bagian dari upaya untuk mengatasi tumbuhnya tekanan internal terkait keresahan tenaga kerja, biaya keuangan, dan krisis di Kanada (Bradbury, 1985).

Sejak tahun 1950-an terjadi serangkaian pemogokan di tambang-tambang Inco dan lokasi pabrik pengolahannya. Pada akhir 1959, berlangsung aksi mogok selama tiga bulan di Sudbury dan Port Colborne Ontario. Sekitar 14,500 pekerja pabrik, peleburan, dan tambang melakukan pemogokan menuntut kenaikan upah dan tunjangan tambahan. Pada akhir 1969, lebih dari 15,800 pekerja pabrik baja Inco di Sudbury melakukan pemogokan selama empat bulan menuntut peningkatan upah dan tunjangan.⁴ Dengan demikian, ekspansi kapital sejalan dengan pandangan David Harvey tentang "*spatial fix*" untuk mengatasi momen akumulasi yang berlebihan (*over-accumulation*) atau krisis secara berkala (Harvey, 2006b; Bradbury, 1985). Ekspansi tersebut menunjukkan dengan tepat reaksi kelas-kelas kapitalis yang bersaing dengan "perkembangan perjuangan kelas [buruh] yang tidak merata secara spasial" (Peet, 1984). Dengan mengekspor modal ke negara-negara dengan tingkat keuntungan lebih tinggi, karena super-eksploitasi di bawah kondisi politik yang represif terhadap kelas pekerja, perusahaan akan memompa keuntungan yang jauh lebih besar.

Pada 1968, tidak seperti Freeport, Inco memperoleh KK jangka panjang pertama berdasarkan syarat dan ketentuan "Generasi Kedua" setelah memenangkan penawaran terhadap penawar utama lainnya, yaitu kombinasi Soci  t   Le Nickel dari Perancis dan Kaiser Aluminium Co dan Sumitomo yang berpusat di AS. Setelah memperoleh KK, su-

⁴ Lihat, Minister of Supply and Service Canada, *Strikes and Lockouts in Canada* (Ottawa: Canadian Government Publishing Center, 1978).

rat kabar terkemuka Kanada mencirikan investasi Inco dapat menjadi “bagian penting dari ujian kapitalisme internasional di Indonesia”. Inco Indonesia, anak perusahaan Inco Limited, mendapat hak penambangan untuk area konsesi di belahan timur Sulawesi yang kaya akan nikel. Inco Indonesia memegang 75 persen saham dan perusahaan Jepang berbagi sisanya, menandatangani KK dengan Pemerintah Indonesia untuk area seluas 6.6 juta hektar di Sulawesi. Periode kontrak selama 30 tahun dimulai sejak produksi komersial. Inco Indonesia telah mengembangkan proyek tambang dan peleburan terintegrasi, termasuk jalan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pelabuhan, lapangan terbang, dan lain-lain, di Sorowako, Sulawesi Selatan sejak tahun 1970-an. Pada 1996, perusahaan menandatangani perjanjian perpanjangan kontrak dengan pemerintah Soeharto selama 30 tahun hingga 2025. Area konsesinya saat ini sekitar 118,435 hektar. Memonopoli wilayah sangat luas dengan cadangan bijih nikel laterit terbukti 100.8 juta ton pada 2014, perusahaan itu telah menambang dan meleburkan nikel dalam matte, produk setengah jadi. Perlu diketahui bahwa segera setelah akuisisi historis Vale atas Inco Limited pada 2006, Inco Indonesia kemudian menjadi Vale Indonesia, anak perusahaan Vale Canada. Saat ini, Vale Canada memegang 58.73 persen saham dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd memegang 20.09 persen. Sementara itu, lebih dari 20 persen diperdagangkan di bursa saham Indonesia sejak 1990. Di tengah kecenderungan konsentrasi kepemilikan global dalam industri pertambangan, Vale menjadi anggota dari salah satu perusahaan terbesar dunia.

Penting dicatat bahwa Inco/Vale mengeruk keuntungan sangat besar dari investasinya di Indonesia. Bila diukur dari laba sebelum pajak atas kapitalisasi pasar, maka tingkat rata-rata laba selama sembilan tahun hingga 2012 adalah tinggi. Dengan merujuk laporan resmi perusahaan, tingkat keuntungan menunjukkan sekitar 15 persen. Khusus tahun 2007, di tengah lonjakan harga nikel dunia, tingkat keuntungan mencapai 16.3 persen. Lebih jauh, rata-rata tingkat pengembalian modal selama sepuluh tahun hingga 2011 adalah sekitar 34 persen, dan khusus untuk tahun 2017 mencapai 108 persen (lihat Sangadji, 2017).

MOMEN HISTORIS AKUMULASI PRIMITIF

Terempas dari Tanah

Ketika produksi kapitalis berbasis sumber daya alam membutuhkan akses yang aman ke tanah dan sumber daya di dalamnya sebagai kondisi yang diperlukan untuk reproduksi modal, maka segala bentuk hambatan spasial harus dihilangkan. Salah satu hambatan utama adalah adanya klaim kepemilikan prakapitalis—kolektif atau sosial—atas tanah. Dengan demikian, ekstraksi mineral berbasis properti individu yang kapitalistik mensyaratkan pengambilalihan kontrol atas properti non-kapitalis. Untuk itu, kendati penduduk mendapat manfaat dari akses tradisional ke tanah untuk mata pencarian mereka, perusahaan-perusahaan pertambangan dengan mudah mengempaskan mereka. Perampasan tanah adalah cara paling umum. Selain itu, dampak ekologis penambangan, yang dalam ekonomi arus utama dikenal sebagai “ekternalitas negatif”, pada dasarnya dapat melumpuhkan kehidupan ekonomi para produsen independen, seperti para petani tradisional. Akses tradisional mereka ke tanah, hutan, sungai, danau, laut menjadi tidak produktif. Jadi, tanpa perampasan tanah sekalipun, penghancuran ekonomi masyarakat non-kapitalis dapat terjadi di wilayah sekitar pertambangan.

Gambaran tersebut terjadi di Papua menyusul kehadiran Freeport sejak 1967. Dengan areal KK yang luas untuk penambangan, pembangunan jalan, jembatan, pabrik pengolahan, pelabuhan, lapangan terbang, kota tambang, dan berbagai infrastruktur lain, tak pelak mengubah dan mengganggu lanskap yang secara tradisional dikuasai suku-suku asli setempat. Hal tersebut dapat terjadi karena KK dilahirkan tanpa konsultasi dengan para pemilik lahan tradisional. Di bawah dukungan dan represi Orde Baru, perusahaan tentu dapat dengan mudah mengabaikan klaim hak-hak tradisional atas tanah oleh suku-suku asli, seperti Amungme dan Komoro. Sebagaimana dikatakan Leith, “Freeport sama sekali tidak peduli dengan hak-hak para pemilik tanah ...” (Leith, 2003, hal. 8). Padahal, konsesi perusahaan untuk penambangan emas dan tembaga terletak di atas tanah tradisional mereka. Suku Amungme, misalnya, adalah “pemilik” tanah di areal pertambangan dataran tinggi Grasberg dan Ertsberg, pabrik pengolahan, dan kota

pertambangan Tembapapura. Suku Komoro menguasai wilayah yang kemudian menjadi areal konsesi Freeport, dari Puncak Jaya ke wilayah pesisir. Wilayah-wilayah tersebut mencakup tempat deposit *tailing*, Kota Timika, Kota Kuala Kencana, dan areal menuju ke Pelabuhan Amamapere (Leith, 2003, hal. 85-87). Dengan demikian, kehidupan tradisional mereka terganggu oleh kehadiran deru mesin, bangunan, dan jalan terkait dengan aktivitas pertambangan (Ballard, 2002; Marr, 1993; Abrash dan Kennedy, 2001). Operasi perusahaan memporandakan kegiatan-kegiatan subsistensi pertanian, termasuk aktivitas pengumpulan hasil hutan dan perburuan. Belum lama berselang, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk asli Papua selama 50 tahun beroperasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan bahwa Freeport tidak pernah membayar kompensasi kepada para pemilik lahan di Mimika, yakni suku Amungme (Singgih, 2017).

Sebagaimana diketahui, penambangan skala besar memiliki daya rusak lingkungan yang luas. Freeport dikenal memiliki reputasi buruk dalam pengelolaan lingkungan di Papua selama beberapa dekade. Sudah banyak dilaporkan tentang pencemaran air, terutama bersumber dari pembuangan limbah *tailing* dalam jumlah besar ke sungai-sungai yang bermuara di Laut Arafura (Leith, 2003, hal. 166-171). Penduduk asli yang menggantungkan harapan hidup dari ekosistem Sungai Ajkwa juga sangat terganggu dengan operasi Freeport. Sedimentasi dalam jumlah besar mencapai bagian hilir sungai dan merusak ekosistem hutan, tempat suku Koperakopa selama ini menggantungkan harapan hidup. Selain mengusik keberadaan pohon sagu yang merupakan sumber pangan utama, hutan yang menjadi dan menyediakan sumber obat tradisional, material bangunan rumah dan perahu, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan areal penangkapan ikan, juga terganggu (Marr, 1993, hal. 79).

Tidak mengherankan, pelbagai protes bermunculan sejak awal kehadiran Freeport. Pada 1973, protes menentang pembangunan perumahan di Kota Tembapapura pecah. Warga yang marah mencoba menghadang proses pembangunan. Protes itu dan protes lain yang sudah berlangsung sebelumnya memaksa Freeport untuk membuat kesepakatan yang dikenal sebagai "Kesepakatan Januari 1974." Isinya,

antara lain, perusahaan akan membangun sekolah dan klinik kesehatan, selain memberi fasilitas dan kesempatan kerja bagi penduduk lokal (Marr, 1993, hal. 73). Sebagaimana direkam Chris Ballard, secara formal kesepakatan itu melibatkan Freeport, para pejabat sipil dan militer, serta pemuka masyarakat adat Amungme. Namun demikian, kesepakatan tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan yang memadai dari para pemuka masyarakat tentang implikasi yang akan terjadi. Para pemuka adat bahkan mendaku diintimidasi oleh aparat keamanan untuk menerima kesepakatan. Tidak mengherankan, kendati kesepakatan sudah ditandatangani, ketidakpuasan terus meluap di tengah ekspansi pertambangan dan pengembangan infrastruktur penunjang. Orang Amungme tersingkir dari areal pertambangan dan wilayah-wilayah mereka yang lain. Itu memicu kerusuhan dekat Tembagapura pada November 1976 dan kemudian “pemberontakan” pada Juni 1977, ketika penduduk desa mengusir dua polisi di Desa Akimuga. Sebagai tanggapan, tentara memberondong desa itu dengan dua pesawat serang darat Bronco. Beberapa hari kemudian, gerakan pemberontak atau perlawanan OPM membalas dengan menyerang fasilitas Freeport. Tentara menanggapi lebih keras dengan memberondong Akimuga berulang kali dan membunuh sekitar 30 penduduk desa. Permukiman Amungme di Waa, di Timika, dan di sepanjang Tembagapura, diratakan dengan tanah (Lihat Ballard, 2001; Ballard, 1996). Sejarah selanjutnya adalah sejarah tentang kekerasan berdarah yang langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan operasi Freeport.

Beroperasi di wilayah tempat gerakan pembebasan nasional Papua, konflik antara perusahaan dan penduduk asli Papua berlangsung tumpang-tindih dengan kekerasan kontra-insurgensi Jakarta, yang didukung Washington, di wilayah KK Freeport. Di areal sekitar penambangan Freeport, terjadi pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan pemerkosaan dalam operasi penumpasan gerakan pembebasan nasional Papua, pelanggaran hak-hak kultural dan hak-hak subsisten penduduk asli (Lihat Abrash dan Kennedy, 2001). Semua itu dapat dengan mudah terjadi karena kehadiran aparat keamanan Indonesia dalam jumlah besar di wilayah KK Freeport. Fakta bahwa Freeport Indonesia secara resmi menggelontorkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk aparat kea-

manan Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh proteksi keamanan dalam operasi penambangannya (Lihat Freeport McMoran Copper and Gold Inc, Annual Reports, 2003-2016). Proteksi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa Freeport dapat terus beroperasi di tengah penduduk setempat yang dirugikan dan dikecewakan oleh kehadiran perusahaan.

Pengalaman serupa ekspansi modal pertambangan Freeport di Papua juga terjadi di Sula-wesi Selatan menyusul kehadiran Inco sejak 1968. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah konsesi Inco di sekitar Danau Matano yang kaya dengan deposit nikel laterit, pernah ditambang dalam waktu relatif singkat oleh Mijnbouw Maatschappij Celebes (MMC) awal tahun 1940-an (Lihat Braake, 1977). Berbeda dengan Freeport, tempat kekerasan bersenjata antara aparat keamanan Republik Indonesia dan organisasi pembebasan Papua berlangsung di sekitar wilayah konsesinya, areal konsesi Inco Indonesia merupakan bekas wilayah yang dikuasai oleh gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Kahar Muzakar (Lihat Harvey, 1974). Kendati Kahar dilaporkan sudah tewas pada 1965, ketika Inco memperoleh KK dan para surveyornya sedang melakukan kegiatan eksplorasi, gangguan keamanan secara sporadis masih terjadi di sekitar Danau Matano (Abubakar dan Muis, 2002). Akan tetapi, yang penting untuk diperhatikan, gara-gara DI/TII, kehidupan suku-suku kecil kawasan itu, seperti Orang Sorowako dan Orang Karonsi'e Dongi, menjadi kocar-kacir. Mereka harus meninggalkan kampung halaman dan kembali setelah wilayah itu jatuh di tangan Jakarta. Inco hadir di tengah situasi seperti itu.

Sebagai areal yang sangat terisolasi di tengah Pulau Sulawesi sebelum kehadiran Inco, wilayah pusat aktivitas perusahaan, dihuni beberapa suku kecil yang menyandarkan kelangsungan hidup masing-masing dari kegiatan perladangan, persawahan, dan pengumpulan hasil hutan. Salah satu suku yang penting adalah Orang Sorowako yang tinggal di tepi Danau Matano. Secara kultural dan linguistik mereka punya hubungan dengan Orang Mori di Sulawesi Tengah, tetapi Orang Sorowako berada di bawah pengaruh kuat Bugis (Robinson, 1986, hal. 1). Suku yang lain adalah Orang Karonsi'e Dongi, juga bermukim di tepi Danau Matano. Seperti tetangga mereka yang Orang Sorowako, Orang Karonsi'e

Dongi secara kultural dan linguistik dekat dengan Orang Mori. Perbedaannya, Orang Sorowako menganut Islam, sedangkan Orang Karonsi'e Dongi penganut Kristen. Dengan wilayah konsesi yang sangat luas dan kebutuhan untuk membangun infrastruktur penunjang operasi penambangan, maka masalah tumpang-tindih lahan perusahaan dengan lahan yang secara tradisional dikuasai oleh para petani, terutama kedua suku tersebut, menjadi pemandangan biasa.

Pencaplokkan tanah milik penduduk asli setempat oleh Inco tidak bisa dicegah. Industri pertambangan raksasa Inco mencakup penggunaan lahan sangat luas dan kompleks, seperti kegiatan penambangan terbuka, pembangunan dan pengoperasian pabrik peleburan nikel setengah jadi, dan pembangunan kota tambang Sorowako, infrastruktur penunjang berupa jalan, lapangan terbang, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), lapangan golf, dan lain-lain. Seluruh hal tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan pertanian subsisten penduduk sekitar. Sejak awal kehadiran PT Inco di Sorowako, proyek pembangunan jalan dan pengerukan tanah yang dilakukan perusahaan ini berdampak langsung terhadap kehidupan para petani (Robinson, 1986, hal. 178-188). Metode penambangan terbuka di perbukitan yang mengelilingi Danau Matano juga memerlukan lahan yang luas, baik untuk kegiatan penambangan itu sendiri maupun pembuangan limbah. Akibatnya, warga yang bergantung pada padi sawah, perladangan, dan pengumpulan hasil hutan nonkayu, teralienasi dari lahan-lahan tradisional mereka. Pembangunan PLTA Larona berkapasitas 165 MW untuk memasok kebutuhan listrik perusahaan dengan membendung Sungai Larona justru menenggelamkan lahan pertanian, rumah, dan tempat ibadah puluhan kepala keluarga di tepi Danau Towuti (Aditjondro, 1998, hal. 37-38). Pembangunan lapangan golf milik perusahaan dan perumahan karyawan perusahaan (berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri) berlangsung di atas permukiman dan lahan pertanian Orang Karonsi'e Dongi. Suku yang secara bertahap kembali ke Sorowako setelah berakhirnya pemberontakan DI/TII itu, mendapati bekas desa mereka sudah berubah total (Lihat Sangaji, 2002; Tyson, 2008). Wilayah yang didaku sebagai wilayah tradisional mereka, seperti Kopatea dan Bumi Perkemahan, kini menjadi bagian dari wilayah KK PT Inco (Tyson, 2008, hal. 216-218).

Walaupun tidak sebrutal seperti di Papua, kehadiran Inco menimbulkan konflik pertanahan yang berlarut-larut yang juga diperparah oleh kerumitan dan ketidakjelasan masalah kompensasi lahan. Saat kali pertama membangun Kota Sorowako, pemerintah “membujuk” sekitar 200 petani untuk melepaskan tanah dengan harga sangat rendah (Lihat Aditjondro, 1982). Namun demikian, sampai dengan tahun 2000, penduduk Sorowako masih menyoal kompensasi lahan yang belum selesai sejak 1974. Pada April 2000, atas dukungan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pekerja Inco di Kanada, salah seorang warga Sorowako bernama Andi Baso mengadakan hal itu dalam rapat umum pemegang saham Inco Ltd, induk Inco Indonesia, di Toronto (Sangadji, 2002, hal. 147-148). Dua puluh tahun sebelumnya (1980), sekitar 95 rumah tangga pertanian yang tinggal di tepi Danau Towuti menuntut Inco memberi kompensasi atas penggenangan lahan persawahan, kebun kelapa, rumah, dan masjid mereka, karena pembangunan bendungan PLTA Larona (Aditjondro, 1998, hal. 37-38). Sementara itu, Orang Karonsi'e Dongi masih harus berjuang keras untuk memperoleh penguasaan klaim wilayah mereka yang sudah dikonversi menjadi areal konsesi KK (Tyson, 2008, hal. 194-222).

Menjadi Kelas Pekerja

Syarat utama munculnya kelas pekerja di daerah perdesaan adalah pemisahan petani dari alat produksi, yakni tanah. Orang-orang yang kehilangan kendali atas tanah akan pergi ke pasar kerja untuk menjual tenaga kerjanya. Mereka beralih dari produsen pertanian independen menjadi kelas proletariat modern. Perluasan progresif kapitalisme industri ke daerah perdesaan yang mengambil bentuk industri skala besar berbasis sumber daya alam biasanya menggusur kaum tani dan membuka peluang bagi mereka untuk menjadi proletariat modern. Namun demikian, mereka hanya akan menjual tenaga kerja jika berada dalam keadaan bebas. Bebas di sini dalam pengertian tidak memiliki apa pun lagi untuk mempertahankan hidup, kecuali dengan menjual tenaga kerja.

Di Papua, penduduk asli setempat di areal penambangan Freeport, yang terkena dampak langsung perusahaan itu, tidak serta-merta beralih dari produsen independen sektor pertanian tradisional ke buruh

upahan di sektor pertambangan modern. Sejak awal beroperasi di wilayah yang sangat terisolasi, perusahaan diperhadapkan dengan pilihan untuk mempekerjakan buruh dari penduduk lokal yang terdampak. Akan tetapi, dengan kualifikasi dan keahlian tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak perusahaan, penduduk setempat mengalami kesulitan untuk menjual tenaga kerjanya. Salah satu butir Kesepakatan Januari 1974 tentang pemberian peluang pekerjaan kepada penduduk lokal merupakan antisipasi terhadap ketidakpuasan yang menyebar di kalangan warga yang terdampak. Awal tahun 1970-an, ada sekitar 40-200 orang Amungme dipekerjakan secara temporer oleh Bechtel, perusahaan kontraktor Freeport Indonesia (Ballard, 1996, hal. 25). Sejak awal, Freeport tergantung pasokan tenaga kerja dari luar Papua dan sangat sedikit melibatkan penduduk di sekitar pertambangan. Itu memantik komplain orang Papua tentang perusahaan yang terlalu banyak mempekerjakan buruh asal Jawa. Pada 1991, perusahaan mempekerjakan orang Indonesia sekitar 95 persen dari total buruh dan 13 persen di antaranya orang Papua (Far Eastern Economic Review, 1991, hal. 47-48). Pada tahun itu, menurut Michael Howard, Freeport mempekerjakan sekitar 7.500 orang yang ditempatkan di asrama dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Pada awalnya sulit “mengajak” pekerja ke lokasi yang terisolasi, namun masalah ini berhasil diatasi dengan menawarkan upah yang menarik. Umumnya pekerja administrasi dan manajemen adalah orang Amerika, sedangkan sebagian besar pekerja operasional tambang adalah orang Indonesia. Hanya sedikit warga dari sekitar tambang yang dipekerjakan oleh perusahaan. Sekitar 1.500 pekerja adalah orang Papua, mayoritas merupakan kelompok etnis yang mahir mencari pekerjaan di luar ekonomi tradisional mereka, seperti orang-orang dari Biak dan tempat-tempat lain di sekitar Teluk Cenderawasih (Lihat Howard, 1994).

Di Sorowako, proses proletarianisasi berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang. Penduduk setempat yang kehilangan tanah atau kegiatan pertanian independen tidak serta-merta bangkrut, karena dampak pertambangan beralih menjual tenaga kerjanya. Mereka masih memiliki lahan pertanian lain yang memang jauh lebih terbatas untuk dimanfaatkan, kendati selalu di bawah peningkatan tekanan untuk melepaskannya melalui mekanisme jual beli. Di lain pihak, perusahaan

tambang yang padat modal memerlukan pekerja dengan kualifikasi keahlian tertentu yang sulit dipenuhi penduduk setempat. Di perusahaan Inco, orang Sorowako dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang terbatas bekeja untuk perusahaan atau perusahaan-perusahaan kontraktor di pelbagai bidang yang memerlukan keahlian tinggi. Kathryn Robinson menggambarkan karakter umum orang Sorowako yang bekerja di Inco, “paling kurang ahli, penerima upah paling murah, paling terisap, dan paling terbatas kesempatan naik posisi melalui akses ke pelatihan yang disediakan Inco” (Robinson, 1986, hal.139-140). Hingga permulaan abad ini, sedikit penduduk asli Sorowako yang bekerja di perusahaan Inco, hanya 143 orang dari jumlah total penduduk Sorowako yang 2.549 jiwa. Selain sebagai buruh di lapangan dan pabrik peleburan, beberapa di antara mereka menempati pekerjaan klerikal. Namun, mereka merasa diperlakukan tidak adil, karena dengan tingkat pendidikan yang sama dan pengalaman kerja lebih lama kerap ditempatkan di posisi lebih rendah dibanding buruh lain dengan kualifikasi yang sama. Tidak mengherankan, aksi-aksi protes agar perusahaan mempekerjakan lebih banyak warga Sorowako terus berlangsung sejak 1998 (Sangaji, 2002, hal. 151-152). Penduduk lain dari suku-suku kecil yang hidup di sekitar Inco/Vale, seperti Orang Karonsi’e Dongi, Orang Padoe, dan Orang Tambée, sangat sedikit yang bekerja di perusahaan. Pada Juli 2013, dalam wawancara mendalam dengan saya, dari ribuan pekerja di perusahaan itu hanya sekitar 200 orang yang berasal dari ketiga suku itu. Menyebut diri sebagai warga dengan tanah-tanah pertanian yang terdampak kehadiran Inco/Vale, mereka menyuarakan keinginan agar perusahaan mempekerjakan lebih banyak buruh dari ketiga suku itu.

PENUTUP

Tulisan ini mendiskusikan tentang keberlanjutan sejarah akumulasi primitif dalam perkembangan kapitalisme. Jika akumulasi primitif modern terjadi pada skala nasional atau kontinental dengan kasus negara pascakomunis, seperti Cina, Rusia, dan negara-negara Eropa Timur (Holmstrom dan Smith, 2000, hal. 1-15), maka momen yang sama terjadi di tempat lain adalah semacam akumulasi primitif dengan pengalaman lebih lokalistik. Yang terakhir sebagian besar muncul di negeri-negeri selatan, tempat hubungan-hubungan sosial kapitalis berkembang tidak

merata secara global. Pengalaman Indonesia yang secara spesifik terkait dengan industri ekstraktif menunjukkan bahwa akumulasi primitif perlu dipahami dalam konteks perluasan reproduksi modal. Impor modal dari negeri-negeri kapitalis maju di sektor pertambangan mensyaratkan akumulasi primitif dalam kala lebih terbatas, yang memungkinkan akumulasi modal berbasis sumber daya alam ini berlangsung. Dari pengalaman dua industri pertambangan yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa akumulasi primitif berlangsung sebagai prasyarat bagi akumulasi modal.

Saya telah memperlihatkan bahwa ekspansi modal pertambangan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sangat terisolasi telah memporandakan (kehidupan) para petani dari tanah-tanah pertanian tradisional mereka. Perusahaan pertambangan tidak serta-merta memanfaatkan ketersediaan pekerja dari penduduk lokal yang terdampak, karena perusahaan mensyaratkan tenaga kerja terlatih dan terdidik. Diperlukan waktu lumayan panjang sebelum penduduk lokal, yang pada dasarnya adalah pekerja di sektor pertanian tradisional, siap untuk bekerja di industri modern tersebut, setelah tergusur dari tanah-tanah mereka. Akan tetapi, daya serap tenaga kerja yang terbatas dalam industri pertambangan yang padat modal—atau padat teknologi dan karenanya hemat tenaga kerja—membuat penduduk setempat yang terdampak tetap menjadi “tenaga kerja cadangan” (*reserve army of labour*) (Marx, 1976), entah sebagai petani tradisional, pekerja sektor informal, atau bahkan penganggur. Tak pelak, hal tersebut kerap memicu munculnya ketidapuasan dan keresahan di sekitar areal pertambangan. Secara empiris, para petani membayar ongkos paling mahal dari akumulasi primitif. Itu menunjukkan “korban” akumulasi primitif memiliki implikasi teoretis dan politis bukan hanya memikirkan jalan keluar terbatas terhadap modal pertambangan yang digerakkan oleh perusahaan transnasional saja, melainkan lebih luas dari itu, yakni jalan keluar dari kapitalisme itu sendiri.

REFERENSI

Abubakar, M. Dahlan dan Asdar Muis RMS. (2002). *Inco: Mengalir di Tengah Gejolak Pertambangan*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

- Abrash, Abigail dan Danny Kennedy. (2001). "Repressive Mining in West Papua" dalam Geoff Evans, James Goodman, dan Nina Lansbury (eds.), *Moving Mountains: Communities Confront Mining and Globalization*. Sydney: Oxford Press.
- Aditjondro, George J. (1982). "Dapatkah Sorowako dan Tembaga-pura Menjadi Pusat Perkembangan Daerah?" dalam Prisma No.8
- Aditjondro, George J. (1998). "Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of an Anti-Dam Movement in Indonesia" dalam Philip Hirsch dan Carol Warren (eds.), *The Politics of Environment in Southeast Asia*. London, New York: Routledge.
- Ballard, Chris. (2002). "The Signature of Terror Violence, Memory, and Landscape at Freeport" dalam Bruno David dan Meredith Wilson (eds.), *Inscribed Landscapes Marking and Making Place*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Ballard, Chris. (2001). *Human Rights and The Mining Sector in Indonesia: A Baseline Study*. London: IIED.
- Ballard, Chris. (1996). "A Freeport Timeline: 1990 to April 1996", dalam Pat Walsh and Sharmini Sherrard (eds.) *Freeport in Indonesia: Reconciling Development and Indigenous Rights*. Canberra: AFCOA.
- Bina, Cyrus. (1985). *The Economic of Oil Crisis: Theory of Oil Crisis, Oil Rent, and Inter-nationalization of Capital in the Oil Industry*. London: Merlin Press.
- Braake, Alex L. Ter. (1977 [1944]). *Mining in the Netherlands East Indies*. New York: Arno Press.
- Bradbury, John H. (1985). "International Movements and Crises in Resource Oriented Companies: The Case of Inco in the Nickel Sector", dalam *Economic Geography*, Vol. 61, No. 2, hal. 129-143.
- Cairns, Robert D. (1984). "Changing Structure in the World Nickel Industry", dalam *The Antitrust Bulletin/Fall*, hal. 561-575.
- Dunn, Bill. (2007). "Accumulation by Dispossession or Accumulation of Capital? The Case of China", dalam *Journal of Australian Political Economy*, Vol. 60, hal. 5-27.

- Fine, Ben. (2006). "Debating the New Imperialism", dalam *Historical Materialism* Vol. 14, No. 4, hal. 133-156.
- Freeport Indonesia. (2016). *Lembar Fakta: Kontribusi Finansial*.
- Freeport McMoran Copper and Gold Inc., Annual Reports 2003-2016
- Gerretson, Frederic Carel. (1955). *History of the Royal Dutch Volume II*. Leiden: EJ Brill.
- Harvey, Barbara Sillars. (1974). "Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965. Amerika Serikat: Disertasi Doktoral Cornell University.
- Harvey, David. (2003). *The New Imperialism*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Harvey, David. (2006a). "Comment on Commentaries", dalam *Historical Materialism*, Vol. 14, No. 4, 2006, hal. 157-166.
- Harvey, David. (2006b). *The Limits to Capital*. London, New York: Verso.
- Heidhues, Mary F. Somers. (1992). *Bangka Tin and Mentok Pepper*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Holmstrom, Nancy dan Richard Smith. (2000). "The Necessity of Gangster Capitalism: Primitive Accumulation in Russia and China", dalam *Monthly Review*, Vol. 51.
- Howard, Michael C. (1994). "Mining, Development, and Indigenous Peoples in Southeast Asia", dalam *Journal of Business Administration*, Vol 22.
- Leith, Denise. (2003). *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Lindblad, J. Thomas. (1989). "The Petroleum Industry in Indonesia before the Second World War", dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 25, No. 2, hal. 53-77.
- Marr, Carolyn. (1993). *Digging Deep: The Hidden Costs of Mining in Indonesia*. London: Down to Earth and Mining Watch.
- Marx, Karl. (1976 [1867]). *Capital, Volume I*. New York: Penguin Books.

- Marx, Karl. (1993). *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*. New York: Penguin Classic.
- Minister of Supply and Service Canada. (1978). *Strikes and Lockouts in Canada*. Ottawa: Canadian Government Publishing Center.
- New Internationalist*, Mei 2017, hal. 124.
- O'Brien, Patricia. (2010). "The Politics of Mines and Indigenous Rights: A Case Study of the Grasberg Mine in Indonesia's Papua Province", *Georgetown Journal of International Affairs*, Winter/Spring, hal. 47-56.
- O'Connor, James. (2002 [1973]). *The Fiscal Crisis of the State*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Peet, Richard. (1984). "Class Struggle, the Relocation of Employment, and Economic Crisis", dalam *Science & Society* Vol. 48, No. 1, hal. 38-51.
- Perelman, Michael. (2000). *The Invention of Capitalism Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation*. Durham & London: Duke University Press.
- Poeradisastra, Ratih dan Bambang Haryanto. (2016). *Soetaryo Sigit: Membangun Pertambangan untuk Kemakmuran Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Price Waterhouse Cooper. (2015). *Mine 2015: The Gloves are off*. Delaware: PwC.
- Reed, Peter Mellish. (1958). "Standard Oil in Indonesia, 1898-1928", dalam *The Business History Review*, Vol. 32, No. 3, hal. 329-337.
- Reid, Jason. (2003). *The Micro-Politics of Capital: Marx and the Prehistory of the Present*. Albany: SUNY Press.
- Robinson, Kathryn M. (1986). *Stepchildren of Progress: Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town*. New York: State University of New York Press.
- Sangaji, Arianto. (2002). *Buruk Inco Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Sangadji, Arianto. (2017). "Resource nationalism as imperialism", dalam *Inside Indonesia* [online] akses melalui: <https://www.insideindonesia.org/resource-nationalism-as-imperialism-3?highlight=WyJhcmlhbnRvIiwic2FuZ2FkamkiLCJhcmlhbnRvIHNBmdhZGppIl0%3D>.
- Sembiring, Simon Felix. (2009). *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Simpson, Bradley R. (2008). *Economists with Guns: Authoritarian Development and US-Indonesia Relations, 1960-1968*. Stanford: Stanford University Press.
- Singgih, Viriya P. (2017). "Alleged Rights Violations Weigh on Freeport's Shoulders", dalam *The Jakarta Post* 8 Maret 2017.
- Tyson, Adam Dean. (2008). *The Politics of Decentralization and Indigenous Revivalism in Sulawesi, Indonesia*. Leeds: Disertasi Doktoral University of Leeds.
- Wood, Ellen Meiksins. (2006). "Logics of Power: A Conversation with David Harvey", dalam *Historical Materialism*, Vol. 14, No. 4, hal. 9-34.

KRISIS, KETIDAKADILAN, DAN KEADILAN SOSIO-EKOLOGIS¹

Bosman Batubara

ABSTRAK

Tulisan ini melakukan teoretisasi tentang krisis, ketidakadilan, dan keadilan sosial-ekologis dengan mengambil dan menjelaskan contoh kasus kekeringan sumur dangkal sebagian warga *vis a vis* sumur dalam hotel di Yogyakarta, yang sedang mengalami krisis *overproduction*, sebagai bagian integral dari “akumulasi melalui perampasan” (*accumulation by dispossession*, AbD). Namun, teori AbD yang berakar pada kontradiksi buruh dan kapital kurang memadai. Kekeringan sumur dangkal warga memiliki dimensi nonburuh. Untuk memahaminya, teori krisis *overproduction* dilengkapi dengan teori krisis *underproduction* (*aleon*). Ketidakadilan sosial-ekologis terletak pada sumur hotel yang diatur oleh nilai-tukar, sedangkan semua sumur warga diatur oleh nilai-guna. Untuk mencapai keadilan sosial-ekologis, tulisan ini mengusulkan nilai-guna sebagai sumbu kepengurusan relasi antar(a) manusia dan non-manusia dalam membangun gerakan anti-kapitalisme yang saling terhubung.

Kata-kata Kunci: Akumulasi melalui perampasan, aleon, *overproduction*, sosial-ekologis, kapitalisme.

Frasa “sosial-ekologis” sering digunakan oleh kelompok-kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), peneliti, korporasi, dan sebagainya (lihat Jatam, 2018; Setyawan, 2018; Luthfi, 2017), untuk menggambarkan adanya krisis, ketidakadilan, dan imajinasi akan keadilan. Salah seorang peneliti lepas di bidang lingkungan yang selama dua dekade terakhir bergerilya mencari cara dalam melakukan pemulihan kri-

¹ Artikel ini diambil dari publikasi sebelumnya, Bosman Batubara. “Krisis, Ketidakadilan, dan Keadilan Sosio-Ekologis”. 2019. *Jurnal Prisma*, Vol. 38, No. 3, hal. 66-84.

sis sosial-ekologis ialah Hendro Sangkoyo (lihat Sangkoyo, 2016). Dari bagaimana frasa sosial-ekologis mulai menjadi *common sense*, pendapat khalayak, atau “filsafat para non-filsuf” (lihat Gramsci, 2000) maka hal wajar untuk menyatakan bahwa dibutuhkan pembahasan lebih teoretis tentang apa sebenarnya yang dimaksud “krisis, ketidakadilan, dan keadilan sosial-ekologis.” Hendro Sangkoyo, dalam pemaparan tentang krisis, melihat bahwa kapitalisme adalah mesin utama yang mengendalikan proses yang tengah berlangsung dewasa ini (lihat Sangkoyo, 2018, hal. 137-151). Sementara pembahasan teoretis mengenai krisis sosial-ekologis sebagai dampak dari ekspansi kapitalisme dikemukakan oleh Dian Yanuardi dan Swanvri. Mereka menganalisis bahwa itu adalah hasil dari kontradiksi internal kapitalisme yang menghadirkan krisis *over-accumulation* (lihat Yanuardi, 2014, hal. 31-45).

Namun demikian, pemaparan Sangkoyo dan Yanuardi dan Swanvri terasa belum cukup (lihat Sangkoyo, 2018). Penjelasan dan analisis Hendro Sangkoyo sangat umum (lihat Sangkoyo, 2018), sedangkan pendekatan Yanuardi dan Swanvri tentang krisis *overproduction* didominasi oleh analisis tentang kapitalisme sebagai proses produksi tempat kelas kapitalis mengeksploitasi kelas buruh. Pertanyaannya, di mana kontribusi non-buruh (atau lebih sempit non-manusia) dalam pembentukan krisis? Apakah ekologi hanya merupakan dampak dari ekspansi kapitalisme? Di mana peran ekologi dalam pembentukan krisis sehingga layak disebut sebagai “krisis sosial-ekologis” bukan sekadar “krisis sosial”? Bagaimana pemahaman tentang krisis, ketidakadilan, dan keadilan sosial-ekologis dapat dikonseptualisasikan?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mendialogkan teori akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*, AbD) dan teori krisis *over-accumulation* yang diperkenalkan ulang oleh David Harvey demi alasan pragmatis: menyodorkan teori AbD sebagai faktor penjelas proses akumulasi kapital yang berlangsung masif di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan resonansi dengan sejumlah pemakai istilah “sosial-ekologis” di mana identifikasi mereka terhadap krisis sosial-ekologis berakar pada ekspansi kapitalisme dan dipakai untuk menjelaskan kasus kekeringan sumur-sumur dangkal warga di Yogyakarta.

Kasus kekeringan sumur dangkal tersebut dipilih dengan pertimbangan strategis karena mengandung dua dimensi. Dimensi pertama adalah aktivitas ekstraksi air tanah, terutama sumur-sumur dalam “milik” sejumlah hotel di Yogyakarta. Dimensi kedua adalah kecepatan pengisian kembali *aquifer* air tanah dikalahkan oleh kecepatan ekstraksi. Dialektika kedua dimensi itulah yang menyebabkan kekeringan sumur-sumur dangkal warga setempat. Teori AbD yang dipakai untuk menjelaskan aktivitas ekstraksi sebagai proses akumulasi melalui perampasan agak kurang memadai untuk menjelaskan kekurangan pasokan untuk mengisi kembali *aquifer* yang telah diekstrak, karena siklus hidrologi sebagai bagian dari proses produksi kapitalisme melibatkan elemen non-buruh. Diperlukan satu teori penjelas lain. Dengan demikian, contoh kasus kekeringan sumur dangkal warga di Yogyakarta membuka ruang untuk melengkapi, bukan menggantikan, teori AbD.²

Untuk melengkapi ramuan teoretis tersebut, tulisan ini meminjam pemikiran Jason Moore yang mengonseptualisasikan kapitalisme sebagai perpaduan antara manusia dan nonmanusia yang sama-sama menyumbang nilai dalam produksi kapitalisme (Lihat Moore, 2015). Nilai yang “diembat” oleh kapitalis bukan hanya dari eksploitasi terhadap waktu kerja-lebih buruh dalam sistem industri, melainkan juga dari apropriasi terhadap aspek non-buruh. Konsepsi Moore tersebut akan dipakai untuk menjelaskan proses apropriasi air tanah di Yogyakarta. Kekeringan sumur dangkal warga yang terjadi karena siklus hidrologi tidak bisa memasok air sebanyak yang diekstrak dalam tulisan ini diidentifikasi sebagai momen krisis *aleon* (*underproduction*).³

2 Kontradiksi “sumur dangkal” versus “sumur dalam” bukan hanya terjadi di Yogyakarta. Kekeringan sumur dangkal warga juga terjadi di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Dalam sebuah diskusi bertajuk “Mbalekke Banyu” (mengembalikan air) di Kampung Gebyok (12 Juli 2019) berkembang narasi bahwa sumur dangkal warga kering karena muncul banyak sumur dalam di kompleks perumahan yang dibangun belakangan. Di Labuhan Bajo, sumur dangkal warga juga kering karena ekstraksi sumur-sumur dalam dari sektor komersial, yaitu perhotelan dan industri (lihat, <https://www.youtube.com/watch?v=G9732OmrWZc&feature=youtu.be>). Di Jakarta, terutama di bagian utara, ekstraksi air tanah oleh sumur-sumur dalam kerap dituding sebagai penyebab utama amblesan tanah (*land subsidence*; (penelitian penulis, belum dipublikasikan).

3 Aleon berasal dari Bahasa Mandailing untuk menjelaskan soal “kelangkaan” (hasil panen dan barang)

DIALOG ANTARA ABD DAN KRISIS OVERPRODUCTION

David Harvey merumuskan teori AbD dalam berbagai kesempatan kariernya sebagai geografer. (lihat Harvey, 2003; Harvey, 2004; Harvey, 2005a; Harvey 2005b) Teori yang diperkenalkannya kali pertama pada 2003 dalam buku *New Imperialism* itu menjelaskan konstelasi geopolitik internasional yang dihegemoni Amerika Serikat. Namun, hegemoni AS sejak tahun 1970-an hingga tahun 2000-an berbeda dibanding hegemoni AS periode sebelumnya (lihat Harvey, 2003) Harvey mendasarkan analisisnya pada dua logika yang bekerja secara dialektis: logika kekuasaan negara dan logika ekspansi kapital. Logika kekuasaan negara terkunci (*fixed*) di suatu kawasan. Sementara logika ekspansi kapital selalu “bergerak” (*mobile*) dan tidak terkunci di satu kawasan. Kapital membutuhkan mobilitas untuk berekspansi. Kedua logika itu bekerja dalam perubahan hegemoni yang berlangsung sejak pasca-Perang Dunia II.

Pada tahun 1945-1970-an, hegemoni AS ditopang oleh kekuasaan negara. Kekuatan politik dan militer menjadikan AS sebagai negara yang dominan dalam geopolitik dunia. Fase 1970-an hingga 2000-an adalah era hegemoni neoliberal. AS tetap hegemonik dalam geopolitik dunia, namun polanya sudah berubah. Pada era itu, hegemoni AS terutama ditopang oleh korporasi-korporasi besar AS yang berhasil melakukan konsolidasi, bahkan menguasai dan menggeser negara Keynesian (sejak tahun 1970-an). Konsolidasi kekuatan korporasi era tersebut menghasilkan *over-accumulation* kapital di tangan kelas pengusaha AS. Akumulasi kapital yang berlebihan itu harus disuntikkan ke dalam sirkuit agar tetap bisa bekerja dan menghasilkan surplus yang baru. Kapital harus terus mendayung untuk memperoleh keuntungan, baik yang diperoleh melalui eksploitasi terhadap waktu kerja-lebih buruh maupun lewat apropriasi terhadap hal-hal yang masih di luar sistem kapitalisme. Pendek kata, kapital harus melakukan ekspansi geografis demi kelangsungan hidupnya sendiri.

Dibanding teori AbD, teori krisis *over-accumulation* memiliki perjalanan sejarah lebih panjang. David Harvey sendiri menganalisis krisis kapitalisme melalui pemahaman terhadap kontradiksi kapital dan buruh. Dia menjelaskan tiga jenis krisis yang menjadi bagian tak terpi-

sahkan dalam perkembangan kapitalisme (lihat Harvey, 1981, hal. 1-12). Krisis pertama terjadi karena akumulasi kapital yang berlebihan di sisi kapitalis terjadi bersamaan dengan kurangnya permintaan di sisi konsumen (dalam hal ini sering kali adalah buruh). Hal tersebut membuat komoditas tidak bisa dijual. Karena itu, krisis *over-accumulation* sering pula disebut “krisis *overproduction*.” Bila komoditas tidak bisa dijual, maka dengan sendirinya produktivitas pabrik berkurang. Itu berarti pengurangan tenaga buruh. Karena itu, krisis *over-accumulation* juga kerap disebut *over-accumulation* buruh (pengangguran). Menurut Harvey, solusi kapital terhadap krisis *over-accumulation* berupa ekspansi geografis atau *spatial fix* (solusi ruang) (lihat Harvey, 1981). Kapital di lokasi yang baru akan menemukan sumber bahan mentah, buruh, dan pasar yang juga baru. Dengan kata lain, kapital senantiasa berusaha mencari area geografi yang baru (*frontier*), yang belum masuk ke dalam sirkuitnya, untuk dimasukkan ke dalam sirkuit kapital.

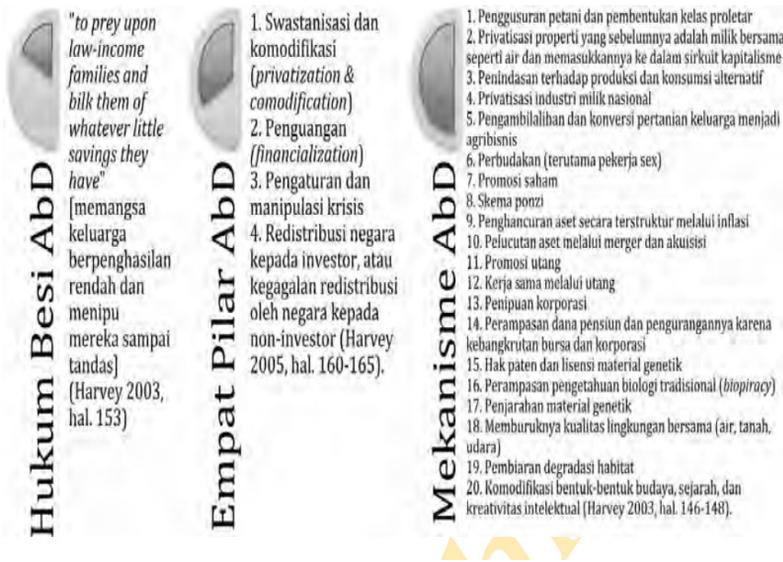
Krisis kedua berupa krisis kapitalisme yang terjadi karena kontradiksi di dalam kapitalisme finansial. Krisis itu mengait dengan krisis jenis pertama. Kapital menempuh solusi ruang dengan bantuan kekuatan skema finansial. Pada dasarnya, skema finansial adalah penundaan krisis atau “menggadaikan” masa depan, karena yang terjadi dalam skema ini merupakan pengucuran kredit untuk suatu ekspansi kapital dengan pembayaran yang akan dilakukan kelak. Pada titik itu, solusi ruang bertemu dan bergabung dengan temporal *fix* (solusi waktu) menjadi “solusi ruang-waktu” (*spatio-temporal fix*) (lihat Harvey, 2006, hal. 142-166). Area geografi yang baru dibuka juga tidak lepas dari hukum kontradiksi kapitalisme; cepat atau lambat akan mengalami *over-accumulation*. Skema finansial sangat rawan spekulasi dalam arti investasi yang tidak sesuai dengan permintaan efektif. Harvey memberi contoh spekulasi yang terjadi di sektor properti; permintaan realistis dari pasar akan properti sebenarnya tidaklah banyak (lihat Harvey, 2012). Namun, hukum besi kompetisi yang menjadi ciri pokok kapitalisme (lihat Woods, 2002), bahwa jika seorang kapitalis tidak menanamkan investasi maka kapitalis yang lain pasti melakukannya, memaksa kapitalis untuk tetap menginvestasikan kapitalnya, meski di sektor dengan *turnover time* yang lama seperti properti.

Sementara itu, krisis jenis ketiga melibatkan pembangunan geografis yang timpang. Krisis itu dapat terjadi karena ritme regional dari suatu pembangunan, perpindahan atau jungkat-jungkit dari kapital, seperti diidentifikasi Neil Smith (lihat Smith, 2008), senantiasa memiliki perangai menghancurkan satu tempat dan pindah mencari tempat baru untuk dihancurkan, atau karena organisasi perdagangan internasional yang secara sempit diatur berdasarkan diktat kepentingan korporasi-korporasi raksasa.

Berbagai ekspansi kapitalisme dalam menghadapi krisis *over-accumulation* neoliberalisme inilah yang menyebabkan terjadinya akumulasi melalui perampasan (AbD). Dalam penggunaannya, terutama di lingkungan kelompok akademika agraria, AbD kerap dilepaskan dari konteks krisis yang mendahuluinya (lihat Hall, 2013). David Harvey terinspirasi teori akumulasi awal mula (*primitive accumulation*) Karl Marx (lihat Marx, 1982), yakni sebuah proses yang menceraikan para pemilik dari alat produksi yang dimilikinya—proses yang disebut proletarisasi atau mencetak proletar. Menurut Harvey (lihat Harvey, 2003; Harvey, 2005a), kata “primitif” dalam “*primitive accumulation*” membuat kita menafsirkan proses akumulasi kapital adalah masa lalu yang telah selesai. Dalam kenyataannya, proses proletarisasi masih berlangsung hingga kini di era neoliberal yang secara teoretis memosisikan kepengaturan hal-hal yang bersifat sosial sebagian besar diserahkan pada mekanisme pasar dengan negara mengambil peran aktif serta pasif menciptakan kondisi yang menguntungkan pasar. Proses akumulasi yang terjadi bukan lewat sektor produktif yang melibatkan buruh, tetapi dengan merampas sesuatu yang sudah ada.

Kendati tidak disusun secara sistematis, Harvey memaparkan bahwa AbD memiliki tiga elemen penting: hukum besi, pilar, dan mekanisme. Hukum besi merupakan watak dasar yang mengendalikan semua proses AbD, sedangkan pilar adalah proses yang menciptakan kondisi yang membuat mekanisme AbD memiliki lahan subur untuk tumbuh (lihat, Bagan 1).

Bagan 1. Teori AbD



METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan beragam data untuk melihat bagaimana kekeringan sumur dangkal warga di Yogyakarta merupakan bagian integral dari proses AbD, krisis *overproduction*, dan *aleon*. Data mengenai tingkat hunian hotel di Yogyakarta tahun 2013-2017 yang menunjukkan gejala *overproduction* diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2018. Sementara data tingkat hunian yang “aman” bagi bisnis perhotelan di DIY diperoleh dari pernyataan beberapa pegiat bidang ini. Untuk kondisi *aleon* air tanah serta informasi tentang dinamika kekeringan sumur warga diperoleh dari pemberitaan di media massa. Tulisan ini memakai *aquifer* Merapi sebagai instrumen metodologis untuk mengetahui volume dan nilai moneter air tanah yang diekstrak hotel-hotel di Yogyakarta. *Aquifer* Merapi adalah unit hidrogeologi tempat air tanah diekstrak. Dari segi geologi, batuanannya adalah endapan dari Gunung Merapi (lihat Putra dan Indrawan, 2014, hal. 106). Sementara dari sudut hidrologi, wilayah tangkapan air utama untuk *aquifer* Merapi adalah daerah lereng Gunung Merapi. Unit hidrogeologi itu disebut “cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman.” Dalam tulisan ini, persebaran *aquifer* Merapi diolah dengan menggunakan

perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System, ArcGIS) (lihat Putra dan Indrawan, 2014). *Aquifer* Merapi yang menyebar di seluruh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta serta sebagian di Kabupaten Bantul (lihat, peta pada Gambar 1) dipilih sebagai unit hidrogeologi untuk dianalisis karena berperan penting menyumbang air tanah di tiga daerah ini. Bila muncul masalah kekeringan atau pencemaran air tanah di tiga daerah tingkat dua itu, unit hidrogeologi yang paling cepat diinvestigasi adalah *aquifer* Merapi. Dengan kata lain, tulisan ini mendukung metode pemantauan air tanah berbasis unit hidrogeologi sekaligus identifikasi awal untuk merumuskan tapak sosio-spasial keadilan sosial-ekologis.

Data hotel “bintang” (B) dan “non-bintang” (NB) diperoleh dari BPS DIY yang menampilkan direktori hotel hingga tingkat kecamatan di DIY (lihat Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016). Data konsumsi air kamar hotel sebesar 380 liter/ hari (setara dengan 0,38 m³/hari) didapatkan dari “Film Belakang Hotel” (Watchdoc, 2015). Data banyak tamu bermalam dan rerata tamu per kamar tahun 2016 juga diolah dari BPS DIY (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018). Besar tarif air diperoleh dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 56/2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta yang mengategorikan losmen/penginapan sebagai pembayar kelas “niaga kecil” dengan tarif mulai dari Rp 5.500/m³. Sementara hotel digolongkan dalam pembayar “niaga besar” dengan tarif mulai dari Rp 10.500/m³. Tarif naik setiap kelipatan pemakaian 10 m³, namun tulisan ini tidak mempertimbangkan kenaikan tarif itu. Semua konversi tarif air dihitung sama pada derajat 0-10 m³. Mengikuti Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 56/2013, hotel B disamakan dengan hotel dan hotel NB dipadankan dengan losmen/penginapan.

Setidaknya ada dua keterbatasan metode penghitungan seperti itu. *Pertama*, persebaran *aquifer* Merapi yang menebal di tengah dan menipis di tepi membuat hotel dan losmen yang terletak di pinggir tidak dapat mengekstrak air tanah dari *aquifer* Merapi. *Kedua*, pemilahan hotel berdasarkan kecamatan untuk Kabupaten Bantul bisa saja tidak persis mengikuti pola persebaran *aquifer* Merapi. Untuk hotel atau losmen di kecamatan yang terletak di luar persebaran *aquifer* Merapi, seper-

ti Pajangan dan Piyungan, bisa saja mengekstrak air tanah dari *aquifer* Merapi. Sebaliknya, ada kecamatan yang terletak di dalam area persebaran *aquifer* Merapi mengekstrak air tanah bukan dari *aquifer* ini.

AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN AIR TANAH DAN KRISIS OVERPRODUCTION HOTEL

Film “Belakang Hotel” memperlihatkan bagaimana sumur-sumur dangkal warga di Kota Yogyakarta mengalami kekeringan parah pada 2014, karena adanya sumur-sumur dalam “milik” hotel-hotel di kota itu. Ekstraksi air tanah dari *aquifer* di bawah Kota Yogyakarta adalah proses kompetisi antara satu kelompok yang memiliki sumber daya kurang (dalam hal ini warga) dengan kelompok lain yang memiliki sumber daya lebih (para pemilik hotel). Kekurangan dan kelebihan sumber daya mereka termanifestasi pada kedalaman sumur air tanah masing-masing. Warga biasanya memiliki sumur tradisional atau sumur bor yang lebih dangkal, sedangkan sumur bor hotel biasanya memiliki jangkauan lebih dalam. Proses itu bisa dikatakan merupakan akumulasi melalui perampasan karena hotel mengekstrak air tanah yang semula bukan milik siapa-siapa, namun kemudian diklaim oleh negara dan membebankan kewajiban membayar pajak bagi penggunaannya. Ekstraksi itu memberi kesempatan kepada pemilik hotel melakukan akumulasi melalui penyewaan kamar hotel. Di sisi lain, sumur warga mengalami kekeringan. Warga harus menanggung beban, karena air yang seharusnya diperoleh hilang terampas akumulasi kapital pemilik hotel.

Dalam skema mekanisme AbD (dirangkum dari karya-karya David Harvey pada bagan sebelumnya), pemompaan air tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai “privatisasi properti yang sebelumnya adalah milik bersama.” Hal itu tidak secara langsung merupakan komodifikasi air tanah. Air tanah bukanlah komoditas itu sendiri! Yang diperdagangkan pihak hotel bukan air tanah, tetapi kamar-kamar untuk tamu mereka. Namun, dalam paket kamar hotel itu tertaut air tanah. Kalau tidak ada air, maka tidak ada yang menyewa kamar hotel bersangkutan. Ini berbeda dengan proses komodifikasi air minum kemasan yang memosisikan air sebagai komoditas. Dalam kasus ekstraksi air tanah di Yogyakarta, air berfungsi “melumasi” (*lubricating*) proses produksi kapi-

talisme perhotelan. Air tanah dipompa untuk menjadi bagian dari dunia komoditas.

Dari sisi pembangunan hotel di Yogyakarta, ada momen krisis *overproduction* berbentuk pasokan kamar hotel yang melebihi permintaan efektif. Momen krisis itu dapat dilihat dari tingkat hunian yang selalu di bawah kondisi “pasar yang sehat.” Sejak 2013 sampai 2017, tingkat hunian hotel di Provinsi DIY, baik kategori B (hotel bintang 1-5) maupun kategori NB, selalu di bawah 60 persen (lihat, Grafik 1). Tingkat hunian sebesar 60 persen dipilih sebagai batasan kondisi “pasar sehat” berdasarkan pengakuan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab M Danunegoro (lihat Wardhani, 2018). Menurut Danunegoro, bila tingkat hunian hotel di bawah 60 persen, persaingan antar-hotel pasti tidak sehat dan selalu terjadi “perang harga.” Kemungkinan besar keuntungan para kapitalis hotel akan berkurang atau malah merugi. Sebaliknya, bila tingkat hunian di atas 60 persen, pasti tidak akan terjadi perang harga. Angka 60 persen agaknya merupakan sebuah angka yang memungkinkan kapitalis hotel bisa mendapatkan keuntungan dan tidak perlu berperang harga antar-sesama pemilik hotel.

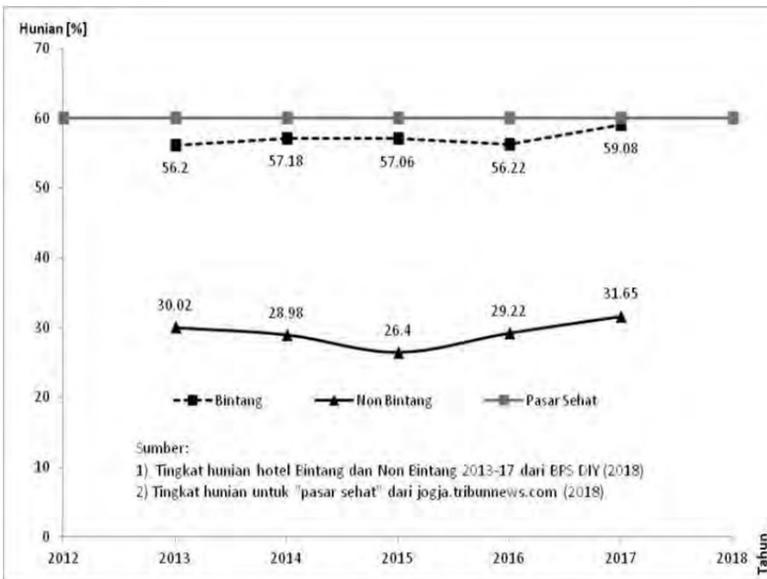
Namun, muncul hal kontradiktif di tengah tingkat hunian hotel yang rendah. Pada Januari 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta mencabut moratorium pembangunan hotel baru. Artinya, meski sudah memiliki 624 hotel, Pemkot Yogyakarta mengizinkan penambahan dan pembangunan hotel baru, khususnya hotel bintang 4 dan 5 serta *guest house*. Alasan pencabutan moratorium itu adalah untuk menyambut kedatangan banyak wisatawan ke Yogyakarta setelah Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) selesai dibangun. Arus wisatawan diharapkan semakin banyak dan akan meningkatkan penghasilan masyarakat Yogyakarta serta para pengusaha perhotelan (lihat Kusuma, Wijaya, 2019).

Pertanyaannya, bila penawaran lebih kecil daripada permintaan atau kondisi pasar selalu tidak sehat, yang memaksa para pemilik hotel kian tunduk pada hukum besi kompetisi kapitalisme perhotelan berupa perang harga, mengapa pembangunan hotel terus berlanjut? Selain untuk menyambut peningkatan arus wisatawan ke Yogyakarta, krisis *over-accumulation* kapital atau *overproduction* komoditaslah yang memak-

sa terus berlanjutnya pembangunan hotel baru. Tingkat hunian selalu di bawah 60 persen itu sendiri menunjukkan kondisi kelebihan pasokan kamar hotel; penawaran lebih besar daripada permintaan efektif yang kecil. Jika logika itu diikuti, maka jalan pikirannya, hal ini karena akumulasi kapital di tangan para kapitalis atau lembaga-lembaga finansial harus disalurkan, diinvestasikan, dimasukkan ke sirkuit produksi kapitalisme agar terus-menerus mendatangkan keuntungan bagi kapitalis.

Overproduction atau *over-supply* kamar hotel hanyalah satu bagian dari konjungtur krisis pada momen kekeringan sumur warga di Yogyakarta. Bagian yang lain menyangkut *aquifer* Merapi sendiri, tempat sumber air tanah diekstrak. Bila momen *overproduction* secara teoretis bisa dijelaskan dengan menunjukkan kontradiksi internal kapitalisme antara kapital dan buruh atau permintaan dan penawaran, maka untuk menjelaskan peran *aquifer* Merapi dibutuhkan sebuah teori lain.

Grafik 1. Tingkat Hunian Hotel di DI Yogyakarta, 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Tingkat Penghunian Kamar Hotel*

KRISIS ALEON DALAM KAPITALISME

Konsepsi kapitalisme industri yang dibangun Karl Marx sangat menekankan proses eksploitasi terhadap buruh. Nilai-lebih dibayang-

kan berasal dari waktu kerja-lebih buruh yang dikonversi menjadi komoditas untuk dijual. Dari situlah kapitalis mendapatkan keuntungan. Tiga bab awal dalam *Capital I*, misalnya, dapat dibaca sebagai usaha Marx yang sangat keras dalam meletakkan buruh sebagai pusat dari buku tentang kapital yang sedang dia tulis (lihat Marx, 1982). Misalnya, dia menyebutkan, "Sesungguhnya nilai dari tiap yard (kain linen) tidak lain adalah materialisasi dari sejumlah kerja buruh homogen yang kuantitasnya yang setara ditentukan secara sosial" (lihat Marx, 1982, hal. 202). Begitu pentingnya penekanan itu, "mendorong" Institute Marxism-Leninism membuat catatan kaki pada akhir kalimat yang dikutip di atas:

"Dalam surat tertanggal 28 November 1978 kepada NF Danielson, penerjemah *Capital* ke dalam Bahasa Rusia, Marx membuat perubahan berikut: 'Dan sesungguhnya nilai dari setiap yard tidak lain adalah materialisasi dari sebagian kuantitas kerja buruh sosial yang tertanam dalam sejumlah kain linen.'" (lihat Marx, 1982, hal. 202)

Perbedaan dalam kalimat yang dikutip pertama dengan catatan kakinya terletak pada sejauh mana peran buruh dalam produksi nilai yang tertanam dalam kain linen: buruh dalam kutipan pertama cenderung sangat determinan. Dalam kutipan kedua, determinasi itu dikurangi.

Pandangan yang memberi ruang sangat luas terhadap kontribusi buruh dapat lebih dipahami dengan melihat proses valorisasi kapital di pabrik (lihat Marx, 1982, hal. 321). Dalam satu siklus produksi, proses dimulai dari waktu awal (t_0) dan berakhir ketika produk sudah selesai (t_n). Pada awal proses (t_0), kapitalis memiliki total kapital (K) berupa sejumlah alat produksi (k atau kapital konstan; contoh: mesin, bahan bakar, dan bahan mentah) dan sejumlah uang untuk dibelanjakan membeli tenaga buruh (V , variabel kapital). Kondisi (t_0) dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$K = k + V \dots \text{(rumus I)}$$

Pada masa akhir proses produksi (t_n), kapitalis telah mengeksploitasi buruh dan kini memiliki nilai-lebih yang terikat di dalam komoditas yang dihasilkan. Total kapitalnya sekarang bukan lagi K seperti

pada waktu awal (t_0), tetapi telah berubah menjadi K' . Ada pertambahan berupa nilai-lebih (N), yaitu nilai yang didapatkan dari eksploitasi terhadap buruh. Proses eksploitasi dapat dipahami dengan contoh berikut. Pada dasarnya, seorang buruh pabrik hanya perlu bekerja selama 2 jam sehari agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Marx menyebut itu "kerja-perlu." Namun, pada kenyataannya, buruh dalam sehari bekerja selama 8 jam dan si kapitalis hanya membayar si buruh 2 jam (V). Waktu "kerja-lebih" buruh yang 6 jam diambil (dieksploitasi) oleh kapitalis menjadi keuntungan baginya. Rumus I berubah menjadi:

$$K' = k + V + N \dots \text{(rumus II)}$$

Permasalahannya, beberapa elemen, seperti air tanah, tidak secara eksplisit muncul dalam rumus I dan II. Dengan kata lain, kontribusinya tidak dibicarakan dengan porsi sebagaimana kontribusi buruh dibicarakan dalam nilai-lebih (N). Air tanah dalam rumus I dan II tergabung di dalam k . Jadi, kita harus melakukan penyesuaian agar air tanah terlihat eksplisit dalam rumusan dan dapat lebih terlihat pula kontribusinya dalam kapital yang telah mengalami valorisasi dari K ke K' . Dalam hal ini, Jason Moore banyak membantu (lihat Moore, 2015). Dia membedakan antara "nilai" dengan "relasi-nilai", antara "yang menjadi karakter kapital" dengan "yang dilakukan oleh kapital," antara "logika kapital" dengan "sejarah kapital," dan antara "eksploitasi" dengan "apropriasi."

Nilai dalam proses produksi kapital adalah sebuah istilah spesifik yang mengacu pada bagaimana proses penciptaan kekayaan berlangsung, yang oleh Marx terutama dianggap berasal dari kontribusi nilai-lebih yang dieksploitasi dari waktu kerja-lebih buruh. Menurut Moore, dalam kenyataannya, penciptaan kekayaan yang terjadi dalam proses produksi kapital bukan hanya diperoleh dari eksploitasi terhadap waktu kerja-lebih buruh, tetapi juga dari apropriasi terhadap non-buruh. Termasuk dalam non-buruh adalah air, tanah, air tanah, juga tenaga kerja pembantu rumah tangga dan segala pekerjaan merawat keluarga dan rumah tangga yang menciptakan kondisi sedemikian rupa agar penghuni rumah bisa bekerja sebagai buruh melayani kapitalis. Relasi-relasi non-buruh itu disebut Moore sebagai relasi-nilai.

Dalam konteks kapitalisme pabrik, karakter spesifik yang menjadikan satu moda produksi disebut kapital, sebagaimana dijabarkan Marx dalam rumusan di atas, adalah produksi nilai lebih melalui eksploitasi waktu kerja-lebih buruh. Namun, seperti telah dipaparkan, bukan hanya eksploitasi terhadap buruh yang membentuk kapital, tetapi juga apropriasi terhadap non-buruh. Pada dasarnya, logika kapital adalah berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Kapitalis sebagai personifikasi kapital hanya mau membayar tenaga buruh dan secara eksplisit enggan membayar kontribusi non-buruh, karena ini menipiskan keuntungannya atau bahkan merugi. Bila kita melihat sejarah kapital, akumulasi kekayaan bukan hanya terjadi akibat proses eksploitasi terhadap buruh, melainkan juga karena proses perampasan moda produksi, seperti tanah dari kaum tani perdesaan, sehingga para pemilik ini tidak punya alat produksi lagi untuk menopang kehidupannya, kecuali dengan menjual tenaga kerjanya sendiri. Karl Marx menyebut itu "*primitive accumulation*" dan oleh Harvey disebut sebagai *AbD*.

Bagi Moore, eksploitasi adalah terminologi spesifik yang dipakai untuk menjelaskan bagai mana kapitalis merampas waktu kerja-lebih dari buruh. Sementara apropriasi adalah perampasan yang dilakukan kapitalis terhadap unsur non-buruh. Moore menyebut non-buruh itu "murah." Energi, bahan mentah, bahan bakar, makanan, dan tenaga kerja non-buruh disebut murah oleh Moore, karena pada dasarnya kapitalis tidak ikut bekerja untuk menghasilkan mereka. Jadi, "murah" yang dimaksud adalah murah bagi si kapitalis. Misalnya, energi fosil seperti minyak atau gas bumi. Kapitalis tidak berkontribusi menciptakan mereka. Adalah proses geologis ribuan tahun yang menghasilkannya dan si kapitalis "mengambilnya begitu saja" (apropriasi). Tentu ada biaya untuk membayar proses apropriasi. Namun, sebagai barang, minyak atau gas bumi tidak dibeli, tetapi diambil begitu saja dari perut bumi. Demikian pula dalam kasus air tanah di Yogyakarta. Kapitalis tidak menciptakan air, hanya membor dan mengalirkannya ke kamar-kamar hotel milik mereka.

Dalam rumusan Marx, cerita tentang bahan bakar, bahan mentah, makanan, dan tenaga kerja non-buruh, seperti pada rumus I dan II, ada di kapital konstan (*k*) dan cenderung tak terlihat. Perbedaan yang

dilakukan Jason Moore antara nilai dengan relasi-nilai, karakter kapital dengan yang diperbuat kapital, logika kapital dengan sejarah kapital, dan eksploitasi dengan apropriasi, yang diperoleh melalui pembacaan ulang terhadap valorisasi kapital seperti pada rumus II kurang lebih dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$K' = M + Ba + P + V + N \dots \text{ (rumus III)}$$

K' adalah total kapital pada waktu t_n

M adalah notasi untuk energi, bahan mentah, bahan makanan dan minuman, dan tenaga kerja non-buruh yang “murah”

Ba adalah “biaya apropriasi” untuk mendapatkan semua yang murah

P adalah peralatan yang dibutuhkan oleh kapitalis dalam proses produksi

V adalah kapital variabel, yaitu bayaran terhadap tenaga kerja buruh

N adalah nilai-lebih

Rumus III adalah “konsepsi kapitalisme yang diperluas”, yang digunakan Nancy Fraser untuk menjelaskan bagaimana kapital selalu mengambil keuntungan bukan hanya dari aspek-aspek yang sudah terhubung dengan pasar (buruh, mesin pabrik, dan lain-lain) (lihat Fraser, 2014, hal. 55-72), tetapi juga aspek-aspek yang belum terhubung dengan pasar (misalnya, tenaga kerja non-buruh, praktik merawat, berbagai pekerjaan dalam rumah tangga, dan lain-lain). Henri Lefebvre dan Rosa Luxemburg masing-masing menyebut proses yang melibatkan non-buruh itu sebagai “reproduksi relasi-relasi produksi” dan “reproduksi sosial” (lihat Lefebvre, 1973; Luxemburg, 2003). Agaknya Fraser (lihat Fraser, 2014), Moore (lihat Moore, 2015), Lefebvre, dan Luxemburg mendiskusikan satu proses yang sama: elemen non-buruh juga sangat kontributif dan layak ditampilkan secara eksplisit dalam proses valorisasi kapital.

Dengan membangun konsepsi seperti itu, bukan berarti Karl Marx tidak menaruh perhatian pada proses yang melibatkan elemen non-buruh. Agaknya lebih pas untuk mengatakan bahwa Marx mencurahkan perhatian sangat besar pada buruh dengan tujuan politis, “elan

revolusioner adalah kaum buruh.” Dengan kata lain, *interlocutor* (teman berdiskusi dan bercakap-cakap) Marx adalah kaum buruh. Fakta lain, dalam *Grundrisse*, Karl Marx secara eksplisit mengenali proses apropriasi tenaga kerja non-buruh yang dia sebut “*appropriation of alien labour*” (lihat Marx, 1993, hal. 458). *Alien labour* yang dimaksud adalah tenaga kerja yang masih berada di luar sirkuit kapital dan, untuk kepentingan valorisasi, diappropriasi oleh kapital supaya masuk ke dalam sirkuit kapital.

Terlepas dari visi politis Marx, perbedaan dalam hal bagaimana proses valorisasi kapital dinotasikan—perbedaan antara rumus II dengan rumus III—menyebabkan perbedaan pada bagaimana krisis kapitalisme dikonsepsikan. Dalam rumus II, seperti disinggung Karl Marx dan Friedrich Engels (lihat Marx dan Engels, 2008, hal. 70) atau diteorikan ulang oleh Harvey dalam sejumlah karyanya, krisis kapitalisme adalah krisis *overproduction*. Dengan rumus III, perhatian kita bisa dibetot oleh kesadaran bahwa mengappropriasi non-buruh yang murah adalah syarat mutlak bagi kelangsungan hidup kapital.

Saya ingin menambahkan pendapat Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardi yang memahami krisis sosial-ekologis sebagai krisis yang “diakibatkan oleh ekspansi modal” (lihat Rachman dan Yanuardi, 2008, hal. 68). Krisis dalam kapitalisme bukanlah akibat, melainkan syarat. Dengan kata lain, agar tetap hidup lestari, corak produksi kapitalisme membutuhkan krisis. Secara teoretis, krisis tersebut bukan hanya momen *overproduction*, *over-accumulation* kapital di tangan kapitalis, dan *over-investment* yang menimbulkan kelebihan pasokan produk, melainkan juga melibatkan momen kekurangan bahkan kelangkaan produksi (*aleon*). Dengan kata lain, kondisi aliran non-buruh (energi, bahan bakar, bahan mentah, pangan, tenaga kerja non-buruh) yang murah dari *frontier* tidak cukup untuk memasok kebutuhan sistem.

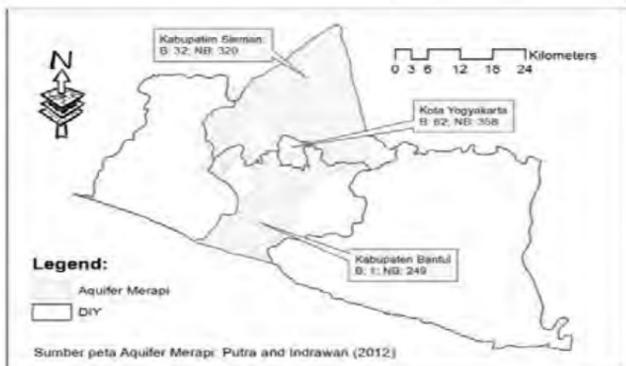
KRISIS ALEON DALAM EKSTRAKSI AIR TANAH YOGYAKARTA

Pada Januari 2018, berdasarkan pengakuan Direktur PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Dwi Agus Triwidodo, tercatat hanya 156 hotel dari total 418 yang menjadi pelanggan air PDAM (Tribun Jogja, 2018). Sisanya (262 hotel) dapat dipastikan mengekstrak air tanah. Lebih parah lagi, meski ada hotel yang memiliki sambungan pipa air PDAM Tirta-

marta, hotel bersangkutan memilih memenuhi kebutuhan air dengan cara mengekstrak air tanah yang gratis (karena bisa “memangkas” biaya operasional) ketimbang menggunakan air PDAM yang berbayar. Bagi pihak hotel, air tanah sungguh merupakan pemberian alam. Air tanah yang gratis itu bisa diekstrak hanya dengan membeli dan membayar biaya operasional mesin pompa air (PDAM Kota Jogja, 2019; Amrta Institute, 2017).

Bagi hotel, biaya membuat sumur air tanah adalah sebuah investasi yang akan diubah menjadi keuntungan melalui penjualan/penyewaan kamar kepada tamu hotel. Dalam rumus III di atas, air tanah “diapropriasi” pihak hotel untuk kebutuhan bisnis mereka dengan menyewakan kamar. Di sini, relasi hotel dengan *aquifer* Merapi diatur oleh nilai-tukar. Air dipompa untuk kemudian diolah sebagai bagian dari dunia komoditas. Hal tersebut bertolak belakang dengan “kegunaan” air sumur di rumah-rumah warga biasa. Mereka memompa/menimba air bukan untuk dipertukarkan lewat mekanisme pasar, tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Relasi mereka dengan *aquifer* Merapi diatur oleh nilai-guna.

Gambar 1. Peta Persebaran *Aquifer* Merapi



Gambar 1 memperlihatkan peta persebaran *aquifer* Merapi. Dalam kasus ini, kemungkinan besar yang mengekstrak air tanah dari *aquifer* Merapi adalah 32 hotel B dan 320 NB di Kabupaten Sleman, 62 hotel B dan 358 hotel NB di Kota Yogyakarta, dan 1 hotel B dan 249 hotel NB di Kabupaten Bantul. Tabel 1 memperlihatkan posisi hotel B dan NB serta

banyaknya tamu bermalam untuk semua hotel di DIY pada 2016. Baris “banyaknya tamu bermalam” pada Tabel 1 sudah dikonversi secara proporsional. Misalnya, ada 96 hotel B di DIY, sedangkan yang diperkirakan mengekstrak air dari *aquifer* Merapi sebanyak 95 hotel. Secara proporsional, banyaknya tamu bermalam di hotel-hotel B yang diperkirakan mengekstrak air tanah dari *aquifer* Merapi = (“jumlah hotel B yang diperkirakan mengekstrak air dari *aquifer* Merapi”: “jumlah hotel B di seluruh DIY pada 2016”) x (“banyaknya tamu bermalam di semua hotel B di DIY pada 2016”). Dalam tampilan angka, banyaknya tamu bermalam di hotel-hotel B yang diduga mengekstrak air tanah dari *aquifer* Merapi = $(95/96) \times (3.371.195) = 3.336.078$ orang (lihat, Tabel 1 dan Tabel 2). Hal yang sama dilakukan untuk hotel-hotel NB.

Jumlah “kamar terpakai” diperoleh dengan membagi “banyaknya tamu bermalam” dengan “rerata tamu per kamar”. Selanjutnya, “kamar terpakai” dikalikan dengan perkiraan pemakaian air per kamar hotel per hari (0,38 m³) dan kemudian dikonversi menjadi nilai moneter (dikalikan dengan Rp 10.500 untuk hotel B dan Rp 5.500 untuk hotel NB, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 56/2013 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirtamarta Yogyakarta). Pada 2016, nilai total moneter air tanah yang diekstrak oleh seluruh hotel (B+NB) dari *aquifer* Merapi di DIY sebesar 8,2 miliar rupiah (Tabel 2)

Pada akhirnya, ekstraksi air tanah menyebabkan permukaan air tanah di Yogyakarta turun secara konsisten. Mengutip penjelasan Totok Gunawan, Guru Besar Hidrologi Fakultas Geografi UGM, permukaan air tanah di Yogyakarta turun 1-2 m/tahun (lihat *Republika*, 2017). Penurunan konsisten itulah yang menciptakan suatu kondisi krisis berupa keringnya sumur-sumur dangkal “milik” warga. Pada titik ini, krisis dimaksud adalah sebuah kondisi tempat aliran air tanah yang murah dari bawah permukaan bumi tidak cukup memenuhi dan “mengimbangi” kekuatan/kecepatan ekstraksi kota yang kapitalistik-parasitik. Itu adalah momen *aleon*.

Tabel 1. Jumlah Hotel serta Banyaknya Tamu di Hotel Berbintang dan Non-Berbintang di Yogyakarta (2016)

	Kabupaten	Kecamatan	Berbintang (B)	Non-Berbintang (NB)
Aquifer Merapi	Kabupaten Sleman		32	360
	Kota Yogyakarta		62	358
	Kabupaten Bantul	Srandakan		4
		Sanden		22
		Kretek		212
		Banguntapan		5
		Sewon	1	6
	Kasih		9	
Total		95	976	
Non-Aquifer Merapi	Gunung Kidul		1	87
	Kulon Progo			26
	Bantul	Pajangan		1
		Piyungan		1
	Total		1	115
Banyaknya tamu bermalam untuk semua hotel di DIY, 2016 (orang)			3.371.195	2.726.129

Tabel 2. Perkiraan Ekstraksi Air Tanah Murah (M) dari *Aquifer* Merapi oleh Hotel B dan NB, DIY (2016)

	Berbintang	Non-Berbintang	Total
Banyaknya tamu bermalam yang menggunakan air tanah	3.336.078	2.438.774	5.774.852
Rerata tamu per kamar	2,54	1,74	
Kamar terpakai	1.313.417	1.401.594	2.715.011
Konsumsi Air (meter kubik)	499.098	532.606	1.031.704
Nilai Moneter Sebagai M (rupiah)	5.240.532.582	2.929.331.405	8.169.863.987

MENUJU TEORI KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS

Dari dialektika teori-kasus kekeringan sumur warga di Yogyakarta yang berlangsung pada momen *overproduction* dan *aleon*, bagian ini akan meneorikan krisis sosial-ekologis sebagai perpaduan keduanya. Dialektika di sini bermakna “menciptakan pergerakan yang riil” (lihat Lefebvre, 2009, hal. 29), dari sebuah pemikiran dilakukan sintesis untuk melahirkan praksis. Peneorian krisis sosialekologis dikerjakan dengan kesadaran bahwa pada dasarnya krisis itu diproduksi. Dalam konteks kapitalisme, krisis dimaksud bukan akibat, tetapi prasyarat. Hal terse-

but membuat proses peneorian akan bersinggungan dengan teori produksi alam (*production of nature*). Berikutnya, dalam kasus krisis kekeurangan sumur warga di Yogyakarta, manusia yang menjalankan kegiatan ekstraksi saling berpilin dengan “faktor” non-manusia yang berperan mengisi kembali *aquifer* Merapi. Proses peneorian ini berupaya memahami keberpilihan itu melalui teori/istilah “*socio ecology*” dan “*socio-nature*.” Terakhir, peran non-buruh dalam proses produksi akan coba dijelaskan melalui konsepsi kapitalisme yang diperluas.

Kita meminjam terminologi yang diperkenalkan Neil Smith untuk memahami bahwa alam itu diproduksi (lihat Smith, 2008). Teorisasi produksi alam (*production of nature*) adalah sebuah upaya merekonstruksi hubungan manusia dan nonmanusia— yang selama ini dianggap alam— yang, menurut Smith, dikonstruksi sebagai entitas yang terpisah. Konstruksi secara terpisah seperti itu merupakan konsekuensi dari pandangan Kartesian yang membuka jalan bagi ekspansi kapitalisme. Dengan memisahkan manusia dari alam, maka akan muncul suatu usaha yang akan menggiring pada bagaimana caranya agar manusia bisa menundukkan alam.

Untuk memahami produksi alam, Smith memaparkan tiga proses produksi: (1) produksi secara umum, (2) produksi alam, dan (3) produksi kapitalistik. Dalam produksi secara umum, relasi manusia dengan alam diatur oleh nilai-guna. Bila seseorang memompa air tanah untuk diambil nilai-gunanya, atau untuk digunakan, maka itu adalah produksi secara umum. Sedangkan di bawah produksi alam, alam diubah dari “alam pertama” menjadi “alam kedua.” “Alam pertama” adalah manifestasi alam di bawah produksi umum; hubungan manusia dengan alam diatur oleh nilai-guna. Sementara “alam kedua” adalah hasil dari produksi alam tempat relasi alam dan manusia diatur oleh nilai-tukar. Jadi, produksi alam bisa dilihat sebagai pergeseran dari nilai-guna ke nilai-tukar dalam kepengurusan relasi manusia dan non-manusia.

Dalam keseharian, nilai-tukar adalah harga sesuatu barang jualan (komoditas). Bila seseorang membor air tanah untuk dijual atau dijadikan sebagai bagian dari dunia komoditas, maka itu berarti dia membor bukan untuk mengambil manfaat dari nilai-guna air, tetapi untuk mendapatkan nilai-tukar dari hasil penjualan air tersebut. Itulah proses

komodifikasi; air dijadikan komoditas atau bagian dari dunia komoditas untuk mendapatkan keuntungan dari proses pertukaran. Di bawah produksi kapitalistik, semua proses produksi bertujuan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian, relasi sosial diatur oleh keuntungan (nilai-lebih).

Neil Smith memakai istilah “produksi alam”, meski dalam buku *Uneven Development* dia menyatakan bahwa alam dan masyarakat/manusia (*nature and society*) sudah tergabung di bawah produksi alam. Namun, dalam bagianbagian tertentu, Smith menyisakan pemilahan biner: alam versus manusia (*nature vs. society*). Hal tersebut dikritik oleh Erik Swyngedouw. Dengan menyatakan alam diproduksi secara sosial berarti ini pengakuan terhadap determinasi proses sosial dan adanya pretensi melanggengkan oposisi biner alam versus manusia (lihat Swyngedouw, 1996, hal. 68-80). Karena itu, kita butuh konsep “ekologi sosial” (*socio ecology*) yang diperkenalkan oleh Murray Bookchin (lihat Bookchin, 1982) dan konsep atau pendekatan “sosio-alam” (*socionature*) Swyngedouw. Ekologi sosial adalah “sebuah pendekatan yang lebih rekonstruktif bagi masalah-masalah serius yang timbul karena ‘kontradiksi’ semu antara alam dan manusia” (lihat Bookchin, 1982, hal. 21). Sedangkan istilah sosio-alam berupaya merekonstruksi manusia dan non-manusia sebagai entitas yang tak terpisahkan.

Kota Yogyakarta memperlihatkan secara sosial-ekologis bangunan hotel yang menjamur, menyumbang terhadap krisis kekeringan sumur warga melalui ekstraksi air tanah. Sumur warga yang kering adalah ekologi sosial, karena merupakan hasil dari ko-produksi manusia dan non-manusia. Dari sisi manusia, adalah hotel-hotel yang mengekstrak air tanah dengan kedalaman sumur relatif lebih dalam dan kekuatan pompa lebih besar. Dari sisi nonmanusia, adalah proses metabolisme *aquifer* yang memberi kesempatan kepada air untuk masuk ke pori-pori batuan bawah tanah melalui daerah tangkapan di sekitar lereng Gunung Merapi hingga sampai di bawah permukaan Kota Yogyakarta (lihat Karnawati, Pamumijoyo dan Hendrayana, 2006, hal. 6-10). Di dalam sumur dangkal warga yang kering sudah tidak bisa dipilah lagi produk manusia dan produk non-manusia. Keduanya berpilin dan berkelindan serta lebur dalam krisis sosial-ekologis di bawah konsepsi kapitalisme

yang diperluas. Non-buruh secara eksplisit diperlihatkan sebagai penyumbang nilai dalam proses akumulasi kekayaan bagi kapitalis. Pada gilirannya, krisis sosial-ekologis menghasilkan ketidakadilan sosial-ekologis akses terhadap air, baik dari segi jumlah maupun mutu.

KETIDAKADILAN SOSIAL-EKOLOGIS

Dibandingkan dengan sumur warga, sumur hotel memiliki kedalaman lebih dalam dengan tenaga pompa lebih kuat. Itu terjadi mengingat hotel yang bergerak di sektor komersial memiliki modal lebih besar untuk mengoperasionalkan peralatan sumur air tanahnya. Tak pelak, sumur warga yang lebih dangkal dengan kekuatan pompa lebih kecil, bahkan terkadang sumur tradisional yang menggunakan timba, menjadi kering dan tak berdaya. Pada 2014, media massa memberitakan sebuah hotel di Yogyakarta, yakni Hotel Fave, memiliki kedalaman sumur air tanah 80 m (lihat *Tribun Jogja*, 2014). Sementara itu, kedalaman sumur warga jauh lebih dangkal, rata-rata 16-20 m, itu pun sumur yang sudah diperdalam karena terjadinya kekeringan (lihat *Wicaksono*, 2014). Dari segi biaya, pembuatan sumur hotel bisa menelan biaya 400-500 juta rupiah (lihat *Amrta Institute*, 2017). Sementara pemasangan sumur bor warga dengan kedalaman maksimal 30 m makan biaya sekitar 15 juta rupiah⁴.

Tidak mengherankan, tatkala sebuah hotel dibangun di wilayah tertentu, sumur warga di sekitar hotel ini bisa mengalami kekeringan parah seperti yang dialami oleh warga Kampung Miliran. Warga menduga kehadiran Hotel Fave dengan sumurnya yang dalam adalah penyebab sumur warga mengalami kekeringan. Sebelum tahun 2014, sumur-sumur warga di daerah sekitar itu tidak pernah kering pun bila memasuki musim kemarau panjang (lihat *Kompas*, 2014).

⁴ Setidaknya ada tiga komponen utama dalam pemasangan sumur bor di rumah warga: (1) sumurnya sendiri; (2) pompa air; dan (3) pemasangan pompa. Untuk biaya pemboran sumur cukup banyak informasi tersedia di internet. Misalnya, dalam <http://www.ahlisumurboryogyakarta.com/> disebutkan bahwa biaya pemasangan sumur bor dangkal sebesar Rp 250.000–300.000 per meter. Untuk sumur sedalam 30 m, pengeluaran untuk komponen itu berjumlah maksimal 7,5 juta rupiah. Untuk komponen pompa air, laman <http://www.liatharga.com/harga-pompa-air/>, menyebutkan harga sekitar 3 juta rupiah untuk pompa air yang memiliki kemampuan memompa dari kedalaman lebih dari 9 m. Sementara untuk pemasangan pompa, ongkosnya separuh dari jumlah biaya pemboran dan harga pompa, sekitar 5 juta rupiah. Total biayanya berkisar 15 juta rupiah.

Kasus perebutan sumber daya kerap memperlihatkan bagaimana sejumlah pakar berperan sentral dalam membentuk opini. Itu adalah rumus baku neoliberalisme yang alergi dengan suara rakyat banyak, karena mengancam hak individu yang merupakan sendi neoliberalisme (lihat Harvey, 2005a, hal. 66). Itu juga merupakan suatu cara untuk memenangkan korporasi yang biasanya lebih bisa “menggerakkan” para pakar—seolah tampak netral karena menggunakan pakar—dibandingkan dengan rakyat yang senantiasa menjadi korban. Hal tersebut sejalan dengan neoliberalisme yang menjanjikan kebebasan—bagi yang kaya dan kuat. Selanjutnya, sesuai dengan hukum besi AbD, si kuat menundukkan dan merampas si lemah hingga tandas.

Sebagaimana diidentifikasi oleh Noel Castree (lihat Castree, 2001, hal. 189-207), para pakar tidak eksis dalam dunia vakum. Sedikit banyak mereka dipengaruhi oleh tujuan lembaga tempatnya bekerja. Dalam kasus lumpur Lapindo, misalnya, para geolog yang berafiliasi dengan korporasi ini tentu tidak akan menampilkan opini yang merugikan pihak korporasi (lihat Batubara dan Utomo, 2010, hal. 67-96). Dalam kasus PT Semen Indonesia (SI) di Rembang, sebagian besar pakar memberi kesaksian yang membela PT SI (lihat Batubara, 2015, hal 55-64). Pada dasarnya, mereka adalah perpanjangan paradigma Kartesian yang sejak awal berasumsi sanggup “mengontrol alam” dan saat yang bersamaan kepakaran mereka turut membantu membuka dan melapangkan jalan bagi ekspansi kapital.

Itu pula yang terjadi dalam kasus kekeringan sumur warga di Kampung Miliran. Sebagian pakar merasionalisasikan bahwa proses ekstraksi air tanah oleh pihak hotel masih dalam tahap yang dapat diterima dan tidak berdampak buruk. Bahkan, salah seorang pakar membantah klaim warga dengan mengatakan keringnya sumur dangkal warga bukan disebabkan oleh kehadiran sumur dalam “milik” Hotel Fave, melainkan oleh kemarau panjang. Selain itu, dia berargumentasi bahwa telah dilakukan *pumping test* (pemompaan untuk menguji) untuk melihat relasi antara air tanah dalam dan dangkal di daerah itu pada 2012. Setelah pompa sumur Hotel Fave dihidupkan terus-menerus selama 8,45 jam terjadi penurunan muka air tanah di sumur dalam, namun tidak terjadi penurunan di sumur dangkal milik warga. Yang terjadi justru kenaikan

permukaan air tanah setinggi 8 cm di sumur dangkal milik warga. Dia memperkuat pendapatnya dengan membeberkan bahwa pada kedalaman 40 m di bawah tanah ada lapisan batu lempung setebal 6 m yang memisahkan air tanah dangkal dan air tanah dalam.

Bila ditelisik lebih jauh, salah satu kepentingan sang pakar atau pejabat itu adalah untuk menunjukkan bahwa lembaganya telah bekerja dengan baik. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup adanya kemungkinan lain. Penulis sendiri merasa pendapat yang disampaikan tidak didukung bukti-bukti teknis yang meyakinkan. Alur pemikirannya sebagai berikut. Mungkin saja dia benar bahwa melalui penyelidikan geologis diketahui ada lapisan lempung yang memisahkan air tanah dangkal dan air tanah dalam. Namun, dia tidak menjelaskan apakah lapisan itu sama sekali tidak bisa dilewati air. Begitu pula soal *pumping test*. Penurunan permukaan air tanah dangkal mungkin saja tidak terdeteksi saat dilakukan pengukuran, karena tertahan lapisan lempung di kedalaman 40 m. Secara akal sehat, lapisan lempung bisa melalukan air (permeabilitas) meski relatif kecil dibanding lapisan batu pasir. Namun, setelah lewat waktu tertentu, dampak penurunan muka air tanah dangkal tersebut pasti terdeteksi. Hal itu terbukti setelah sumur Hotel Fave disegel Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Air di sumur warga Miliran kembali “muncul” (lihat Astuti, 2017, hal. 104).

Secara skematis, ketidakadilan sosial-ekologis akses terhadap air tanah berdasarkan kasus kekeringan sumur dangkal warga di sebagian wilayah Yogyakarta dengan pendekatan kuantitas dan mutu disajikan dalam Tabel 3 yang memperlihatkan dengan jelas bekerjanya hukum besi memangsa dan merampas hingga kandas dan tandas; sumur hotel “menang” berkali-kali dan sumur warga “kalah” berulang-ulang.

Tabel 3. Kontradiksi Sumur Hotel versus Sumur Warga: Skema Ketidakadilan Sosial-Ekologis dalam Kasus Kekeringan Sumur Dangkal Warga di Yogyakarta

No.	Sumur Hotel	Sumur Warga	Skor (keterangan)
1	Modal besar	Modal kecil	1:0
2	Nilai-tukar	Nilai-guna	2:0 (dengan nilai-tukar pemilik hotel mendapatkan untung)
3	Dalam	Dangkal	3:0
4	Pompa lebih kuat	Pompa lebih lemah	4:0
5	Tidak kering	Kering	5:0
6	Air lebih bersih	Air lebih tidak bersih	6:0
7	Dibela pakar	Tidak dibela pakar	7:0

MENUJU KEADILAN SOSIAL-EKOLOGIS: GERAKAN ANTI-KAPITALISME

Untuk memahami keadilan sosial-ekologis, bagian ini melakukannya dengan meminjam strategi diskusi Socrates yang berangkat dari soal ketidakadilan (lihat Plato, 2000). Dengan kata lain, kita belajar ketidakadilan sosial-ekologis agar bisa memiliki bayangan/mimpi/utopia tentang apa yang dimaksud keadilan sosial-ekologis. Bila kekeringan adalah krisis sosial-ekologis serta kontradiksi antara sumur dalam hotel dengan sumur dangkal warga adalah ketidakadilan sosial-ekologis, maka keadilan sosial-ekologis adalah visi tentang jalan yang bisa diambil untuk memberantas ketidakadilan sosial-ekologis.

Dari pemaparan di atas dapat disebutkan bahwa ke(tidak)adilan sosial-ekologis adalah “proses” sekaligus “produk.” Ke(tidak)adilan sosial-ekologis perlu dilihat sebagai satu proses untuk mengelak jatuh ke lembah penafsiran liberal yang tidak terlalu memperhatikan proses produksi bagaimana suatu tatanan dihasilkan. Penafsiran liberal lebih mengindahkan hasil/produk. Bagi penafsiran itu, air adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi. Namun, karena orientasinya adalah “pemenuhan”, tafsir liberal akan sangat mungkin menerima kepengurusan air yang diprivatisasi (lihat Baker, 2010, hal. 150). Sebaliknya, tafsir non-liberal (sebut saja tafsir kritis) sangat memper-

hatikan proses produksi. Walaupun salah satu tujuannya adalah juga pemenuhan akses atas air, tafsir kritis tetap mempermasalahakan bagaimana dan melalui proses kepengurusan seperti apa akses terhadap air dipenuhi. Bila dipenuhi lewat pola neoliberal dengan kepengurusan air diserahkan pada mekanisme pasar dan berkeyakinan bahwa ini cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan akses terhadap air, maka tafsir kritis cenderung menolaknya. Penolakan itu bersumber pada pemahaman bahwa ada orang/keompok/perusahaan yang akan mendapatkan ruang lebih lapang dalam mengakumulasi kekayaan dengan cara perampasan di sektor penyediaan akses atas air, yang pada hakikatnya milik bersama atau tak berpemilik. Dengan demikian, keadilan sosial-ekologis yang dimaksud tulisan ini bertengger pada tradisi kritik terhadap kapitalisme.

Konsepsi “kapitalisme yang diperluas” membantu kita melihat kasus-kasus yang melibatkan apropriasi terhadap energi, bahan mentah, bahan makanan dan minuman, serta tenaga kerja non-buruh yang murah, sebagai bagian dari proses produksi kapitalisme. Dengan demikian, kita bisa melihat sebuah peluang membangun gerakan yang lebih terkoneksi antar berbagai sektor dan lintas area (misalnya, gerakan anti-industri ekstraktif, lingkungan, buruh, agraria, perempuan, kaum miskin kota, pembantu rumah tangga, dan lain-lain).

Mungkin terlihat utopis menjadikan nilai-guna (*use-value*) sebagai tujuan perjuangan menggeser nilai-tukar (*exchange-value*) dan nilai-lebih (*surplus-value*), baik yang berhubungan dengan manusia maupun non-manusia. Namun demikian, amat sangat penting memahami arah gerakan yang hendak dan sedang dibangun. Dalam kasus kekeringan air sumur dangkal di sebagian wilayah DIY dan kepengurusan *aquifer* Merapi, demi sebuah keadilan sosial ekologis, sudah seharusnya nilai-guna menjadi sumbu dalam tapak sosio-spasial yang mengatur interaksi manusia dengan *aquifer*. Artinya, air dari *aquifer* Merapi bukan untuk kepentingan komersial dan bukan untuk dijadikan bagian dari dunia komoditas, namun untuk digunakan oleh semua orang yang hidup di atasnya.

Pada dasarnya, tidak pernah ada satu resep untuk semua masakan. Di era akumulasi kapital melalui perampasan yang muncul dengan berbagai variasi pilar dan mekanisme, namun dengan hukum besi yang

seragam, agaknya perlu juga disusun sebuah sketsa mengenai arah gerakan anti-kapitalisme. Keunikan masing-masing kasus akan mengantar kita pada satu titik bahwa semua kasus harus mengembangkan alternatifnya secara organik. Yang perlu dibangun adalah koneksi, solidaritas, dan relasi horizontal antar-kasus (lihat Springer, 2016). Revolusi-progresif kapitalisme telah menjejali ruang, maka untuk itu dibutuhkan satu gerakan anti-kapitalisme yang juga bisa menyესaki ruangan. Jalan yang paling mungkin ditempuh adalah dengan menciptakan ulang kepengurusan/kepemilikan bersama, atau tanpa kepemilikan sama sekali, dalam sektor-sektor sumber daya produktif sebagai antitesis kepengurusan/kepemilikan privat.

Ada banyak contoh kepengurusan bersama. Misalnya, usaha koperasi yang dipraktikkan dalam sektor perumahan di negeri Denmark atau koperasi di sektor pelayanan air minum di Bolivia. Namun demikian, sangat penting untuk tetap hati-hati agar skema melalui koperasi tidak terjerembap ke dalam proses gentrifikasi (lihat Leach, 2016). Bentuk lain yang dapat dipraktikkan adalah kepengurusan tanah di perkotaan berupa *community land trust* (lihat Mackenzie, 2018), atau juga tanah-tanah komunal/adat yang sampai sekarang masih dapat ditemui di lereng-lereng Bukit Barisan, Sumatera. Kepengurusan bersama tanpa kepemilikan, misalnya, adalah kepengurusan sungai-sungai di desa-desa kawasan Bukit Barisan. Semua alternatif tersebut hanya akan berjalan bila ada yang mengerjakan dan praksis-praktik dengan bekal/pemahaman teoretis-seperti itu dimulai, mengikuti formulasi Springer, sebagai gerakan di sini dan sekarang (lihat Springer, 2016, hal. 20).

REFERENSI

- Air Tanah di Kota Yogyakarta Turun 1-2 Meter per Tahun. (2017). Diakses 28 Maret 2019, dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/12/ow6338291-air-tanah-di-kota-yogyakarta-turun-12-meter-per-tahun>
- Amrta Institute. (2017). *Jogja Darurat Air: Laporan Hari Air Sedunia 2017*. Semarang: Amrta Institute.

- Astuti, Wahyu Kusuma. (2017). Air dan Dialektika Kota Pariwisata: Merebut Ha katas Kota dan Air di Yogyakarta dalam Wacana Vol. XIX, No. 35
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016). Direktori Hotel dan Akomodasi Lain Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik DIY.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). Tingkat Penghunian Kamar Hotel (Occupancy Rate of Hotel Room). Yogyakarta: BPS DIY.
- Bakker, Karen. (2010). Privatizing Water: Governance Failure and the World's Urban Water Crisis. Ithaca: Cornell University Press.
- Batubara, Bosman dan Paring Waluyo Utomo. (2010). Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencaran Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo. Yogyakarta: Insist Press.
- Batubara, Bosman. Benarkan Batu di Rembang Tidak Memiliki Sumber Air? Dalam Dwicipta Ardianto HT (ed), #RembangMelawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng. Yogyakarta: Literasi Press.
- Belasan Hotel di Yogya Diperiksa Izin Penggunaan Air Tanah. (2014). Diakses 28 Maret 2019, dari <https://nasional tempo.co/read/621799/belasan-hotel-di-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-airtanah/full&view=ok>
- Bookchin, Murray. (1982). The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. California: Cheshire Books.
- Castree, Noel. (2001). Marxism, Capitalism, and the Production of Nature dalam Noel Castree dan Bruce Braun (eds), Social Nature: Theory, Practice, and Politics. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.
- Fraser, Nancy. (2014). Behind Marx's Hidden Abode: For an Expanded Conception of Capitalism dalam New Left Review 86.
- Gramsci, Antonio. (2000). The Gramsci Reader: Selected Writing 1916-1935 disunting oleh David Forgacs. Washington: New York University Press.

- Hall, Derek. Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab dalam *Third World Quarterly* Vol. 34, No. 9.
- Harvey, David. (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University.
- Harvey, David. (2004). *The New Imperialism: Accumulation by Dispossession* dalam *Socialist Register* Vol. 40.
- Harvey, David. (2005a). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University.
- Harvey, David. (2005b). *Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development*. Munchen: Franz Steiner Verlag.
- Harvey, David. (1981). *The Spatial Fix – Hegel, Von Thunen, and Marx* dalam *Antipode* Vol. 13, No. 3.
- Harvey, David. (1982). *The Limits to Capital*. London: Verso.
- Harvey, David. (2010). *The Enigma of Capital*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, David. (2012) *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London: Verso.
- Harvey, David. (2001). *Globalization and the Spatial Fix*. Diakses 4 November 2017, dari ps://publishup.unipotsdam.de/files/2251/gr2_01_Ess02.pdf
- Jatam, Kiara, ICW, KontraS, KruHA. (2018). *Ijon Melanggengkan Krisis Sosial Ekologis*. Diakses 19 Juni 2019, dari <https://www.jatam.org/2018/03/14/ijon-politik-pilkada-melanggengkan-krisis-sosial-ekologis/>
- Karnawati, Dwikorita; Subagyo Pramuwijoyo; dan Heru Hendrayana. (2006). *Geology of Yogyakarta, Java: The Dynamic Volcanic arc City* dalam *The 10th IAEG International Congress*, Nottingham, Makalah No. 363
- Kompas. (2014). *Sumur Kering, Warga Jogja Aksi Mandi Tanah di Depan Hotel*. Diakses 28 Maret 2019, dari <https://regional.kompas.com>

/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering. Warga.Jogja.Aksi.
Mandi.Tanah.di.Depan.Hotel

- Leach, Joanna. (2016). *Shared Property, Shared Capital, Shared Value? The Danish Andelsbolig Housing Model in Transition*. PhD Thesis: The University of Sheffield.
- Lefebvre, Henri. (1973). *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production*. London: Allison & Bubsy.
- Lefebvre, Henri. (2009). *Dialectical Materialism*. Menneapolis: University of Minesota.
- Luthfi, Ahmad Nashih. (2017). *Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis dalam Jurnal Wacana, Tahun XIX, No. 36*.
- Luxemburg, Rosa. (2003). *The Accumulation of Capital*. New York: Routledge.
- Mackenzie, A. Fiona D. (2018). *Places of Possibility: Property, Nature and Community Land Ownership*. Sussex: Willey Blackwell.
- Marx, Karl. (1982). *Capital: A Critique of Political Economy Volume 1*. London: Penguin Books in association with New Left Review.
- Marx, Karl. (1993). *Grundrisse: Foundation of the Critique of Political Economy*. London: Penguin Books in association with New Left Review.
- Marx, Karl dan Friedrich Engels. (2008). *The Manifesto of the Communist Party*. London: Pluto Press.
- Moore, Jason W. (2015). *Capitalism in the Web of Life*. London: Verso.
- Pembalikan Krisis Sosial Ekologis dan Pengurusan Publik: Berpikir Bersama untuk Indonesia. (2019). Diakses 19 Juni 2019, dari <https://www.itb.ac.id/news/read/2788/home/pembalikan-krisis-sosial-ekologis-dan-pengurusan-publik-berpikir-bersama-untuk-indonesia>
- PDAM Kota Jogja. (2019). *Sumber Air Baku dan Wilayah Pelayanan*. Diakses 28 Maret 2019, dari <http://pdamkotajogja.co.id//sumber-airbaku-dan-wilayah-pelayanan> (diakses pada 28 Maret 2019)
- Plato. (2000). *The Republic*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Putra, Doni Prakasa Eka dan I Gde Budi Indrawan. (2014). Assessment of Aquifer Susceptibility Due to Excessive of Groundwater Abstraction: A Case Study of Yogyakarta-Sleman Groundwater Basin dalam *ASEAN Engineering Journal Part C*, Vol. 3, No. 2
- Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardi. (2014). *MP3EI-Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Republika. (2017). Air Tanah di Kota Yogyakarta Turun 1-2 Meter per Tahun. Diakses 28 Maret 2019, dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/12/ow6338291-air-tanah-di-kota-yogyakarta-turun-12-meter-per-tahun>
- Sangkoyo, Hendro. (2018). "Menyikapi Ko-Evolusi Ekonomik, Sosial dan Ekologis: Beberapa Pertimbangan tentang Lokasi Rerantai Ekonomik" dalam *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* Vol. 1, No.2.
- Sangkoyo, Hendro. (2016). Tentang SDE dan Gerilya Pemulihan Krisis. Diakses 21 Juni 2019, dalam <http://membacaruang.com/hendro-sangkoyo-tentang-sde-dan-gerilya-pemulihan-krisis/>
- Setyawan, Wahyu Eka. (2018). Catatan Menjelang Pilkada Jawa Timur: Mempertanyakan Komitmen Cagub/Cawagub Jatim dalam Konteks Keadilan Sosial-Ekologis. Diakses 19 Juni 2019, dari <http://walhijati.or.id/2018/04/catatan-menjelang-pilkada-jawa-timur-mempertanyakan-komitmen-cagub-cawagub-jatim-dalam-konteks-keadilan-sosial-ekologis>.
- Sumber Air Baku dan Wilayah Pelayan. Diakses 28 Maret 2019, dari <http://pdamkotajogja.co.id//sumber-air-baku-dan-wilayah-pelayanan>
- Smith, Neil. (2008). *Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space* (3rd Edition). London: The University of Georgia Press.
- Springer, Simon. (2016). *The Anarchist Roots of Geography: Toward Spatial Emancipation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Swyngedouw, Erik. (1996). *The City as a Hybrid: On Nature, Society and Cyborg Urbanization dalam Capitalism Nature Socialism* Vol. 7, No. 2
- Tribun Jogja. (2014). BLH: Sumur Kering Karena Musim Kemarau. Diakses 28 Maret 2019, dari <http://jogja.tribunnews.com/2014/08/07/blh-sumur-kering-karena-musim-kemarau>
- Tribun Jogja. (2018). Ratusan Hotel di Jogja Pilih Sedot Air Tanah Ketimbang Pakai Air PDAM. Diakses 28 Maret 2019, dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/15/ratusan-hotel-di-jogja-pilih-sedot-air-tanah-ketimbang-pakai-air-pdam>
- Wardhani, Christi Mahatma. (2018). PHRI DIY: Kalau Okupansi Hotel di Bawah 60 Persen, Persaingan Pasti Tidak Sehat. Diakses 28 Maret 2019, dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/31/phri-diy-kalau-okupansi-hotel-di-bawah-60-persen-persaingan-pasti-tidak-sehat> (diakses 28 Maret 2019).
- Watchdoc. (2015). *Belakang Hotel*. Diakses 28 Maret 2019, dari <https://www.youtube.com/watch?v=mGwS78pMPmU>
- Wicaksono, Pribadi. (2014). *Belasan Hotel di Yogya Diperiksa Izin Penggunaan Air Tanah*. Diakses 28 Maret 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/621799/belasan-hotel-di-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-airtanah/full&view=ok>
- Wijaya, Kusuma. (2019). *Pemkot Yogyakarta Cabut Moratorium Pembangunan Hotel Secara Terbatas*. Diakses 28 Maret 2019, dari <https://regional.kompas.com/read/2019/01/02/23534541/pemkot-yogyakarta-cabut-moratorium-pembangunan-hotel-secara-terbatas>
- Wood, Ellen Meiskins. (2002). *The Origin of Capitalism: A Longer View*. London: Verso.
- Yanuardi, Dian dan Swanviri. (2014). "Mengapa MP3EI ada? Mengapa Sekarang?" dalam Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardi (eds.), *MP3EI-Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

KRITIK EKONOMI-POLITIK RAPS SEBAGAI INSTRUMEN PEMBARUAN AGRARIA SEMESTA

Roy Murtagho

ABSTRAK

Reforma agraria merupakan program pembangunan berorientasi populis yang sangat penting sebagai landasan pembangunan ekonomi. Tanpanya agenda pembangunan ekonomi akan menjadi pincang dan makin melanggengkan ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh pembiaran kesenjangan penguasaan sumber-sumber agraria, seperti sekarang kita saksikan. Kebijakan agraria yang mengadopsi terminologi reforma agraria bukannya dalam rangka menjalankan pembaruan agraria secara konsisten dan menyeluruh, melainkan sebagai mekanisme akses atas tanah untuk keperluan dan kepentingan modal besar yang diresapi formula kebijakan ekonomi Pasca-Konsensus Washington.

Kata-kata Kunci: neoliberalisme, Konsensus Washington, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, UUPA

Setelah sekian lama reforma agraria tidak terdengar sejak pertama kali UUPA di-peti-es-kan di masa Orde Baru, perlahan-lahan terminologi tersebut mulai diperkenalkan kembali melalui program agraria pemerintah, terutama sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilanjutkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, terminologi reforma agraria telah menjadi pembicaraan dan perdebatan hangat di kalangan pengkaji, pegiat agraria, dan masyarakat luas.

Sebagian pihak meletakkan kebijakan agraria pemerintah sebagai arena politik yang bisa menjadi peluang bagi pembaruan agraria di Indonesia,¹ minimal dapat diintervensi oleh gerakan agraria bagi instru-

1 Dalam posisi ini, bisa disebut di antaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). KPA mengajukan usulan peta prioritas objek reforma agraria secara partisipatoris, namun secara organisasional tidak pernah mengeluarkan pernyataan menolak RAPS. Bahkan, mereka menggelar hajatan International Land Coalition (ILC) bertajuk Global Land Forum bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kantor Staf Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

men penyelesaian konflik agraria, yang nyaris belum terang arahnya. Bagi mereka, pengadopsian terminologi reforma agraria ke dalam kebijakan pertanahan pemerintah dianggap sebagai langkah maju setelah sekian lama perjuangan pembaruan agraria mengalami jalan buntu. Karena itu, kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) dilihat sebagai kesempatan politik yang harus didukung, seartifisial apa pun pelaksanaannya.

Sementara itu, pihak lainnya melihat kebijakan RAPS telah mereduksi terminologi, konsepsi, dan implementasi reforma agraria sejati (*genuine*) sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.² Alih-alih merombak struktur agraria dan jalan penyelesaian konflik, karena pelaksanaannya yang artifisial, RAPS justru dinilai sebagai penghalang utama bagi pelaksanaan pembaruan agraria secara menyeluruh untuk dijalankan di Indonesia. Selain itu, RAPS dipandang tak lebih sebagai agenda pemerintah yang memberi jalan dan akses tanah untuk kepentingan modal besar melalui skema legalisasi (sertifikasi) tanah.

Berangkat dari kondisi politik, konjungtur gerakan agraria dan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah, perlu suatu analisis terhadap jenis kebijakan agraria yang sedang dijalankan pemerintah, dengan mengajukan kritik dari perspektif ekonomi-politik, dan landasan hukum UUPA, untuk menguji kemungkinan dan ketidakmungkinannya sebagai instrumen perombakan struktur penguasaan serta penyelesaian konflik di sektor agraria di Indonesia. Signifikansi dari analisis itu terletak pada aspek pembongkarannya terhadap relasi antara strategi pembangunan ekonomi berhaluan neoliberal di satu sisi dengan upaya pemerintah menjalankan pembaruan agraria di sisi lainnya. Keduanya saling mengandaikan dan mengait satu sama lain. Pada dasarnya, strategi pembangunan ekonomi merupakan kebijakan payung yang menen-

dan Komnas HAM pada tanggal 24-27 September 2018 di Bandung; lihat, <https://konferensitenurial2017.id/percepat-reforma-agraria-kpa-tawarkan-lpra/> (diakses 12 September 2019).

2 Dalam posisi ini, antara lain, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan organisasi tani lokal yang tidak tergabung dalam KPA. Sejak 2017, mereka secara tegas menolak pelaksanaan kebijakan agraria yang diberi label Reforma Agraria oleh pemerintah Jokowi; lihat, misalnya, <https://www.suaralidik.com/agra-menolak-reforma-agraria-palsu-jokowi-dan-tidak-bergabung-aksi-knpa/> (diakses 12 September 201

tukan orientasi pelbagai kebijakan sektoral lainnya. Semua kebijakan ditentukan oleh kebijakan dan haluan ekonomi yang dijalankan.

Dalam hal strategi pembangunan ekonomi, negara-negara kapitalisme pinggiran telah lama didikte institusi ekonomi global, seperti Bank Dunia, IMF dan organisasi perdagangan dunia (WTO), untuk mengintegrasikan ekonomi mereka ke dalam sistem ekonomi global. Dalam konteks liberalisasi pasar di negara-negara kapitalisme pinggiran, tugas IMF dan Bank Dunia adalah merangkul berbagai korporasi swasta agar berinvestasi di negara-negara tersebut, dengan asumsi bahwa investasi itu secara otomatis akan berdampak positif bagi “pembangunan.” Padahal, tujuan utama dari semua korporasi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin bagi para pemegang saham mereka dan sama sekali bukan untuk memacu perkembangan pembangunan ataupun demokrasi di negara-negara miskin. Itu sebabnya mengapa korporasi kerap menjalin kerja sama yang erat (*hand-in-glove*) dengan para diktator atau pemimpin otoriter pelanggar HAM di negara-negara kapitalisme pinggiran (lihat Danaher, 2005).

BENTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERORIENTASI PASAR

Bila dicermati, semua arah kebijakan ekonomi Indonesia dari masa ke masa, terkecuali periode pemerintahan Soekarno, adalah upaya pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem kapitalisme global daripada sebagai rencana pembangunan untuk kedaulatan ekonomi nasional, seperti visi yang pernah diperjuangkan oleh para pendiri Republik ini yang termaktub di dalam UUD 45 pasal 33. Sejak ditumbangkannya pemerintahan populis Soekarno, seluruh produk hukum berorientasi kerakyatan seperti UUPA dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) di-peti-eskan dan diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA),³ yang menandai dibukanya investasi modal asing di Indonesia. Terbitnya UUPMA disusul dengan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, secara total mengubah haluan politik dan ekonomi Indonesia

3 Pada tahun yang sama (1967), pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

dari sebelumnya bercorak populistik (membatasi peran swasta dan modal asing) menuju jalan kapitalisme dengan menerapkan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) terhadap modal asing⁴ (lihat Hertz, 2004, hal. 40-73). Alih-alih melanjutkan reforma agraria, Soeharto malah memilih menerapkan revolusi hijau yang selaras dengan kepentingan ekonomi global sekaligus mendapat dukungan besar dari Bank Dunia

Pada saat hampir bersamaan (sejak tahun 1970-an), Amerika Latin, khususnya Chile, dijadikan sebagai kawasan proyek rintisan penswastaaan sumber daya negara dan aset publik negara-negara berkembang, yang ditandai dengan penggulingan pemerintahan sosialis demokratis Salvador Allende melalui operasi militer. Kudeta berdarah Augusto Pinochet itu mendapat dukungan penuh Amerika Serikat. Setelah itu, Chile menswastanisasi 521 dari 524 BUMN-nya sejak dibukanya kebijakan pintu terbuka (lihat Kikeri, 2007, hal. 10). Situasi dan nasib hampir sama terjadi di belahan negara-negara kapitalisme pinggirannya (lihat Amin, 1976; Cardoso, 1979; Frank, 1969).

Setelah tumbanganya Soekarno, pemerintah otoriter Orde Baru menjadikan pertumbuhan ekonomi ala Rostow sebagai landasan dan panglima pembangunan jangka panjang yang ditetapkan secara berkala lima tahunan yang dikenal dengan nama Pembangunan Lima Tahun (Pelita) (lihat Fakih, 2001, hal. 55-57). Para pendukung teori pertumbuhan yang mengandaikan modernisasi sebagai metafora pertumbuhan layaknya organisme, berasumsi bahwa transformasi dari tradisionalisme ke modernisme adalah keniscayaan yang tak bisa dielakkan sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh negara-negara Dunia Ketiga bila menghendaki “kemajuan” melalui pertumbuhan ekonomi.

Berangkat dari kerangka pikir pembangunan seperti itu, pemerintah mengundang modal asing untuk berlomba menguasai ribuan— bahkan ratusan ribu— hektar tanah di Indonesia dalam pelbagai bentuk konsesi kehutanan dan pertambangan yang memicu terjadinya perampasan tanah, konflik agraria, pelanggaran HAM, dan perusakan lingkungan. Secara kalkulasi kapitalistik, kedua sektor ekstraktif itu, menyumbang

⁴ Pada masa ini, dalam konteks Perang Dingin, AS banyak menggelontorkan pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan syarat negara bersangkutan “berkenan” meliberalisasi arah ekonominya untuk modal asing. Kelak, skema seperti itu memicu terjadinya krisis utang seperti yang dialami Indonesia.

peningkatan produk utamanya: kayu, migas, dan emas (lihat Mas' oed, 1989; Bachriadi, 1998).⁵ Dengan demikian, aktor utama penggerak modernisasi dan pembangunan (kapitalistik dan otoriter) adalah negara melalui aparturnya: birokrat sipil dan militer (lihat Tjahjono, 2004, hal. 54).⁶ Model kebijakan seperti itu dikenal sebagai jalan kapitalisme negara (Lihat Petras, 1978, hal. 86-87), pemerintah tidak sepenuhnya mengadopsi ekonomi liberal dengan meminimalisasi intervensi negara dalam urusan ekonomi, melainkan menjadi motor penggerak utama ekonomi melalui kapitalisme kroni sekaligus menjadi pelayan kepentingan kapitalisme global melalui pelbagai investasi modal asing di sektor sumber daya alam.

Di masa pasca-Reformasi, oligarki dengan cepat melakukan konsolidasi di tengah surutnya gerakan populer (lihat Ford dan Pepinsky, 2014),⁷ yang mengakibatkan macetnya perubahan struktur sosial yang egaliter dan berkeadilan di Indonesia. Kondisi seperti itu membuka peluang besar bagi pengintegrasian kembali ekonomi nasional ke trajektori kapitalisme global. Orientasi pembangunan ekonomi Indonesia kemudian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan para *chief executive officer* (CEO) APEC di Nusa Dua, Bali, 6 Oktober 2013. Dalam pidato pembukaan, SBY mengatakan,

“Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Dalam waktu 14 tahun ke depan, kami menargetkan 450 miliar dolar AS untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telekomunikasi. Karena itu, Master Plan ini memberikan kesempatan besar bagi investor internasional. Akhirnya, dalam kapasitas sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia (*chief salesperson of Indonesia Inc.*), saya mengun-

5 Antara tahun 1967-1971, nilai ekspor kayu dan migas masing-masing naik 47 kali lipat dan 4 kali lipat. Sementara itu, nilai penanaman modal asing mencapai 2,5 miliar dolar AS.

6 Di masa Orde Baru, banyak perwira Angkatan Darat dikirim ke AS untuk belajar sekaligus menjadi bagian dari konspirasi kepentingan kapitalisme global, khususnya AS, di Indonesia.

7 Tentang perspektif kritis bagaimana oligarki mampu mengonsolidasikan dan menyesuaikan diri dalam sistem demokrasi prosedural serta mempertahankan kesenjangan ekonomi di Ind

dang Anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia”.

Pidato tersebut menjadi penanda baru bagi komitmen negara sepenuhnya mengundang modal asing untuk berinvestasi di semua bidang di Indonesia melalui mantra: “investasi, investasi, investasi!”, yang kemudian dilanjutkan pemerintahan Jokowi dengan mantra baru: “kerja, kerja, kerja!” Dengan demikian, adalah sebuah kekeliruan bila melihat trajektori pembangunan ekonomi SBY dan Jokowi sama sekali berbeda dan tidak saling mengait. Kisah sukses pembangunan Jokowi yang banyak dipuji eksponen liberal di Indonesia justru memperoleh landasan politik dan yuridisnya dari pemerintahan sebelumnya.

Strategi pembangunan yang telah ditempuh pemerintah, yakni kebijakan ekonomi berorientasi pasar dengan mengundang modal sebesar-besarnya untuk berinvestasi, mekanisme pembangunan melalui utang, meminimalisasi intervensi negara dalam urusan ekonomi, kebijakan upah murah, dan memangkas subsidi sosial, adalah ciri-ciri umum kebijakan yang kerap disebut oleh para ekonom dan pengamat sosial sebagai neoliberalisme. Sebagaimana diketahui, neoliberalisme setidaknya memiliki tiga komponen utama. *Pertama*, menaikkan peran pasar (melebihi peran pemerintah) dalam pengelolaan ekonomi dan mediasi arus barang dan modal (melalui penghapusan bantuan dan patokan harga, perdagangan bebas, nilai tukar yang ditentukan pasar, dan lain-lain). *Kedua*, meningkatkan peran dan lingkup serta hak milik sektor swasta (melalui swastanisasi, deregulasi, dan lain-lain). *Ketiga*, menggambar-gemborkan gagasan kebijakan ekonomi yang kuat melalui anggaran berimbang, fleksibilitas pasar tenaga kerja, laju inflasi rendah, dan lain-lain (lihat Chang dan Grabel, 2004, hal. 12).

PROGRAM REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL: UNTUK RAKYAT ATAU KORPORASI?

Gagasan *landreform* muncul kembali dalam kebijakan pemerintah pada tahun 2001 dengan lahirnya TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembauran Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (lihat Nirwana et al, 2003; Ya’kub, 2003),⁸ yang ditindaklanjuti dengan Keppres No. 34/2003

⁸ Untuk ragam pandangan dan tafsir para aktivis agraria terhadap TAP MPR IX/2001.

dengan memberi mandat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan penyempurnaan UUPA (lihat Wiradi, 2005, hal. 32).⁹

Di era pemerintahan Jokowi, Reforma Agraria mulai digulirkan kembali sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (lihat Bappenas, 2017), dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan disusul dengan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Program Reforma Agraria (RA) dikerjakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dibentuknya sebuah tim melalui Surat Keputusan Nomor 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria pada Mei 2017. Tim tersebut terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja) dan satu unit sekretariat. Pokja I bidang pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial diketuai Menteri LHK, Pokja II bidang legalisasi dan redistribusi tanah diketuai Menteri ATR/ Kepala BPN, dan Pokja III bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat diketuai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Fokus kebijakan agraria pemerintahan Jokowi adalah legalisasi dan redistribusi aset yang disebut Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial 12,7 juta hektar sampai dengan tahun 2019 (lihat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018).¹⁰ Yang dimaksud sebagai substansi Reforma Agraria (RA) pemerintahan Jokowi juga mencakup di dalamnya Perhutanan Sosial (PS). Namun demikian, berbeda dengan RA yang targetnya berupa pemberian hak kepemilikan atas TORA, target PS pada pemberian izin pengelolaan hutan negara atau pengakuan hutan adat dengan subjek penerimanya masyarakat dan pemerintah di perdesaan.

Dalam *Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten* yang di-

⁹ Kebijakan tersebut ternyata bukan hendak menyempurnakan, melainkan upaya mengubah substansi UUPA.

¹⁰ Dari luasan tersebut, ditargetkan 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset terdiri dari 3,9 juta hektar untuk sertifikasi tanah-tanah warga dan 0,6 juta hektar untuk lahan transmigrasi. Sisanya seluas 4,5 juta hektar dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektar dari lahan hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan yang ditelantarkan, serta 4,1 juta hektar dari pelepasan kawasan hutan negara.

terbitkan oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), yang dimaksud sebagai reforma agraria oleh pemerintahan Jokowi adalah “[...] kebijakan, legalisasi, dan program pemerintah yang diniatkan dan diumumkan sebagai suatu operasi yang terkoordinasi dan sistematis untuk: (a) mendistribusikan kepemilikan tanah, mengakui klaim-klaim, dan hak-hak atas tanah; (b) memberikan akses pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan hak-hak atas tanah; (b) memberikan akses pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah; dan (c) menciptakan kekuatan produktif baru secara kolektif di desa dan kawasan pedesaan. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif masyarakat miskin, sehingga terjadi perubahan kondisi masyarakat miskin atas penguasaan tanah/lahan sebelum dan setelah adanya kebijakan, legislasi, dan program tersebut” (lihat Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017, hal. 3).

Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan Reforma Agraria adalah “penyediaan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan mendistribusikan dan melegalisasikan Tanah-tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok maupun perorangan sebagai menjadi milik rakyat, mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah Kelola desanya’ (lihat Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017, hal. 6).

Hingga menjelang akhir masa jabatannya, redistribusi tanah sebagaimana dijanjikan belum banyak terealisasi. Namun demikian, persoalan fundamentalnya bukanlah pada program yang dijanjikan sudah atau belum terealisasi atau seberapa luasan lahan yang telah didistribusi, melainkan pada program RAPS itu sendiri yang merupakan sebuah persoalan, sebab kebijakan tersebut merupakan bagian integral dari skema pembangunan ekonomi neoliberal. Sebagai sebuah program yang memakai terminologi “Reforma Agraria”, RAPS telah mengaburkan sub-

stansi perjuangan pembaruan agraria sejati. Pertanyaannya, jenis reforma agraria seperti apa yang tengah dijalankan pemerintah Jokowi jika benar bisa dianggap sebagai Reforma Agraria?

Secara ideologis, Reforma Agraria dibagi menjadi tiga jalan utama, yakni model kapitalisme, model sosialisme, dan model neopopulisme. Sedangkan berdasar peran dominan yang menjalankannya terbagi menjadi dua, yakni *agrarian reform by grace* dengan peran pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaan reforma agraria serta *agrarian reform by leverage* dengan peran rakyat secara terorganisasi melalui organisasi tani yang sangat besar dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional.²⁰

Bila merujuk kategorisasi di atas, maka pertanyaan ekonomi-politiknya apakah ideologi RAPS? Apakah program RAPS benar-benar untuk menyejahterakan rakyat, yakni mengikis ketimpangan sumber-sumber agraria dan menyelesaikan konflik agraria sebagaimana klaim pemerintah? Siapa yang diuntungkan oleh program RAPS? Untuk apa dan siapa program RAPS? (lihat Bernstein, 2010, hal. 22-23).

Klaim “memberikan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria” dan “mengatasi kesenjangan penguasaan tanah” harus diuji pada tataran konseptual dan implementasinya serta relasinya dengan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah. Pemerintah tetap menempuh strategi pembangunan ekonomi neoliberal di satu sisi, namun juga menjalankan program atau kebijakan agraria yang disebut Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di sisi lain. Keduanya dijalankan secara beriringan dan seolah tampak komplementer dan saling mengandaikan. Namun demikian, bila dicermati dan dijalankan secara konsisten, keduanya saling menegasikan. Adalah sebuah ketidakmungkinan untuk dapat mengamalkan isi dan tujuan UUPA yang berwatak populistik, yang membela kepentingan petani kecil yang membutuhkan tanah, sembari sekaligus meresapi kebijakan ekonomi neoliberal yang membela modal besar rakus tanah.

Perwujudan Reforma Agraria dengan melakukan sertifikasi tanah merupakan suatu usaha mempercepat dan mempermudah jual beli tanah dan pembebasan tanah/lahan untuk kepentingan modal besar.

Sertifikasi tanah justru memberi peluang memindah kepemilikan dan penguasaan tanah secara legal. Bahkan, dalam sebuah kesempatan membagi sertifikat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tanah yang sudah disertifikasi bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha (lihat Bramantyo, 2019). Program sertifikasi itu sejalan dengan kebijakan pembangunan yang mengutamakan kepastian hukum bagi kelancaran laju investasi. Melalui jaminan kepastian hukum, investasi dapat dengan mudah menjadi skema akuisisi tanah melalui kerangka hukum yang akomodatif, tanpa perlu melakukan perampasan tanah (*land grabbing*) secara koersif, yang selain lamban juga membutuhkan ongkos finansial dan sosial jauh lebih besar.

Melalui siaran pers tertanggal 20 Juli 2018, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia mendukung dan menyetujui *Program to Accelerate Agrarian Reform* pemerintahan Jokowi dengan menggelontorkan pinjaman ratusan juta dolar agar segera terwujud “Pengelolaan Tanah yang Berkelanjutan”, salah satu prinsip kebijakan pasca-Konsensus Washington. Hal yang membedakan Konsensus Washington dengan Pasca-Konsensus Washington adalah, yang pertama mengabaikan atau kurang memperhatikan masalah tata kelola, sedangkan yang kedua, tata kelola, kepastian hukum, dan pembangunan berkelanjutan merupakan kata kuncinya. Konsensus Washington meminimalisasi peran negara dan berangkat dari pandangan bahwa negara perlu dilepaskan dari pasar, sedangkan negara dalam pendekatan Pasca-Konsensus Washington berperan penting untuk mereformasi ekonomi beriringan dengan reformasi birokrasi (lihat Abrahamsen, 2000, hal. 30; Stiglitz, 2001, hal. 57-93).

Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A Chaves mendukung secara finansial program agraria Pemerintah Indonesia, yang dilihatnya akan memberi kejelasan penggunaan tanah. Bank Dunia sangat berkepentingan pada keberhasilan Kebijakan Satu Peta pemerintahan Jokowi melalui reforma agraria, karena tujuan utamanya agar data spasial yang terpusat untuk acuan semua perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional lainnya.²⁴ Demi kelancaran investasi, diperlukan kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi agar lebih mudah mengakses tanah. Bagi Bank Dunia, sistem informasi per-

tanahan yang tidak efisien, terpecah-pecah, dan tidak lengkap, akan menghambat tata kelola tanah dan sumber daya alam di Indonesia, yang juga berarti menghambat akses tanah bagi investasi.²⁵

Tidak ada makan siang gratis. Setiap bentuk bantuan yang diberikan selalu berakibat di kemudian hari, yakni akumulasi kapital akan jauh lebih besar di semua sektor pembangunan.²⁶ RAPS merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi neoliberal yang dibimbing pasar (*market led reform*) dan melihat tanah sebagai komoditas, serta berusaha mendorong terwujudnya jual-beli tanah secara bebas dengan memprioritaskan legitimasi hak (pribadi/perorangan) pemilikan tanah. Namun, komitmen RAPS untuk merombak struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria sangat diragukan. Hingga saat ini hampir tidak ada evaluasi, moratorium, atau bahkan pencabutan izin HGU penguasaan lahan berskala luas di sektor tambang dan perkebunan. Data serta akses informasi mengenai kepemilikan ataupun penguasaan lahan skala besar tidak transparan. Walaupun *Forest Watch Indonesia* (FWI), salah satu lembaga yang fokus pada pengawasan hutan, telah memenangkan gugatan ke Mahkamah Agung, untuk keterbukaan informasi pada ATR/BPN,²⁷ hingga kini nama-nama perusahaan pemegang HGU tak pernah dibuka oleh Kementerian ATR/BPN dengan alasan untuk melindungi kepentingan para pengusaha.²⁸ Itulah yang menyebabkan penguasaan tanah secara luas oleh para oligark tak pernah tersentuh kebijakan agraria pemerintah Jokowi. Penguasaan mereka dianggap legal dan tidak termasuk dalam peta TORA.²⁹

Dengan demikian, kebijakan agraria pemerintah Jokowi, secara konseptual dan implementasi, tidak dirancang untuk menyejahterakan rakyat, khususnya para petani kecil dan petani tak bertanah, melalui penataan ulang struktur kepemilikan dan penguasaan agraria yang lebih adil dan menyeluruh seperti di dalam UUPA, melainkan sebagai penyeselarasan kebijakan sektor pertanahan bagi kepentingan modal yang direvisi oleh kebijakan Pasca-Konsensus Washington tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan yang prasyarat utamanya adalah pengelolaan tanah secara legal. Itulah maksud dari pembangunan berkelanjutan, yaitu adanya jaminan kepastian hukum bagi penguasaan tanah untuk para investor. Ada beberapa indikasi. *Pertama*, pembentukan Tim Reforma

Agraria di bawah kementerian ekonomi, bukan dengan membentuk tim *ad hoc* khusus untuk menyelenggarakan Reforma Agraria. *Kedua*, penerjemahan dan pengamalan reforma agraria melalui sertifikasi tanah. *Ketiga*, kebijakan agraria yang mendapat dukungan finansial sangat besar dari Bank Dunia. *Keempat*, kebijakan Reforma Agraria hanya melegalkan tanah dengan status *clean and clear*, bukan pada tanah berstatus sengketa, sehingga tak pernah ada penyelesaian tanah yang bersengketa hingga sekarang. *Kelima*, Tim Reforma Agraria tidak meninjau atau mencaibut kepemilikan dan penguasaan berskala luas yang dimiliki ataupun dikuasai para kapitalis.

Kontradiksi makin tampak, ketika secara retorik hendak mengikis ketimpangan dan konflik agraria, namun pada saat bersamaan membuka kran investasi seluas-luasnya dengan banyak menerbitkan kebijakan pembangunan ekonomi pro-investasi yang justru makin memperkeras konflik agraria, khususnya perampasan tanah untuk infrastruktur jaringan transportasi dan energi, di berbagai tempat di Indonesia. Pernyataan Presiden Joko Widodo saat acara debat calon presiden 2019 silam bahwa “dalam empat setengah tahun ini, hampir tidak terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur, karena tidak ada ganti rugi. Yang ada adalah ganti untung,” tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Rakyat yang menolak pengambilalihan tanah atau lahan gaprannya untuk pembangunan infrastruktur kerap diintimidasi, mengalami kekerasan fisik, dan bahkan dikriminalisasi.

SIGNIFIKANSI UUPA DAN REFORMA AGRARIA SEJATI

Pada umumnya yang dirujuk sebagai reforma agraria sejati, dalam konteks pembahasan pembaruan agraria di Indonesia, adalah UUPA. Istilah reforma agraria sejati makin deras disuarakan di tengah kebijakan-kebijakan agraria berbagai rezim pro-modal di Indonesia yang cenderung makin jauh dari prinsip-prinsip UUPA. Namun, bukan berarti UUPA telah paripurna dan tanpa kritik sama sekali. Sebagai pijakan pengambilan kebijakan agraria di Indonesia, UUPA adalah tolok ukur minimal yang tidak mungkin diabaikan bila menghendaki pembaruan agraria secara menyeluruh untuk kesejahteraan rakyat dan sebagai landasan pembangunan.

Secara konseptual dan dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria sejati di Indonesia dijalankan secara neopopulis—tanah didistribusikan kembali (redistribusi) untuk para petani penggarap. Secara historis, RA tak bisa dipisahkan dari cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia atau dekolonisasi yang dipelopori para pendiri republik untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi rakyat Indonesia dengan cara mengikis sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme di sektor tanah. Karena itu, belum bisa dikatakan merdeka meski mempunyai pemerintahan sendiri, oleh bangsa sendiri, sebelum terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat itu terang-benderang dalam pernyataan Bung Karno bahwa *landreform*— bagian kecil dari reforma agraria (*agrarian reform*)— adalah fondasi revolusi Indonesia. Sebab, revolusi tanpa *landreform* sama dengan gedung tanpa alas, pohon tanpa batang, omong besar tanpa isi.

Tak heran, bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang baru merdeka, perjuangan melawan penjajah juga dihayati sebagai perjuangan merebut kembali tanah-tanah bekas perkebunan asing di Indonesia yang sebelumnya dirampas oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Untuk menggambarkan suasana revolusioner perjuangan rakyat itu, Muhammad Tauchid menuliskan, "...beribu-ribu hektar tanah onderneming dan hutan dijadikan tanah pertanian rakyat untuk menanam bahan makanan dan dijadikan untuk mendirikan gubuk-gubuk rumah yang sebelumnya itu mereka menumpang di pekarangan orang..." (lihat Tauchid, 1952, hal. 11).

Para pemimpin republik, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, telah memikirkan dan mencanangkan untuk merumuskan undang-undang agraria baru mengganti undang-undang agraria kolonial 1870. Pembentukan panitia agraria berlangsung silih berganti selama dua belas tahun, mulai dari panitia agraria Yogyakarta 1948, panitia agraria Jakarta 1952, panitia Suwahyo 1956, panitia Sunaryo 1958, dan rancangan Sujarwo 1960. Reforma Agraria sejati pernah dicoba untuk dilaksanakan pada 1960, namun gagal oleh peristiwa Gestapu dan pergantian pemerintahan. Bukan hanya pelaksanaannya saja, tetapi juga rancangan programnya belum tuntas.¹¹ Penjabaran UUPA 1960, yaitu UU

¹¹ Wawancara dengan Gunawan Wiradi, 2 Juli 2019.

No. 56/1960 yang dikenal sebagai *landreform*, hanya terbatas menyangkut pertanian rakyat. Sektor-sektor lain, seperti perkebunan, pertambangan, kelautan, kehutanan, dan lain-lain, belum sempat tergarap.

Pada dasarnya, program *landreform* mencakup (1) larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas; (2) larangan pemilikan tanah *absentee*; (3) redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*; (4) pengaturan tentang soal pengambilan dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan; (5) pengaturan kembali perjanjian bagi hasil nah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan kepemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil (lihat Harsono, 1968, hal. 241).

Sementara itu, pelaksanaan Reforma Agraria sejati, khususnya *landreform* mempunyai tiga ciri utama yang dijalankan dalam kerangka waktu tertentu (*fixed in time*), seperti di Jepang 4 tahun, India 5 tahun, Mesir 7 tahun, dan sebagainya; lembaga pelaksanaannya bersifat *ad hoc*, sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan; dan dikerjakan dengan cepat (*rapid*). Ketiga hal tersebut dilaksanakan oleh sebuah badan khusus yang mempunyai otoritas penuh dalam menyelenggarakan reforma agraria. Tugasnya adalah mengoordinasi semua sektor terkait, mempercepat proses pelaksanaannya, dan menangani konflik kepentingan yang kemungkinan besar terjadi. Tujuan utama Reforma Agraria adalah menata kembali atau merombak struktur kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, utamanya tanah, untuk kepentingan rakyat kecil, yaitu petani kecil, buruh tani, dan tunakisma, secara menyeluruh dan komprehensif (lihat Parlindungan, 1990, hal. 1).

Karena itu, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang agar pelaksanaan Reforma Agraria sesuai dengan tujuan yang dimaksud, yaitu memberikan tanah kepada mereka yang benar-benar mengerjakannya (penggarap), bukan mereka yang hanya “ongkang-ongkang kaki,” serta mengarusutamakan tanah sebagai fungsi sosial,¹² bukan untuk tujuan komersial. Karena itu, Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pemba-

¹² Fungsi sosial tanah merupakan salah satu prinsip pokok UUPA No. 5/1960 yang dinyatakan dalam Pasal 6 UU ini.

ngunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama, 1961-1969, pada Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa *landreform* sebagai bagian mutlak revolusi Indonesia merupakan basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat pengisapan (lihat Ringkasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. 1 dan II/ MPRS/1960).

Untuk itu, UUPA 1960 telah mengatur secara keseluruhan tata kelola agraria di Indonesia secara berkeadilan.¹³ Dalam Bab II Pasal 16, misalnya, diatur tentang hak atas tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yang mencakup 1) hak milik; 2) hak guna usaha; 3) hak guna bangunan; 4) hak pakai; 5) hak sewa; 6) hak membuka tanah; dan 7) hak memungut hasil hutan. Sayangnya, banyak pengaturan hak atas tanah telah mengalami penyimpangan. Hal tersebut diperkuat oleh paradigma pembangunan di Indonesia. Hak rakyat atas tanah tunduk di bawah kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan untuk investasi modal besar (lihat Schoorl, 1984, hal. 226-245; Erari, 1999, hal. 18). Tidak seperti RAPS, UUPA melarang pemilikan tanah yang melampaui batas (lihat, Tabel 1). Prinsip yang terdapat di dalamnya adalah tidak diperkenankan adanya “penguasaan tanah yang luas (*latifundias*) melalui mekanisme *ceiling* (batas tertinggi) seseorang boleh mempunyai tanah (lihat Parlindungan, 1984, hal. 43).

PERJUANGAN MINIMALIS DAN KONSEKUENSINYA

Tak bisa dimungkiri bahwa pembangunan pasti memerlukan tanah. Karenanya diperlukan sebuah cara dan mekanisme untuk mengubah bentang alam untuk suatu tujuan tertentu. Dari cara halus berupa negosiasi hingga paling brutal yang mengintensifikasi keterlibatan tentara sebagai alat kekerasan negara untuk mengintimidasi rakyat yang menolak “pembangunan nasional.” Salah satu cara adalah pengambilalihan tanah yang sudah dikuasai dan dikelola oleh rakyat untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus, bandara, jaringan transportasi, dan energi kotor PLTU Batubara.

¹³ UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara 1960-104 dan sejak 24 September 1960 telah berjalan atau berlaku sesuai tertib hukum yang baru di bidang hukum agraria

Di satu sisi, pemerintah memerlukan tanah untuk memenuhi ambisi pembangunan berorientasi pasar dan investasi. Di sisi lain, rakyat pemilik dan pengelola tanah tak menghendaknya. Itulah yang memicu terjadinya konflik tanah. Kondisi tersebut akan terus berlangsung, bila tidak diselenggarakan Reforma Agraria secara menyeluruh. Konflik per-tanahan dalam era Indonesia kontemporer adalah hasil dari perubahan struktur ekonomi yang bergulir cepat sejak pertengahan tahun 1980-an. Dibandingkan dengan yang terjadi di masa lampau, konflik saat ini tidak hanya terjadi pada tanah yang digunakan untuk pertanian, melainkan juga pada tanah untuk semua jenis proyek pembangunan, seperti kehutanan, *real estate*, pariwisata, pertambangan, pembangunan jalan dan bendungan, kawasan industri, dan sebagainya (lihat Kano, 1997, hal. 31).

Tabel 1 Perbandingan UUPA dan RAPS

	<i>UUPA (landreform)</i>	<i>RAPS (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)</i>
Orientasi Ideologi	Populis	Neoliberal
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Tujuan Reforma Agraria	Menata ulang struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, utamanya tanah untuk kepentingan rakyat kecil (petani penggarap, buruh tani, dan tunakisma) secara menyeluruh Mengikis ketimpangan pemilikan/penguasaan dan penggunaan tanah sebagai landasan pembangunan	Pemetaan tanah dan jalan bagi pemilikan dan penguasaan tanah untuk investasi melalui sertifikasi aset
Objek Reforma Agraria	Batasan: ditentukan batas minimum dan maksimum pemilikan dan penguasaan tanah Semua tanah yang melampaui batas maksimum menjadi objek reforma	Batasan: tidak ditentukan batas minimum dan maksimum pemilikan dan penguasaan tanah Tidak semua tanah yang melampaui batas maksimum. Hanya tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya serta tidak melakukan perpanjangan atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah haknya berakhir, dan tanah tidak produktif bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan
Subjek Reforma Agraria	Petani penggarap (slogan <i>landreform: land to the tillers</i>)	Selain petani penggarap menjadi subjek reforma, di antaranya: Guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; pekerja harian lepas; pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; PNS paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat
Pelaksana	Panitia <i>ad hoc</i> Reforma Agraria	Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pelaksanaan	Dilaksanakan dengan cepat (<i>rapid</i>) dan ditentukan batas waktu pelaksanaannya.	Tidak ditentukan batas waktu pelaksanaannya

Gencarnya pembangunan di sektor jaringan infrastruktur, tambang, dan energi, untuk menarik minat investor agar menanamkan modal di Indonesia di bawah mega proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) justru memicu munculnya konflik-konflik baru.¹⁴ Semua konflik yang terus terjadi adalah konsekuensi logis dari dijalankannya ekonomi kapitalisme melalui kebijakan neoliberal di Indonesia. Kebijakan RAPS juga dikerjakan beriringan dengan kebijakan pemberdayaan desa melalui pelbagai program pendampingan yang disebut Program Inovasi Perdesaan (*Village Innovation Program/VIP*). Program yang memakan biaya 4,5 miliar dolar AS dari Bank Dunia itu bertujuan meningkatkan keuntungan yang diterima oleh desa melalui perbaikan tata kelola pemerintahan lokal dan kondisi sosial-ekonomi (lihat Makki, 2018).¹⁵ Program tersebut mirip Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilahirkan dari “ideologi” Pasca-Konsensus Washington tahun 1990-an sebagai usaha teknis Bank Dunia untuk mencapai masyarakat yang efisien dengan menekankan pentingnya kemampuan individual agar memiliki daya saing dan mampu mengelola usaha untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Pendekatan itu banyak dikritik sebagai teknikalisisasi masalah. Semua program yang dijalankan tidak pernah membongkar akar persoalan sesungguhnya, salah satu di antaranya adalah ketimpangan sosial yang disebabkan perampasan tanah oleh proyek-proyek investasi besar (lihat Li, 2007).

Kondisi dan situasi yang dihadapi, yakni pemisahan sarana produksi (tanah) dari produsennya (petani) yang berlangsung melalui serangkaian kekerasan, intimidasi, dan perampasan yang dilegitimasi oleh aturan perundangan pro-modal tidak jauh berbeda dengan situasi yang digambarkan Karl Polanyi selama revolusi industri—periode paling aktif sejak 1795 hingga 1834—di Inggris. Demi menciptakan pasar tenaga kerja dalam sistem ekonomi pasar, tatanan masyarakat tradisional dihancurkan dengan memisahkan para petani dari tanah mereka.

14 Pada kuartal I-2019, setelah pemerintah mengevaluasi PSN, sebanyak 10 proyek selesai dibangun, 14 proyek dikeluarkan dari daftar PSN dan pemerintah menambah 1 proyek sehingga jumlah proyek yang masuk dalam daftar PSN sebanyak 222 proyek.

15 Tujuan tersebut dicapai melalui tiga komponen, yaitu pemberian hibah di tingkat kecamatan, pemberdayaan dan fasilitasi komunitas, termasuk dukungan implementasi dan asistensi teknis. Tentang total bantuan Bank Dunia untuk proyek aktif di Indonesia

Karena itu, sebagian besar masyarakat menolak dirinya dijadikan sekadar pelengkap pasar, sebab tak ada sistem pasar yang tidak mengandaikan tenaga kerja di dalamnya (lihat Polanyi, 2001). Perampasan alat produksi petani dan produksi pertanian subsisten,¹⁶ yang disebut Marx sebagai *primitive accumulation* (lihat Fine, 1983, hal. 393-394) di perdesaan Indonesia, telah memaksa para petani menjadi buruh dan cadangan buruh murah di perkotaan, atau bahkan menjadi gelandangan (lihat Cohen, Gutkind dan Braziers, 1979; Habibi, 2016).

Apa yang terjadi di Inggris abad ke-18, kini masih berlangsung di belahan Dunia Ketiga, seperti Indonesia. Ratusan ribu hektar tanah yang semula digarap para petani, kini dikuasai kapitalis, yang juga gemar memabat hutan-hutan Indonesia. Di antara mereka adalah Salim Group yang menguasai tanah sekitar 1.155.745 hektar; Wilmar International Group sekitar 210.000 hektar; Sinar Mas Group sekitar 2.309.511 hektar, Riau Pulp Group sekitar 1.192.387 hektar; Kayu Lapis Indonesia Group sekitar 1.445.300 hektar; Alas Kusuma Group sekitar 1.157.700 hektar; Barito Pasifik Group sekitar 1.036.032 hektar; Korindo Group sekitar 951.120 hektar; Jati Group sekitar 965.410 hektar; Suma Lindo Lestari Jaya Group sekitar 515.000 hektar; dan masih banyak lainnya.¹⁷

Penguasaan tanah melalui pelbagai skema perampasan dari yang ilegal hingga yang legal via regulasi makin sulit dibendung. Itu merupakan cerminan kondisi riil politik di Indonesia pascareformasi, yang menjadi tanda kemenangan kekuatan oligarki terhadap seluruh agenda perjuangan gerakan populer di Indonesia. Rekonstruksi kuasa oligarki dan unsur-unsur militer dalam gelanggang politik tidak sebanding dengan upaya konsolidasi gerakan populer untuk ikut bertarung dalam arena politik elektoral. Berkat kepemilikan modal ekonomi yang besar, para oligark mampu menyesuaikan diri dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berbiaya sangat mahal dan juga terlibat di dalamnya secara hegemonik dan nyaris permanen (lihat Hadiz dan Robinson, 2014, hal. 35-56). Konfigurasi politik seperti itu tidak memberi ruang bagi intervensi politik dari kalangan gerakan populer, khususnya

¹⁶ Petani subsisten merujuk pada rumah tangga petani yang menggarap lahan kecil untuk dikonsumsi sendiri atau sekadar untuk bertahan hidup.

¹⁷ Dikutip dari siaran pers Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

gerakan agraria, untuk ikut terlibat dalam setiap perumusan agenda pembangunan ekonomi. Jalan satu-satunya adalah melalui “kolaborasi politik”, baik secara individual maupun organisasional, dengan politisi dan partai-partai politik sambil mendesakkan paradigma populistik agar turut dipertimbangkan dalam setiap proses perumusan dan pengambilan kebijakan politik.

Strategi tersebut secara keliru kerap disebut *struggle from within*, strategi perjuangan yang berangkat dari imperatif moral bahwa di tengah kabut gelap yang makin pekat harus tetap ada pihak yang berani menyalakan cahaya. Di tengah kekalahan demi kekalahan, setidaknya masih ada kebenaran yang mesti disuarakan. Sayangnya, karena mengabaikan hegemoni oligarki dan kekuatan modal melalui kebijakan neoliberal, pendekatan yang ada tidak banyak membantu dalam upaya membongkar relasi patrimonial para kapitalis, politisi borjuis, dan unsur-unsur militer untuk tetap menguasai sumber daya ekonomi di Indonesia. Bahkan, pada aspek tertentu kian menyurutkan perjuangan politik yang lebih radikal di kalangan rakyat korban konflik agraria. Rakyat bukannya didorong untuk menuntut layanan dan subsidi sosial yang lebih baik, redistribusi tanah yang berkeadilan dan menyeluruh, atau memperjuangkan hak-hak politik dan ekonomi yang digerogeti pengaturan *governance* ala neoliberal. Mereka justru digiring untuk menerima kenyataan politik yang ada sebagai konsekuensi yang harus mereka telan. Alhasil, itulah yang membuat banyak eksponen gerakan pembaruan agraria mengambil posisi akomodatif dengan menerima kebijakan RAPS dan menganggap ini sebagai arena politik yang bisa diintervensi.

KESIMPULAN

Kebijakan agraria pemerintahan Jokowi merupakan strategi akselerasi bagi kepentingan modal besar dalam mempermudah akses terhadap tanah di Indonesia. Pada prinsipnya, orientasi kebijakan ekonomi-politik pemerintah saat ini tidak ubahnya mengembalikan hukum *Agrarische Wet* 1870 dengan semangat liberal. Sebelumnya, usaha perkebunan merupakan *staatbedrijf* atau perusahaan negara, namun sesudah tahun 1870 usaha perkebunan menjadi milik swasta. Bahkan, setelah mendapat dukungan bank-bank komersial di Negeri Belanda (sejak 1850), para kapitalis Belanda melakukan penetrasi dengan berinvestasi

dalam pembangunan rel dan jalur kereta api, pertambangan, perbankan, dan perkebunan di Hindia- Belanda (lihat Kartodirjo, 1999, hal. 19). Dengan demikian, *Agrarische Wet* 1870 berfungsi sebagai prasyarat legal bagi komodifikasi tanah dan tenaga kerja di negeri jajahan. Berdasarkan aturan perundangan tersebut, pemerintah kolonial menerbitkan sertifikat hak milik untuk melegalisasi praktik-praktik perampasan.

Berdasarkan data historis dan kondisi konkret, Indonesia belum memasuki transisi agraria secara adil dan menyeluruh. Industrialisasi sudah dimulai (dan gagal), namun reforma agraria sebagai landasan pembangunan belum pernah dilakukan secara tuntas yang semestinya dilangsungkan sebelum proses industrialisasi. Sejak Orde Baru hingga sekarang, kebijakan agraria lebih memprioritaskan pada upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal (investasi). Pelbagai kebijakan yang diterbitkan sejak periode deregulasi kebijakan pertanahan sekitar tahun 1980-an hanya difokuskan untuk memfasilitasi kepentingan pemilik modal, baik asing maupun dalam negeri. Berbagai upaya deregulasi dan jaminan kepastian hukum diciptakan untuk merangsang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga bisa menarik banyak investor menanamkan modal dan dapat dengan cepat memperoleh tanah di Indonesia.

Perjuangan pembaruan agraria seharusnya berada di tangan rakyat yang berupaya mendongkraknya (*land reform by leverage*). Dengan demikian, dibutuhkan kader-kader penggerak reforma agraria berbasis organisasi-organisasi tani lokal, utamanya para petani gurem, dan buruh tani tak bertanah dalam memperjuangkan terwujudnya Reforma Agraria sejati di Indonesia sebagaimana seharusnya. Harus pula dikatakan bahwa kebijakan agraria yang sedang diupayakan berjalan di negeri ini adalah reforma semu (quasi-reform) atau reforma gadungan (*pseudo-reform*), yaitu kebijakan yang seolah-olah melakukan pembaruan, tetapi hakikatnya bukan pembaruan. Kebijakan agraria di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan sebagai pendomplengan terhadap terminologi Reforma Agraria yang sejati. Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab semua untuk membenahinya.

REFERENSI

- Abrahamsen, Rita. (2000). *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*. London: Zed Books.
- Suara Lidik. (2017). "AGRA Menolak Reformasi Agraria Palsu Jokowi dan Tidak Bergabung Aksi KNPA" diakses 12 September 2019 dari <https://www.suaralidik.com/agra-menolak-reforma-agraria-palsu-jokowi-dan-tidak-bergabung-aksi-knp>
- Amin, Samir. (1976). *Unequal Development*. New York: Monthly Review Press.
- Bachriadi, Dianto. (1998). *Merana di Tengah Kelimpahan*. Jakarta: Elsam.
- Bappenas. (2017). "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional." Diakses 2019 dari <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/>
- Bayu, Dimas Jarot. (2019). "Tolak Buka Data HGU, Menteri Agraria Beralih Lindungi Industri Sawit" diakses 2019 dari <https://katadata.co.id/berita/2019/03/06/tolak-buka-data-hgu-menteri-agraria-beralih-lindungi-industri-sawit>
- Bernstein, Henry. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Kanada: Fernwood Publishing dan Kumarian Press.
- Bramantyo. (2019). "Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah, Presiden Jokowi: Tolong Dikalkulasi Sebelum Dijaminkan ke Bank" diakses 2019 dari <https://economy.okezone.com/read/2019/09/06/470/2101607/bagikan-3-000-sertifikat-tanah-presiden-jokowi-tolong-dikalkulasi-sebelum-dijaminkan-ke-ban>
- Cardoso, Henrique dan Enzo Falleto. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. Berkeley: University California Press.
- Chang, Ha-Joon dan Ilene Grabel. (2004). *Membongkar Mitos Neolib: Upaya merebut Kembali Makna Pembangunan*. Yogyakarta: Insist Press.

- Cohen, Robin; Peter CW Gutkind dan Phyllis Brazier (eds.). (1979). *Peasants and Proletarians: The Struggles of Third World Workers*. New York dan London: Monthly Review Press.
- Danaher, Kevin. (2005). *10 Alasan Bubarkan IMF & Bank Dunia*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat.
- Erari, Phil. (1999). *Tanah Kita Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fakih, Mansour. (2001). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Fine, Ben. (1983). "Primitive Accumulation" dalam Tom Bottommore (ed.), *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Harvard University.
- Ford, Michael dan Thomas B. Pepinsky. (2014). *Melampaui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia dalam Prisma, Volume 33, No.1*
- Frank, Andre Gunder. (1969). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*. New York & London: Monthly Review Press.
- Friana, Hendra. (2018). "Pemerintah Luncurkan Kebijakan Suatu Peta Hari Ini, Apa Manfaatnya?" Diakses 1 Juli 2019 dari <https://tirto.id/pemerintah-luncurkan-kebijakan-satu-peta-hari-ini-apa-manfaatnya-dbEE>
- Habibi, Muhtar. (2016). *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980-an*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Hadiz, Vedi R. dan Richard Robinson. (2014). "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia" dalam *Prisma Vol. 33, No.1*
- Harsono, Boedi. (1968). *Undang-Undang Pokok Agraria: Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Djakarta: Djambatan.

- Hertz, Noorena. (2004). *The Debt Threat: How Debt is Destroying the Developing World*. New York: Harper Business.
- Kano, Hiroyoshi. (1997). "Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria: Tinjauan Sejarah Perbandingan." dalam Noer Fauzi Rachman (ed.), *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirjo, Sartono. (1999). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten*. Jakarta: KSP.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. (2017). *Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. Jakarta: KSP.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2018). "Rilis Talkshow Kehutanan" diakses 2019 dari <https://www.ekon.go.id/ekliping/download/4323/2994/27.10.2018-rilis-talkshow-kehutanan.pdf>
- Kikeri, Sunita; John Nelis dan Mary Shirley. (1994). "Privatization: Lessons from Market Economics" dalam *The World Bank Research Observer*, Vol. 9
- Konferensi Tenurial 2017. (2017) "Percepat Reforma Agraria KPA Tawarkan LPRA" diakses 12 September 2019 dari <https://konferensitenurial2017.id/percepat-reforma-agraria-kpa-tawarkan-lpra/>
- Li, Tania Murray. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham dan London: Duke University Press.
- Makki, Safir. (2018). "Bank Dunia Kucurkan US\$ 7,45 Miliar untuk 50 Proyek RI." Diakses 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/>

ekonomi/20181005134110-532-336009/bank-dunia-kucurkan-us-745-miliar-untuk-50-proyek-ri

- Mas'ood, Mochtar. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*. Jakarta: LPE3S.
- Nirwana, Iwan. (2003). *Landreform di Desa: Seri Panduan Pendidikan dan Pengorganisasian*. Yogyakarta: Read Book.
- Parlindungan, AP. (1984). *Serba-Serbi Hukum Agraria*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Parlindungan, AP. (1990). *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Petras, James. (1978). *Critical Perspectives on Imperialism and Social Class in the Third World*. New York: Monthly Review.
- Polanyi, Karl. (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our time*. Boston: Beacon Press.
- Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. 1 dan II/ MPRS/1960, Dalam Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indonesia. Tanpa Kota: Panitya Pembina Djiwa Revolusi.
- Schoorl, JW. (1984). *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.
- Smith, Adam. (1960). *The Wealth of Nations*. London: JM Dent and Sons Ltd.
- Stiglitz, Joseph. (2001). "Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes" dalam Ha-Joon Chang (ed.), *Joseph Stiglitz and The World Bank: The Rebel Within*. New York: Anthem.
- Tauchid, Mochammad. (1952). *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Jakarta: Tjakrawala.
- Tjahjono, S Indro. (2004). *Peran Militer dalam Sistem Politik di Indonesia Sampai Jatuhnya Rezim Soeharto dalam Jurnal Wacana, edisi 17, Tahun III*.

- Wiradi, Gunawan. (2005). *Reforma Agraria Untuk Pemula*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bogor: Sajogyo Institute.
- World Bank. (2018). *Indonesia Sustainable Land Management*. Diakses 1 Juli 2019 dari <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2018/07/20/indonesia-sustainable-land-management>.
- Ya'kub, Achmad. (2003). *Agenda Neoliberalisme dalam Kebijakan Agraria di Indonesia dalam Tejo Purnomo (ed.), Melawan Neoliberalisme*. Jakarta: Federasi Serikat Petani Indonesia.

**ULASAN BUKU:
MAX AJL, A PEOPLE'S GREEN NEW DEAL
(LONDON: PLUTO PRESS, 2021)**

Muhammad Ridha¹

Di tengah krisis iklim yang semakin akut, pembahasan tentang masa depan sosialisme ekologis (*eco-socialism*) menjadi suatu keharusan bagi kalangan Sosialis-Marxis. Betapa tidak, keharusan akumulasi keuntungan tanpa batas dalam kapitalisme menjadi faktor kunci bagi semakin memburuknya kondisi iklim dan lingkungan sekarang. Berbeda dengan tradisi Marxis sebelumnya yang cenderung nihil untuk membicarakan problem lingkungan, agenda sosialisme di masa depan haruslah mengintegrasikan masalah kelestarian alam dalam perjuangan rakyat pekerja. Sosialisme sebagai sistem yang melampaui masalah akut kapitalisme sistem ekonomi politik yang bukan hanya peduli pada masalah kesejahteraan umum kemanusiaan tapi juga berkepentingan untuk mempertahankan keberlangsungan lingkungan yang manusia bagi seluruh populasi.

Dalam terang kebutuhan agenda politik ini, buku *A People's Green New Deal* (APGND) oleh Max Ajl (2021) menjadi relevan. Judul dari buku ini adalah respons pengetahuan Ajl terhadap popularitas gagasan *Green New Deal* (Kesepakatan Baru yang Hijau, GND) yang tengah semarak ditawarkan oleh figure sosialis arus-utama seperti Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Ajl

Ajl secara intensional melakukan intervensi terhadap agenda GND dengan menawarkan perspektif yang lebih radikal, suatu GND dengan rakyat pekerja (*people*) sebagai agensinya (atau *People's Green*

¹ Penulis merupakan Mahasiswa Doktoral Northwestern University, Evanston Illinois

New Deal, PGND). Bagi Ajl, PGND adalah manifestasi modern dari agenda politik ekologi sosialis yang radikal atau eko-sosialisme. Untuk menjelaskan eko-sosialisme. Dalam APGND, Ajl menggunakan pisau analisa sistem-dunia (*world-system*) yang banyak dikembangkan kalangan Marxis seperti Immanuel Wallerstein dan Samir Amin, Ajl melihat percakapan kita tentang kerusakan alam dan lingkungan harus dimulai dari premis keberadaan sistem ekonomi-politik yang timpang dan produksi yang eksploitatif bukan hanya antara kapital dan pekerja tapi juga antara negara maju (*Global North*, GN) dan negara tertinggal (*Global South*, GS). Implikasinya, agenda politik eko-sosialisme yang hendak ditawarkan bukan hanya mampu untuk mengkritik, tapi juga mengupayakan secara imajinatif pelampauan atas sistem ekonomi-politik dunia yang timpang sekarang ini. dengan a

APGND secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang terdiri dari 4 bab berisikan posisi kritis Ajl terhadap gagasan politik ekologi yang walaupun kritis, masih dianggap terbatas untuk mengatasi problem sistemik ketimpangan dunia yang diciptakan oleh kapitalisme. Sementara bagian kedua yang terdiri dari 3 bab berisikan proposal politik Ajl terkait dengan bagaimana eko-sosialisme dapat dan perlu diperjuangkan oleh semua pihak yang menghendaki hidup di alam yang lestari.

KRITIK NARASI ARUS-UTAMA GND

Pada Bab 1, Ajl membawa kita pada tinjauan luas terhadap kebutuhan politik ekologi sekarang. Ajl melihat ada konsensus umum intelektual tentang pentingnya implementasi politik ekologi sebagai suatu sistem. akan tetapi Ajl mencatat kesepakatan ini tidak diiringi dengan kejelasan kritik mendasar terhadap dinamika kapitalisme yang adalah fundamental bagi kerusakan alam dan lingkungan itu sendiri. Alih-alih, gagasan-gagasan yang seakan mereproduksi ketimpangan kuasa dan ekonomi yang dihasilkan oleh kapitalisme.

Dalam Bab 2, APGND mulai masuk untuk melakukan kritik terhadap pendekatan modernism ekologis (eko-modernisme). Walau gagasan ini banyak ditawarkan oleh kelompok Kanan, eko-modernisme banyak memikat kalangan Kiri. Ajl mencatat kemampuan gagasan

eko-modernisme untuk memikat baik Kanan dan Kiri terletak pada pandangan bahwa teknologi dapat menjadi solusi besar bagi tantangan ekologi sekarang. Menurut Ajl pandangan ini bukan hanya keliru, tapi juga menyesatkan karena ia mengalihkan percakapan utama tentang hubungan antara kerusakan alam dengan relasi sosial yang diciptakan oleh kapitalisme. Ajl bahkan berpendapat bahwa gagasan ini adalah semacam fantasi karena perkembangan teknologi selalu mensyaratkan konteks serta relasi sosial tertentu.

Sementara dalam Bab 3, Ajl melakukan elaborasi secara khusus atas pengetahuan terkini tentang pengelolaan energi. Ia secara teliti menelanjangi argumen-argumen pengelolaan energi yang terkesan 'realistis' namun pada dasarnya justru mengaburkan kita untuk memahami masalah pengelolaan energi yang sebenarnya. Menurutnya, pengelolaan yang seakan realistis justru membuat politik ekologi yang ditawarkan menjadi tidak realistis untuk mengatasi krisis lingkungan yang ada mengingat ia hanya mempertahankan pola relasi sosial kapitalisme. Dalam hal ini, Ajl bersimpati terhadap paradigma "*degrowth*" (gagasan yang menolak pertumbuhan ekonomi), dimana relasi sosial ekonomi-politik suatu negara dapat diubah jika terjadi perubahan radikal atas pola produksi dan konsumsi yang terlalu berorientasikan pada target pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Ajl mencatat pengurangan signifikan konsumsi energi yang ada di negara barat yang maju (GN) dapat menjadi pintu masuk bagi politik ekologi radikal.

Sedang pada Bab 4, Ajl mengantarkan kita untuk memilih dalam menentukan posisi politik alternatif terhadap kebuntuan kapitalisme sekarang dalam melestarikan lingkungan; antara sosial demokrasi hijau (SDH) atau eko-sosialisme. APGND secara eksplisit melakukan kritik terhadap agenda PND yang sangat bernuansakan SDH, yang dengannya membuat kita harus memilih eko-sosialisme. Berdasarkan diskusi sebelumnya, Ajl berpendapat bahwa SDH adalah agenda politik kiri yang sangat terbatas. SDH mendasarkan implementasi kebijakan pada ruang politik yang ada, yang pada dasarnya masih dikuasai oleh kapitalisme. Tidak heran jika kemudian terdapat beberapa fitur kapitalisme dalam agenda politik SDH seperti keberlanjutan imperialisme dan hubungan komodifikatif dan hirarkis antara GN dan GS.

GND KERAKYATAN

Pada bab-bab selanjutnya APGND yakni Bab 5, 6, dan 7 kita menemukan pemaparan Ajl untuk *“expand the scope of what is understood to be feasible”* (memperluas cakupan mengenai apa yang dipahami sebagai sesuatu yang dapat dilakukan, hal. 12). Dengan kata lain bagaimana mengimajinasikan agenda PGND sebagai eko-sosialisme di tengah cengkeraman struktural kapitalisme itu sendiri sekaligus untuk melampauinya. Namun Ajl mengingatkan bahwa imajinasi ini bukanlah posisi programatik namun lebih pada catatan analitis yang terbuka untuk disesuaikan pada konteks ruang-waktu tertentu (hal. 100).

Titik berangkat bagi imajinasi eko-sosialisme Ajl terletak pada praktik sosial masyarakat ekologis yang terpinggirkan oleh kapitalisme itu sendiri. Praktik yang reproduksinya sedikit banyak tidak tergantung pada konfigurasi imperialisme yang ada. dari posisi ini, logika alternatif mengenai pengelolaan ekologis berdasarkan prinsip sosialis dapat ditemukan. Yang diperlukan kemudian dalam setiap langkah pengorganisasian selanjutnya, agenda-agenda pembangunan yang berpihak pada kepentingan massa rakyat pekerja.

Agenda-agenda pembangunan sosialis yang pro ekologis ini misalnya meliputi re-evaluasi atas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kerja yang harus dikompensasi. Ajl berpendapat kerja-kerja reproduktif seperti mengurus rumah dan anak, mencuci, dan memasak haruslah dibayar oleh anggaran publik. Selain itu ia juga melihat pengelolaan kota haruslah mulai direncanakan untuk menekan jejak karbon. Ajl juga berpendapat bahwa perlu ada keputusan strategis bahwa prioritas transportasi dalam masyarakat sosialis yang pro ekologis adalah masififikasi transportasi publik disertai dengan pembangunan industri yang pengelolannya didesentralisasi secara komunal.

Gagasan desentralisasi ini sendiri berada dalam posisi sentral dalam catatan analitis eko-sosialisme Ajl. Ia melihat dalam PGND, keberadaan korporasi besar yang ditandai oleh sentralisasi haruslah dipecah menjadi unit-unit ekonomi yang lebih kecil. Ajl juga melihat dukungan lebih besar harus diberikan kepada produsen-produsen kecil dalam sektor agrikultur mengingat praktik produksi agrikultur mereka telah mampu untuk melestarikan alam itu sendiri.

Prasyarat politik untuk membangun agenda ini adalah revitalisasi politik berdasar prinsip pertanyaan-nasional (*national-question*): politik yang berdasar pada hak penentuan nasib sendiri dalam mendorong kedaulatan politik dan ekonomi. Politik berdasar pertanyaan-nasional walau memiliki kesamaan dengan nasionalisme, ia berbeda secara substantif mengingat karakter anti-imperialismenya. Dengan kata lain, agenda politik berbasiskan menyasar problem sistemis kapitalisme yang mempertahankan relasi penindasan terhadap bangsa di negara GS. Implikasinya, agenda-agenda kedaulatan ekonomi-politik yang diperjuangkan tidak hanya sebatas menjadi problem kebangsaan tapi juga struktural seperti keharusan akan penghapusan militerisme AS dan juga utang iklim dan ekologis yang diciptakan oleh negara maju GN.

KOMENTAR

Dalam pengalaman negara-negara Asia Tenggara, argumen Ajl terkait inisiatif ekologi yang berada di tingkatan lokal menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Dengan kriteria bahwa inisiatif ekologi lokal berpotensi menjadi agensi sosialisme sejauh reproduksi mereka tidak (sedikit banyak) tergantung imperialisme, Ajl secara tidak langsung mengkritik posisi kajian Asia Tenggara yang permisif dengan keberadaan kekuatan massa rakyat tingkat lokal (lihat mis. Hadiz 2010 dan Sidel 1999). Analisa ini setidaknya memaksa kita untuk kembali memeriksa pandangan bahwa konfigurasi kekuatan sosial tingkat lokal akan selalu didominasi oleh kepentingan kelas berkuasa. Ajl seakan tengah mengingatkan pentingnya secara seksama untuk memeriksa konfigurasi kekuatan sosial lokal berdasarkan pada pola reproduksi kekuatan sosial tersebut serta hubungannya dengan pola struktur sosial yang dominan.

Pada kritisisme Ajl terhadap agenda progresif arus-utama, saya bersepakat dengan argumen yang ditawarkan. Akan tetapi ada catatan minor saya terhadap beberapa kritisisme yang diajukan. Sebagai contoh, kritiknya terhadap eko-modernisme. Saya sepenuhnya setuju bahwa gagasan teknologi yang diajukan oleh para pengusung eko-modernis sering kali mengabaikan relasi sosial yang melatari perkembangannya. Pertanyaannya kemudian, setelah kita bisa mengajukan problem relasi sosial, apakah dengan sendirinya agenda pemajuan teknologi menjadi bukan prioritas dalam pembangunan sosialisme, khususnya di negara

GS? Di sini saya melihat kritik Ajl perlu ditempatkan sebagai kritik terhadap pada asumsi ideologis dibalik gagasan eko-modernisme itu sendiri dibandingkan sebagai kritik utuh atas implementasi pembangunan teknologi itu sendiri.

Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah argumen Ajl tentang perlunya melihat operasionalisasi PGND secara fleksibel di mana pendekatan praktik sentralisasi perencanaan dikombinasikan dengan desentralisasi otonomi inisiatif dari bawah. Walau proposal ini terdengar mengagumkan, namun Ajl terlalu sedikit memberikan ilustrasi pada bagaimana praktik ini berlaku; dan ketegangan-ketegangan, atau rekonsiliasi, apa saja yang muncul dari kombinasi ini bagaimana inisiatif ekologis dari bahwa dapat memperjuangkan inisiatifnya dalam kerangka kekuasaan yang ada untuk mendorong perencanaan lewat institusi publik. Eksposisi seperti ini menjadi penting sebagai bagian pembelaan mengenai mana yang sebenarnya secara realistis dapat dilakukan atau mana yang tidak dapat dilakukan dalam pendekatan yang kombinatorik ini.

KESIMPULAN

Menurut saya, APGND telah menjadi literatur penting terkait dengan visi perjuangan sosialisme kontemporer di tengah masalah krisis iklim dan lingkungan. Ajl memaksa kita untuk memikirkan kembali makna sosialisme di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi sekarang, khususnya di bidang energi dan pangan. Pembangunan sosialisme tidak bisa lagi menggantungkan pada apa yang pernah dilakukan di masa lampau, tapi juga harus secara reflektif memikirkan praktik terkini dari berbagai macam pengalaman keseharian rakyat pekerja dan mengintegrasikannya dalam agenda sosialisme secara keseluruhan. Agenda pengetahuan ini, bagi saya, sangatlah berharga dan penting untuk memastikan bahwa sosialisme yang kita perjuangkan sekarang adalah agenda masa depan, jawaban atas segala permasalahan yang kita hadapi saat ini. APGND adalah titik berangkat yang tepat bagi kita untuk memperdebatkan visi kita semua tentang sosialisme yang mendukung kelestarian ekologi.

REFERENSI

Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.

Sidel, J. T. (1999). *Capital, coercion, and crime: Bossism in the Philippines*. Stanford University Press.



Edisi Khusus tentang
Krisis Ekologi Kapitalis